

00A

114.7.400
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS, DAN
KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR. 27 (REVISI 1998)
TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN**

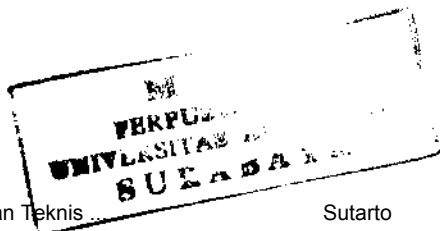
TFA 10/08

Sut
P



SUTARTO

**MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**



TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS, DAN
KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR. 27 (REVISI 1998)
TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN**



SUTARTO

**MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS, DAN
KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP
IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR. 27 (REVISI 1998)
TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN**



Oleh

SUTARTO
090410703L

**MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS DAN
KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR. 27 (REVISI 1998)
TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister
Program Studi Akuntansi
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga**

Oleh

**SUTARTO
090410703L**

**MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JANUARI 2007**

Oleh

Pembimbing



Dra. Isnalita, M.Si, Ak
NIP. 131 943 801

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Dr. H. Widi Hidayat, M.Si., Ak.
NIP. 131 558 573

**Telah diuji pada
Tanggal 2 Maret 2007**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Basuki, M.Com (HONS)., Ph.D, Ak

Anggota : 1. Dra. Isnalita, M.Si, Ak

2. Drs. Hendarjatno, M.Si, Ak

3. Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si, Ak

4. Dra. Wiwik Dianawati, M.Si, Ak



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga atas rahmat dan karuniaNYA tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Dra. Isnalita, M.Si, Ak selaku pembimbing tunggal yang telah memberikan dorongan, bimbingan, saran-sarannya serta kesediannya atas waktu berkonsultasi yang diberikan secara fleksibel. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan saya selaku manusia, mohon maaf bilamana selama berkonsultasi mengganggu kesibukannya.

Terima kasih kepada Bapak Drs. Widartoyo, MM. M.Si, k, Manajer KJA Soca Baskara dan Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur yang selalu mendorong saya untuk studi lanjut dan memberikan pandangan manfaat ilmu akuntansi kedepan utamanya dalam mendorong koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mampu melakukan praktek akuntansi sesuai dengan pedoman/aturan yang berlaku, disamping itu juga, bahwa ilmu akuntansi juga bermanfaat dalam menyongsong penerapan akuntansi sektor publik yang berlaku bagi entitas pemerintah.

Selanjutnya, juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, Bapak Soedirman. SH. MM, yang telah memberikan ijin untuk mengikuti studi lanjutan dan telah membimbing saya mengembangkan karier dalam jabatan struktural.

2. Wakil Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, Bapak Drs. Sjamsoe Boedy Arief. M.Si, yang telah memberikan ijin, dorongan dan memberikan nasihat dalam suksesnya studi serta karier dimasa datang.
3. Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, Bapak Ir. Anang Mashudi. M.Sc, yang telah membimbing, memberikan rekomendasi dan membantu dalam mengembangkan karier saya dalam jabatan struktural.
4. Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, Drs. Mas Purnomo Hadi. MM, yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas dispensasi waktu, sarana demi sukses tugas belajar serta mendorong saya untuk mengembangkan karier dalam jenjang jabatan struktural.
5. Kepala Sub Dinas dilingkungan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta teman-teman utamanya Sub Dinas Kelembagaan yang selalu memberikan toleransi dalam berbagai tugas, demi suksesnya studi.
6. Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Akuntansi yang telah memberikan materi pembelajaran, sehingga dapat bermanfaat utamanya dalam mengembangkan tugas-tugas kedinasan.
7. Istriku Tiya da anak-anakku Vian dan Pritha yang selalu mendampingi kami selama studi dan bersabar serta Kakakku Sri Riyayani yang selalu mendukung dan memfasilitasi demi suksesnya studi.

RINGKASAN

Pengaruh Akuntabilitas, Kesulitan Teknis dan Kesulitan Pengukuran terhadap Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.

Sutarto

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang ada, berdasarkan pengamatan, bahwa pengurus koperasi dan akuntan publik kurang merespon secara positif dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, dimana hal ini didasarkan pada laporan keuangan koperasi auditan sebagai bahan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada forum rapat anggota. Berdasarkan laporan audit tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengurus koperasi tidak menerapkan PSAK No. 27 (Revisi 1998). Adapun laporan yang tidak disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK dimaksud, yaitu ; (a) laporan perhitungan hasil usaha yang tidak memisahkan pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota, (b) laporan promosi ekonomi anggota, sehingga akuntabilitas koperasi belum mencerminkan tujuan dan prinsip-prinsip koperasi sebagai diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 3 dan 5. Pasal 3 berbunyi tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 5 prinsip-prinsip koperasi, yaitu (a) keanggotaan sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa terbatas pada modal, (e) kemandirian, (f) pendidikan perkoperasian dan (g) kerjasama antar koperasi”

Dalam teori agen menjelaskan bahwa terdapat keterpisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*), sehingga manajemen atau dalam badan usaha koperasi, pengurus wajib mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan kepada anggota. Mandat tersebut dipertanggungjawabkan dalam forum rapat anggota atas pengelolaan koperasi. Pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan koperasi.

Atas dasar survey pendahuluan, diskusi dengan manajer akuntansi koperasi, akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan koperasi untuk pertanggungjawaban pengurus koperasi serta widyaiswara di UPTD Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur yang memberikan materi pendidikan dan pelatihan tentang Akuntansi Perkoperasian, bahwa untuk mengimplementasikan PASK dimaksud menghadapi kendala, yaitu kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran. Sehingga dalam penelitian ini variabelnya, yaitu akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran sebagai variabel independen.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pengurus/ manajemen kepada anggota melalui forum rapat anggota. Pertanggungjawaban pengurus yang akuntabel, bilamana laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK yang mengaturnya, sehingga berlaku sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kesulitan teknis, didefinisikan sebagai laporan perhitungan hasil usaha yang tidak memisahkan pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota, yaitu tidak adanya rekaman/catatan khususnya transaksi anggota yang seharusnya transaksi penjualan/pembelian kepada anggota wajib dipisahkan untuk memberikan informasi partisipasi anggota dan untuk memberikan informasi manfaat ekonomi anggota. Kesulitan pengukuran adalah hambatan untuk menentukan jumlah rupiah harga suatu produk/jasa/bunga yang membandingkan harga/bunga koperasi dengan harga/bunga diluar koperasi.

Penelitian ini menguji apakah akuntabilitas, kesulitan teknis, dan kesulitan pengukuran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998). Unit analisis dalam penelitian ini adalah manajer akuntansi dan keuangan pada koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2004 dan 2005 serta laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik pada koperasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis penelitian adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis multi regresi. Untuk memudahkan dalam menganalisa menggunakan program SPSS versi 10.

Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa akuntabilitas dan kesulitan teknis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Selanjutnya akuntabilitas dan kesulitan teknis secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PSAK No. 27. Untuk kesulitan pengukuran tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Model akhir dari penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 31,1 % terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998), artinya 68,9 % masih dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap implementasi PSAK No. 27, dimana ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha koperasi belum dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku bagi badan usaha koperasi yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana laporan promosi ekonomi anggota merupakan bentuk laporan yang dibuat untuk mengakomodasi tujuan dan prinsip-prinsip koperasi.

Kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Tidak dipisahkannya pendapatan dan beban atas dasar partisipasi anggota dan non anggota, akan menyulitkan dalam menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, sehingga hambatan teknis menjadi penyebab implementasi PSAK No. 27 dimaksud.

Dalam melakukan implementasi PSAK No. 27 terdapat persepsi yang berbeda baik diantara manajer akuntansi koperasi dan akuntan publik, dimana hal ini dapat ditunjukkan dari ragam opini audit, ada yang memandang bahwa informasi laporan promosi ekonomi anggota cukup material, sehingga auditor perlu mengungkapkan dalam opini auditnya, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*). Disamping itu ada yang memandang tidak cukup material, sehingga tidak perlu diungkapkan dalam opini audit, dengan pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified*)



Summary

Accountability Influence, Technical Difficulty and Measurement Difficulty Towards the Standard Statement of Financial Accounting Announcement Standard No. 27 (revised 1998) on Cooperation Accounting.

Sutarto

This research is formed by the background of the actual fact, based on the observation, as the cooperation board and public accountant less respond positively in implementing the financial accounting announcement standards (PSAK) number 27 (revised 1998) on accounting cooperation, which it is according to the financial cooperation audit report as the justification sources of cooperation board in board member annually meeting forum. Based on these audit report, it is clear that the cooperation board didn't applied PSAK No.27 (revised 1998). As for the report which is not compile and serve as PSAK intend to, are; (a) exertion income calculation report which doesn't separated output and burden as for the member and non member participations. Member's economic promotion report, so that the cooperation accountability not reveals the aim yet and the cooperation principals as ordered in the act number 25 1992 about co-operation on section number 3 and 5. Rule 3 stated that the co-operation purpose is to propose the wealthy of the members in particular and the society in general. Rule number 5 cooperation principals, there are (a) open voluntarily membership, (b) applying management democratically, (c) exertion income residue is fairly done as proportional as the amount of service efforts of each member, (d) services of extension is limited on the capital, (e) independencies, (f) cooperation education and (g) cooperated between cooperation's".

In the agent theory explains that there are separations between the owner (*principal*) and the management (*agent*), therefore the management or in the cooperation committee, the board account for responsible to the meeting forum member's as the cooperation management. Management justification of cooperation trade is applied in the form of cooperation financial report.

On the basis of the preface survey, discussion with the accountant cooperation manager, public accountant who do the audit on cooperation account report for the cooperation board justifications and also widyaiswara in UPTD training and education house, small and middle sector entrepreneur of East Java province which provide the educational material and training on the subject of cooperation accounting, thus, to implement the PSAK intention are dealing with obstacles, there are accountability, technical difficulty and measurement difficulty as independent variable. Accountability is definite as board or management justification to its member by the members meeting forum. Board justification are accountable, as if that financial report compiled and served with the PSAK as the arranger, therefore, it is apply as the accounting principal which make it applies generally. Technical difficulty definite as the calculation exertion output report which doesn't separated the income and burden to the member and non member participation, there is the non recorded or non noted especially for member

transaction which should be purchase or sale transaction to mandatory member is separated to provide the information about member participation and to provide it's member economic benefit. Measurement difficulty is an obstacle to define the quantity of prices in rupiah of a product/service/rate which compared cooperation with the price/rate outside cooperation.

This research is examining whether the accountability, technical difficulty, and measurement difficulty influenced simultaneously and partially toward the implementation of PSAK No.27 (revised 1998). The analysis unit in this research is accounting and financial manager in the cooperation which perform the annually member meeting book year 2004 and 2005 and also its financial report is audited by public accountant on primary and secondary cooperation pass by regency/city of East Java province. On the purpose of examining hypothesis research the existence of influence free variable toward bounded variable the analysis use is multi regression. In order to make simple analysis using the SPSS program version 10.

The research resulted information's that accountability, technical difficulty, and measurement difficulty influenced simultaneously and partially toward the implementation of PSAK No.27. Next, accountability and technical difficulty is partially influence significantly toward the implementation of PSAK No.27. For the measurement difficulty doesn't significantly influenced toward the implementation of PSAK No.27. This research model can only explain equal to 31, 1% toward the implementation of PSAK No.27 (revised 1998), it means that 69,8 is still influenced by other variables.

The accountability financial reports is influenced toward the implementation of PSAK No.27, it revealed that cooperation exertion hasn't do as the cooperation aim and principal that applies for the cooperation committee as ordered in the act No. 25 1992 on cooperation, which is economic promotion report member's is the report form that made in order to accommodate the aim and cooperation principal.

Technical difficulty significantly influenced toward the implementation of PSAK No.27. Non- separation of output and burden based to member and non member participation will complicate in compiling and served members economic promotion report, thus, the technical obstacle becomes the basis implementation of PSAK No.27 intention..

In doing the implementation PSAK No.27 there are different perceptions whether between the cooperation accounting manager and public accountant, which this perception can be revealed from the various audit opinion, there are some consider that information of members economic promotion report quite material, so that the auditor needs to reveal it in his audit opinion, there is proper assumption with the exception (*qualified*). Otherwise there are some consider that material only is not enough, so that there is no need to revealed in audit opinion, with proper assumption without any note (*unqualified*).

Abstract

Accountability Influence, Technical Difficulty and Measurement Difficulty Towards the Standard Statement of Financial Accounting Announcement Standard No. 27 (revised 1998) on Cooperation Accounting.

Sutarto

This research is formed by the background of the fact, based on the observation that the cooperation board and public accountant less responding in implementing the financial accounting announcement standards (PSAK) No. 27 (revised 1998) on accounting cooperation. It is based on the cooperation financial audit report as the justification sources of cooperation board in board member annually meeting forum. The reports which are not served as the PSAK are; (a) exertion income calculation report which doesn't separated the output and burden as for the member and non member participation, and (b) Members economic promotion report. On the basis of those report, consequently the cooperation accountability hasn't revealed the aim and cooperation principal as ordered in the act No. 25 1992 about cooperation on section number 3 and 5. Accountability is needed as account for the mandatory order, in the form of financial report.

This research is examining the influence of the accountability, technical difficulty and measurement difficulty toward the implementation of PSAK No.27 whether simultaneously nor partially. The analysis unit is manager (member) organization in accounting and financial division in the amount of 93 manager or personal in the cooperation that its financial report audited by the public accountant.

From the research result shows that simultaneously and partially accountability and technical difficulty is partially influencing significantly toward the implementation of PSAK No.27. The model of this research can only explain equal to 31, 1% toward the implementation of PSAK No.27 (revised 1998), it means that 69, 8 is still influenced by other variables.

The accountability of cooperation financial reporting isn't reveals cooperation arranges management according to the aim and cooperation principal as ordered in the act No. 25 1992 on cooperation. Member's economic promotion report is a report form that made to accommodate the aim and cooperation principal. Technical difficulty by separating output and burden on the basis of member and non member participation, make it more complicate in compiling and served member's economic promotion report.

Key word : Accountability, Technical Difficulty, Measurement Difficulty, Standard Statement of Financial Accounting Announcement Standard No. 27 (revised 1998) on Cooperation Accounting, Member's economic promotion report.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul depan	i
Sampul dalam	ii
Persyaratan gelar	iii
Persetujuan.....	iv
Penetapan panitia penguji	v
Ucapan terima kasih	vi
Ringkasan tesis	viii
Summary	xi
Abstract	xiii
Daftar isi	xiv
Daftar tabel	xx
Daftar gambar	xxii
Daftar lampiran	xxiii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan masalah	17
1.3. Tujuan penelitian	17
1.4. Manfaat penelitian	18
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Teori agen dan akuntabilitas	20
2.2. Karakteristik badan usaha koperasi.....	25
2.3. Penyajian laporan keuangan koperasi.....	30
2.3.1. Neraca.....	31
2.3.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha	31
2.3.3. Laporan Perubahan Ekuitas.....	34
2.3.4. Laporan Arus Kas.....	35
2.3.5. Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	37
2.3.5.1. Manfaat ekonomi dari pembelian	

	barang atau pengadaan jasa bersama	39
2.3.5.2.	Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama	39
2.3.5.3.	Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi	40
2.3.5.4	Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha	40
2.3.6.	Catatan atas laporan keuangan	40
2.4.	Tipe kondisi pendapat auditor independen	44
2.4.1.	Pendapat wajar tanpa catatan (<i>unqualified opinion</i>).....	45
2.4.2.	Pendapat wajar tanpa catatan dengan bahasa Penjelasan (<i>unqualified opinion with Explanatory language</i>).....	47
2.4.3.	Pendapat wajar dengan pengecualian (<i>qualified opinion</i>).....	49
2.4.4.	Pendapat tidak wajar (<i>adverse opinion</i>).....	51
2.4.5.	Pernyataan tidak menyatakan pendapat (<i>disclaimer opinion</i>).....	52
2.4.6	Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan dan kesimpulan auditor	53
2.5.	Penelitian terdahulu.....	54
2.5.1.	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	57
2.5.2.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.....	58
BAB. III.	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	59
3.1.	Kerangka konseptual.....	59
3.2.	Model penelitian	60
3.3.	Hipotesis penelitian	61

BAB. IV. MOTODE PENELITIAN	62
4.1. Identifikasi variabel.....	62
4.2. Definisi operasional.....	63
4.3. Instrumen penelitian dan pengumpulan data	68
4.3.1. Instrumen penelitian	68
4.3.2. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian	71
4.3.3. Pengumpulan data	72
4.4. Analisis	74
4.4.1. Uji klasik	74
4.4.2. Pengujian hipotesis	76
4.4.2.1. Pengolahan data perspektif	77
4.4.2.2. Penaksiran parameter regresi berganda.....	77
4.4.2.3. Pengujian nilai koefisien determinasi (R^2).....	77
4.4.2.4. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)..	78
4.4.2.5. Uji signifikansi individual/parsial (uji statistik t)	79
BAB. V. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	81
5.1. Data penelitian.....	81
5.1.1. Deskripsi karakteristik responden.....	85
5.2. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian	89
5.3. Analisis data dan hasil penelitian	93
5.3.1. Hasil pengujian asumsi klasik	94
5.3.1.1. Pengujian normalitas data	94
5.3.1.2. Pengujian autokorelasi	95
5.3.1.3. Pengujian heteroskedastisitas.....	96
5.3.1.4. Pengujian gejala multikolinieritas.....	97

5.3.2.	Hasil pengujian hipotesis.....	98
5.3.2.1.	Pengujian simultan variabel X1, X2 dan X3 menggunakan Statistik Uji F...	99
5.3.2.2.	Pengujian parsial/individual variabel menggunakan Uji Statistik t	101
BAB. VI.	PEMBAHASAN.....	104
6.1.	Pengujian hipotesis secara simultan variabel X1, X2 berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27.....	104
6.1.1.	Laporan Promosi Ekonomi Anggota tidak dibuat.....	104
6.4.2.	Laporan Promosi Ekonomi Anggota ; Akuntabilitas VS Kesulitan Teknis	106
6.2.	Pengujian hipotesis akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27.....	106
6.3.	Pengujian hipotesis kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27.....	109
6.4.	Pengujian hipotesis kesulitan pengukuran berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27.....	110
6.5.	Hasil wawancara masalah laporan promosi ekonomi Anggota.....	110
6.5.1.	Hasil wawancara dengan Edi Darmawan, Manajer Akuntansi Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Surabaya dan mantan auditor Koperasi Jasa Audit Soca Baskara Jatim	110
6.5.2.	Hasil wawancara dengan Markaban auditor KAP Widartoyo, MM. M.Si, Ak	111
BAB. VII.	SIMPULAN DAN SARAN.....	114
7.1.	Simpulan	114
7.2.	Saran	116

7.3. Saran untuk penelitian berikutnya	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. : Daftar KAP, opini dan komponen laporan keuangan.....	1
Tabel 1.2. : Rekapitulasi koperasi sekunder dan primer lintas Kabupaten/kota, pelaksanaan RAT Tahun Buku 2005 dan audit laporan keuangan koperasi	13
Tabel 2.1. : Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor	53
Tabel 2.2. : Laporan audit pada kondisi yang mengakibatkan penyimpangan	53
Tabel 5.1. : Daftar koperasi sebagai responden	81
Tabel 5.2. : Perolehan data penelitian	85
Tabel 5.3. : Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	86
Tabel 5.4. : Jumlah responden berdasarkan umur.....	86
Tabel 5.5. : Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	87
Tabel 5.6. : Jumlah responden berdasarkan jurusan pendidikan.....	87
Tabel 5.7. : Jumlah responden berdasarkan lama bekerja ditempat.....	88
Tabel 5.8. : Jumlah responden berdasarkan pekerjaan lain.....	88
Tabel 5.9. : Jumlah responden berdasarkan hubungan keluarga dengan Anggota pengurus dan pengawas	89
Tabel 5.10. : Daftar tenaga ahli mereview kuesioner penelitian.....	90
Tabel 5.11. : Validitas instrumen	92
Tabel 5.12. : Hasil pengujian reliabilitas	93

Tabel 5.13. :	Hasil pengujian multikolienaritas tahap 1	97
Tabel 5.14. :	Hasil pengujian multikolienaritas tahap 2.....	98
Tabel 5.15 :	Hasil pengujian regresi tahap 1	99
Tabel 5.16 :	Hasil pengujian regresi tahap 2	99
Tabel 5.17 :	Signifikasi nilai t tahap 1	101
Tabel 5.18 :	Signifikasi nilai t tahap 2	102



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	3.1. Kerangka konseptual penelitian	59
Gambar	3.2. Model penelitian–hubungan variabel	60
Gambar	5.1. Hasil pengujian normalitas data persamaan regresi tahap 1	94
Gambar	5.2. Hasil pengujian normalitas data persamaan regresi tahap 2	95
Gambar	5.3 Hasil pengujian heteroskedastisitas data persamaan regresi tahap 1 dan 2	96

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar kisi-kisi penelitian.....	123
Lampiran 2 : Daftar kuesioner	126
Lampiran 3a : Hasil pengujian validitas	141
Lampiran 3b : Hasil pengujian reliabilitas	145
Lampiran 4 : Regresi tahap 1.....	149
Lampiran 5 : Regresi tahap 2.....	155



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang ada, bahwa berdasarkan pengamatan, pengurus koperasi dan akuntan publik kurang merespon secara positif dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian. Data yang ada pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur melakukan pemantauan pada Koperasi Primer dan Sekunder lintas Kabupaten/Kota melalui laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada rapat anggota tahunan. Laporan pertanggungjawaban pengurus tersebut menyajikan laporan keuangan wajib disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum Indonesia untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan koperasi kepada anggotanya. Berikut ini fakta koperasi, nama Kantor Akuntan Publik, opini dan komponen laporan keuangan koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota, dan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Tabel 1.1. : Daftar koperasi, KAP, opini dan komponen laporan keuangan.

NO	NAMA KOPERASI	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1.	Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Malang.	Soebandi & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof. Dr. Soebandi, SE, Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta informasi tambahan : realisasi pendapatan dan beban dibandingkan RAPB

NO	NAMA KOPERASI	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
2.	Koperasi Simpan Pinjam Mesra, Surabaya.	Drs. Basri Harjosumarto. M.Si, Ak & Rekan <i>Qualified opinion</i> , Drs. Basri Harjosumarto.M.Si, Ak Dikecualikan penerapan PSAK 46 Akuntansi Pajak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, <i>laporan promosi ekonomi anggota</i>
3.	Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima (Kop. PPKL), Madiun.	KAP Sugeng & Hamzens <i>Unqualified opinion</i> Drs.SugengWirjaseputra MBA, Ak, M.Hum	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4.	Koperasi PT. Sucofindo, Surabaya.	Santoso & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Drs. Santoso, MM, Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
5.	Pusat Koperasi Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kodikal), Surabaya	Santoso & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Drs. Maruto, Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
6.	Koperasi Karyawan Sampoerna, Surabaya.	Drs. J. Tanzil & Rekan, <i>Qualified opinion</i> , Dra. Rita Susilowati, Ak <i>Dikecualikan tidak Mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
7	Koperlis Jawa Timur, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Qualified opinion</i> dikecualikan piutang macet.	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
8.	Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (Kanugoro) Jawa Timur, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
9.	Koperasi Simpan Pinjam Rasa Mandiri Jawa Timur, Malang.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
10.	Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Qualified opinion</i> Dikecualikan perlakuan akuntansi atas	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

NO	NAMA KOPERASI	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
		hubungan afiliasi dengan PT. Trimitra Medika Sejahtera	
11.	Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Malang.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
12.	Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung Jawa Timur, Pasuruan.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
13.	KUB Pergulaan Rosan Kencana Jawa Timur, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan Keuangan
14.	Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat Jawa Timur, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Disclaimer</i> , karena hanya kompilasi laporan keuangan	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
15	Koperasi Sumber Insan Mandiri, Surabaya.	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
16	Koperasi Bhakti Artha Swadana Jawa Timur, Surabaya.	KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof. H. Sutjipto Ngumar, Ph.D, Ak Dikecualikan belum menerapkan PSAK 24 mengenai Imbalan Pasca Kerja	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
17	Puskud Mina Jawa Timur, Surabaya.	Santoso & Rekan <i>Qualified opinion</i> Drs. Santoso, MM, Ak dikecualikan aktiva penyertaan berupa kapal dan pabrik es	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
18	Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita, Surabaya	Soebandi & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof.Dr.Soebandi,SE,Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
19	Koperasi Wanita Kartika Candra, Pasuruan	SugengSjahriar &Rekan <i>Qualified opinion</i> Drs.P. Ridaryanto, M.Si, Ak dikecualikan, belum	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

NO	NAMA KOPERASI	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
		menerapkan PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan, No. 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aktiva Kontijensi; No. 24 (Revisi) Akuntansi imbalan kerja, No. 27 (Revisi) Akuntansi Perkoperasian, tentang pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota.	
20	GKP-RI Jawa Timur, Surabaya	Santoso & Rekan <i>Unqualified</i> Drs. Santoso, MM. Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
21	KSP Tunas Artha Mandiri Propinsi Jawa Timur, Nganjuk	Suprihadi & Rekan <i>Unqualified</i> Drs. Suprihadi, Ak	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
22	KSP Delta Surya Purnama, Sidoarjo	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
23	KSP Lestari Mandiri, Malang	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
24	Koperasi Karyawan Mekar, Kediri	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
25	Koperasi Karyawan Makn Gotro, Sidoarjo	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
26	Koperasi Karyawan Sekar Karnia, Malang	Suprihadi & Rekan <i>Qualified</i> Drs. Suprihadi, Ak Dikecualikan belum menerapkan PSAK. 46, Akuntansi Pajak.	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
27	Koperasi SAE, Malang	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

NO	NAMA KOPERASI	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI	KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
28	KUD Dadi Jaya, Pasuruan	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
29	KUD Dau, Malang	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
30	KPTR Mitra Sejahtera, Kediri	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
31	Koperasi Muamalah Syari'ah "Istiqomah" Tulungagung	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>	Neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Sumber data : Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur, 2006

Atas dasar data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengurus/manajemen koperasi tidak atau belum melaksanakan PSAK tersebut dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Koperasi. Laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai PSAK tersebut adalah (a) laporan perhitungan hasil usaha yang memisahkan transaksi anggota dan bisnis dengan non anggotanya, dan (b) laporan promosi ekonomi anggota. Laporan promosi ekonomi anggota tersebut lebih bersifat analisis yang dilakukan oleh pemakai laporan, bukan pengurus sebagai penyaji laporan (Koperasi Jasa Audit Soca Baskara Jawa Timur, 2002).

Sehubungan dengan hal tersebut, merasa perlu melakukan penelitian ini untuk memahami permasalahan dilapangan atas implementasi PSAK dimaksud. Atas dasar survey pendahuluan penulis, diskusi dengan manajer akuntansi pada beberapa Koperasi yang akan menjadi subyek penelitian, akuntan publik yang telah melakukan audit koperasi serta diskusi dengan para pelatih/widyaiswara yang memberikan materi akuntansi perkoperasian di UPTD Balai Diklat Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, maka hambatan-hambatan implementasi PSAK dimaksud, antara lain : (a) akuntabilitas, (b) kesulitan teknis dan (c) kesulitan pengukuran.

Berikut ini yang dimaksud dengan : a) Akuntabilitas dalam kaitan ini mendefinisikan, bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawaban tentang mandat yang dipercayakan. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan koperasi dilakukan pengurus/manajemen kepada anggota melalui forum rapat anggota, dimana dalam forum tersebut mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan koperasi melalui laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. (b) Kesulitan teknis, yaitu dalam memisahkan transaksi anggota dengan non anggota, dimana dalam penyajian laporan perhitungan hasil usaha wajib menyajikan partisipasi anggota dan pendapatan dari non anggota. Dalam paragraf 33 menyatakan : "sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan usaha koperasi". (c) Kesulitan pengukuran, adalah (Suwarjono, 2005, 192) "penentuan besarnya unit pengukur (jumlah rupiah) yang akan dilekatkan pada suatu obyek (elemen atau pos) yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasikan makna atau atribut obyek tersebut"

Dalam kaitan pengukuran, bahwa dalam menyajikan laporan promosi ekonomi anggota harus dapat menentukan perbandingan harga koperasi dengan pihak luar (non koperasi) disekitarnya, dimana untuk membandingkan harga

diluar tersebut selalu fluktuatif yang menyulitkan pengurus, dan transaksi tersebut tidak terjadi dalam entitas koperasi. Paragraf 80 menyatakan : "manfaat ekonomi anggota dapat mencakup : manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi dan manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha"

Karakteristik tersebut diatas yang tidak ada pada badan usaha non koperasi, karena tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota, dimana anggota dipandang sebagai pemilik dan pengguna koperasi (*user own oriented firm*). Disamping itu dalam berbisnis koperasi juga melakukan transaksi dengan masyarakat luas yang bukan anggota.

Untuk itu, perlu memahami identitas dan jatidiri koperasi. Koperasi didirikan oleh sekelompok individu (Koperasi primer) dan sekelompok badan hukum koperasi (koperasi sekunder). Koperasi sebagai badan hukum merupakan entitas ekonomi yang mengelola sumberdaya ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.

"Tujuan koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 3 bahwa tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945"

Selanjutnya, pada pasal 4 bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah :

"(a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (b) berperan serta secara aktif dalam upaya

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (c) memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, dan (d) berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”

Sedangkan tujuan pokok koperasi sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian pada paragraf 03 huruf d bahwa ”tujuan pokok badan usaha koperasi menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*)”

Koperasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi berpegang pada prinsip-prinsip Perkoperasian sebagaimana tercatum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 5 menyatakan koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut

”(a) keanggotaan sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa terbatas pada modal, (e) kemandirian, (f) pendidikan perkoperasian dan (g) kerjasama antar koperasi”

Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar kerja dalam organisasi koperasi yang membedakan badan usaha Koperasi dengan badan usaha non Koperasi. Lebih lanjut dinyatakan dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 02 menyatakan ”prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat”

Karakteristik yang membedakan usaha koperasi dengan badan usaha lain, bahwa anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga anggota koperasi mempunyai identitas ganda (*dual identity of the member*).

Sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, koperasi dijalankan melalui perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Pengurus diberikan mandat oleh anggota untuk mengelola koperasi yang mana pengurus berperan sebagai eksekutif untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan oleh rapat anggota dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan usaha koperasi tersebut setelah tutup tahun buku melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengawas koperasi diberikan mandat oleh anggota untuk mengawasi jalannya koperasi dengan melakukan pemeriksaan atas catatan organisasi dan usaha yang diselenggarakan oleh pengurus. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 30 ayat 1 huruf d menyatakan "pengurus bertugas mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sedangkan pada huruf e pengurus bertugas menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib"

Laporan pengelolaan usaha koperasi mencakup laporan organisasi dan usaha. Laporan usaha mencerminkan kinerja usaha yang dilakukan oleh pengurus melalui laporan keuangan tahunan. Dalam pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan, agar laporan tersebut mencerminkan tidak salah saji material dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dapat menggunakan

jasa akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan sebagai bagian laporan pertanggungjawaban pengurus pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

”koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, sedangkan dalam penjelasan pada pasal 40 tersebut, bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Permintaan audit atas laporan keuangan koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi dan tidak menutup kemungkinan permintaan audit atas laporan keuangan koperasi oleh pengawas”

Laporan keuangan sebagai bagian laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi, point C huruf e menyatakan ”dalam mengelola administrasi usaha koperasi, pengurus menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku”.

Dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 74, ”laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan”

Sedangkan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian

Laporan Keuangan paragraf 6 menyatakan bahwa ”manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, selanjutnya pada paragraf 7 menyatakan laporan keuangan yang lengkap terdiri

dari komponen-komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”.

Dalam kaitan tersebut, maka praktek penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan PSAK yang mengatur tentang akuntansi Perkoperasian sesuai karakteristik badan usaha koperasi. Selanjutnya sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 09 bahwa :

”koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan kedalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran, dimana jenis koperasi tersebut akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan koperasi dengan menampakkan kekhususannya”

Penyajian laporan keuangan dengan menampakkan kekhususan dapat diatur dalam pedoman akuntansi dengan mengacu PSAK tersebut.

Dalam penyajian laporan keuangan Koperasi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mengatur penyajian laporan keuangan Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam melalui Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bab VI angka 2 huruf b yang menyatakan ”laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam meliputi unsur-unsur neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha, serta perubahan kekayaan bersih”

Untuk itu menurut Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri bahwa laporan keuangan koperasi simpan pinjam meliputi : neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian serta Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tersebut diatas, maka laporan keuangan entitas badan usaha koperasi secara lengkap disajikan oleh Pengurus Koperasi dan laporan keuangan auditan dari akuntan publik seharusnya meliputi : (a) neraca, (b) laporan perhitungan hasil usaha, (c) laporan arus kas, (d) laporan perubahan ekuitas, (e) laporan promosi ekonomi anggota dan (f) catatan atas laporan keuangan.

Sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus beberapa koperasi yang menyampaikan laporannya serta sesuai dengan pengamatan dan data-data yang ada pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur bahwa belum semua koperasi menyajikan laporan keuangannya sesuai PSAK No, 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, khususnya laporan promosi ekonomi anggota sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini. Laporan keuangan Koperasi sebagai bagian laporan pertanggungjawaban pengurus, bahwa beberapa Koperasi juga telah disertai laporan keuangan auditan dengan opini wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*).

Sebagaimana data tabel pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2005 (tabel 1.2) dari jumlah koperasi lintas kabupaten/kota sebanyak 254 yang

telah melakukan rapat anggota tahunan sebagai media pertanggungjawaban pengurus sebanyak 55 koperasi atau 21,65 %, sedangkan menyajikan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebanyak 55 koperasi atau (100 %) dari jumlah koperasi melakukan rapat anggota tahunan menyajikan laporan keuangan sebagai komponen wajib laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan promosi ekonomi anggota wajib disajikan sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) hanya 1 koperasi atau (1,8 %) dari jumlah koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan. Laporan perubahan ekuitas sebagai laporan tidak wajib menurut PSAK No. 27 (Revisi 1998) sebanyak 42 koperasi atau (76,35 %) dari jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum semua koperasi menyajikan laporan keuangan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk akuntansi perkoperasian.

Tabel 1.2: Rekapitulasi Koperasi Sekunder dan Primer Lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan RAT Tahun Buku 2005 dan audit laporan keuangan

Jenis Koperasi	Jml Kop	Rat Tb. 05	Ne rac a	P H U	L P E	L A K	L P E A	C T T	A U D It	Un Q	Q	Dis clai m Er
Kop. Sekunder	64	14	14	14	14	14	0	14	9	6	2	1
Kop. Primer	190	41	41	41	38	41	1	41	22	15	7	0
JML	254	55	55	55	42	55	1	55	31	21	9	1

Sumber data : Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur, 2006

Keterangan

JMLKOP	Jumlah koperasi
RAT TB. 05	Rapat Anggot Tahunan Tahun Buku 2005
NERACA	Neraca Koperasi
PHU	Perhitungan Hasil Usaha
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LAK	Laporan Arus Kas
LPEA	Laporan Promosi Ekonomi Anggota
CTT	Catatan atas laporan keuangan
AUDIT	Telah dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik
UNQ	<i>Unqualified/Wajar Tanpa Pengecualian</i>
Q	<i>Qualified/Wajar dengan Pengecualian</i>
DISCLAIMER	Tidak berpendapat

Lebih lanjut, dari 55 koperasi telah melakukan rapat anggota tahunan, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik sebanyak 31 Koperasi atau (55,35%) dari jumlah koperasi melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2005, sedangkan pendapat (opini) akuntan publik dari 31 koperasi, menyatakan pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*) sebanyak 21 koperasi atau (67,74 %), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) sebanyak 9 koperasi atau (29,03 %) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) sebanyak 1 koperasi atau (3,22 %) dari jumlah koperasi yang melakukan audit laporan keuangan. Data masing-masing koperasi sebagaimana lampiran 1 dan 2.

Sesuai dengan tabel 1.2, maka dapat disimpulkan bahwa auditor memberikan pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*), namun laporan keuangan auditan belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang Akuntansi Perkoperasian, sehingga belum sesuai prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut tidak selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Apabila auditor memberikan pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*) semestinya laporan keuangan auditan sesuai dengan PSAK No 1 (Revisi 1998) tentang

Penyajian Laporan dan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/IX/1998 tanggal 17 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam

Sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 60 ayat 2 (dua) menyatakan "pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan usaha koperasi". Dengan demikian dalam pemberdayaan koperasi pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas koperasi sebagai badan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, dimana hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mendorong penerapan PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian serta Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/IX/1998 yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam, sehingga sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

Atas dasar tabel tersebut diatas, seharusnya auditor memberikan pendapatan wajar dengan catatan (*qualified opinion*), dengan mengecualikan bahwa koperasi yang bersangkutan tidak mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota, sebagaimana opini audit laporan keuangan Koperasi Karyawan Sampoerna-Surabaya (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Karyawan Sampoerna tahun buku 2005, 2006)

Laporan keuangan entitas badan usaha koperasi yang lengkap seharusnya meliputi komponen-komponen sebagai berikut : (a) neraca, (b) laporan perhitungan hasil usaha, (c) laporan arus kas, (d) laporan perubahan ekuitas, (e) laporan promosi ekonomi anggota dan (f) catatan atas laporan keuangan. Namun sesuai data yang ada pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur bagi Koperasi yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus yang memuat laporan keuangan koperasi atau laporan keuangan auditan sebagai bagian laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir tahun buku belum disajikan sesuai dengan PSAK No. 27. (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian. Adapun Laporan yang belum disajikan oleh pengurus dan auditor adalah : (a) laporan promosi ekonomi anggota yang diatur dalam paragraf 74 PSAK No. 27 dan (b) laporan perhitungan hasil usaha yang belum memisahkan hasil usaha dari anggota dan non anggota sebagaimana diatur dalam paragraf 76 yang berbunyi "perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota"

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang wajib disajikan oleh pengurus koperasi dan oleh akuntan publik pada laporan keuangan auditan, dimana laporan tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Manfaat ekonomi tersebut berguna untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan terutama anggotanya tentang kontribusi koperasi kepada anggota dalam memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, dimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang menyatakan bahwa secara umum tujuan koperasi adalah

menciptakan kesejahteraan kepada anggotanya. Kesejahteraan yang diperoleh anggota koperasi atas lembaga koperasinya tidak hanya diperoleh/diukur dari sisa hasil usahanya saja, namun juga manfaat dari pelayanan yang diberikan atas usaha yang diciptakan koperasi, misalnya pada usaha waserda koperasi memberikan harga suatu barang ternyata harganya lebih rendah dari harga toko sekitarnya, sehingga koperasi memberikan manfaat ekonomi atas selisih harga tersebut. Laporan promosi ekonomi anggota bilamana dapat disajikan akan dapat memberikan informasi peran dan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dimana ini sesuai dengan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkoperasian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Perkoperasian baik bagi praktisi koperasi, pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai komitmen dalam pemberdayaan koperasi serta bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi praktisi koperasi, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam implementasi PSAK No. 27 yang mewajibkan bahwa entitas koperasi menyajikan keuangan laporan promosi ekonomi anggota dan perhitungan hasil usaha yang memisahkan hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non anggota, disamping komponen laporan keuangan yang lainnya, dimana hal diatas merupakan karakteristik badan usaha Koperasi yang membedakan badan usaha lainnya.
2. Bagi pemerintah, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam mengembangkan koperasi di Indonesia baik dari segi organisasi dan usaha serta perlindungan. Dengan standar akuntansi keuangan yang ada dan dapat diimplementasikan pemerintah dapat menilai *performance* koperasi.
3. Bagi profesi akuntansi, profesi akuntansi baik akuntan pendidik maupun akuntan publik serta Dewan Penyusun Standar, dengan penelitian ini diharapkan dapat melakukan kaji ulang maupun penerbitan bulletin tentang Implementasi Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Perkoperasian.

4. Bagi peneliti, untuk dapat meningkatkan pemahaman standar akuntansi keuangan khususnya penyajian laporan keuangan koperasi dan hambatannya dalam implementasi PSAK tersebut.



BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori agen dan akuntabilitas

Dalam teori agen menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principles*) dengan manajemen (*agent*), yang mana pemilik perusahaan memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada manajemen untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam kondisi ini maka terdapat pemisahan antara pemilik dan manajemen. Akuntabilitas diperlukan untuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemilik.

Chandler and Plano (dalam Widodo ; 2000 ; 26) mengartikan :

“akuntabilitas (*accountability*) sebagai “*refers to the institution of cheks and balances in an administrative system*”. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*cheks and balances*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas dapat diartikan menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya ekonomi yang dikelola atau dalam lingkup kewenangannya yang digunakan”

The Oxford Advance Learner's Dictionary” sebagaimana dikutip oleh:

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (dalam Widodo : 2000 : 27) akuntabilitas diartikan sebagai :

“*required or expected to give an explantion for one's action*”.

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan”

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan yang telah dilakukan kepada pihak memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.

Lembaga Administrasi Negara (dalam Widodo ; 2000; 154)

membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

”(a) Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. (b) Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah. (c) Akuntabilitas prosedural, yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan”

Tantuico Carino (dalam Widodo ; 2000 ; 156) mengemukakan :

akuntabilitas manajerial (*manajerial accountability*) berkaitan dengan “*effisiensi and economy in the use of public funds, property, man power and other resources*”. Dengan demikian menekankan adalah pada efisiensi dan ekonomi dari penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja dan sumber daya lainnya”

Akuntabilitas manajerial menghendaki adanya manajemen yang harus bertanggung jawab jangan hanya sekedar mamatuhi pada aturan yang berlaku. Akuntabilitas manajerial memberikan perhatian pada sisi input, dimana input tersebut agar dikelola secara efisien dan tidak terjadi pemborosan.

Akuntabilitas (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 2003 ; 5) diartikan sebagai :

”kemampuan mempertanggung jawabkan atas tugas-tugas yang telah dijalankan terhadap pihak-pihak yang seharusnya atau patut menerima pertanggungjawaban. Dengan arti akuntabilitas adalah

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang telah didelegasikan kepada yang berhak.”

Akuntabilitas (Sahid ; 2002 tanpa halaman), bahwa ”seseorang yang atau badan hukum yang dilimpahi wewenang mengelola sumber daya tertentu wajib menyampaikan laporan mengenai baik atau tidaknya pengelolaan yang dilakukan” Laporan itu dinamakan laporan akuntabilitas. Makna akuntabilitas, bahwa akuntabilitas tidak lain adalah kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sarana penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa wewenang hendaknya diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

Akuntabilitas Koperasi (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 2004; 4) adalah ”suatu sistem pengawasan yang efektif dalam organisasi Koperasi, sehingga dapat mencerminkan pengelolaan Koperasi yang transparan dan bertanggung jawab”

Prinsip *accountability* (Tunggal dan Tunggal ; 2002 ; 72) menyatakan bahwa ”korporasi adalah agen ekonomi yang selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (perpajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja/K3, standar penggajian dan persaingan usaha yang sehat”

Akuntabilitas (Widartoyo ; 2003), yaitu ”menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan pengurus dan anggota, sebagaimana diawasi oleh pengawas, dimana

implementasi akuntabilitas anggota koperasi melalui laporan keuangan diterapkan melalui kebijakan dan praktek”

Kebijakan koperasi untuk menjalankan akuntabilitas, antara lain : (a) penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu, koperasi primer paling lambat 3 bulan dan sekunder 6 bulan setelah tutup tahun buku, (b) memberitahukan kepada anggota tentang jadwal RAT dalam waktu yang cukup, (c) mendorong kepada anggota untuk menghadiri RAT dan memberikan hak suara ketika RAT berlangsung, (d) melibatkan anggota, ketika koperasi melakukan keputusan-keputusan strategis melalui rapat anggota luar biasa (RALB), misalnya ketika akan melakukan pinjaman bank dalam jumlah besar, investasi tanah dan bangunan, kerjasama dengan pihak eksternal, (e) penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), (f) penyediaan informasi non keuangan yang dapat diakses atau diketahui oleh anggota, (g) memberikan kesempatan yang cukup kepada anggota untuk membaca laporan keuangan dan laporan lainnya dalam rangka memberikan kontribusi yang cukup dalam hak suaranya di RAT, (h) anggota diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan hak suaranya ketika RAT, (i) koperasi telah mempunyai Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga (AD/ART) diantaranya mengatur rinci hak-hak anggota, (j) koperasi telah mempunyai pedoman operasional baku (POB) yang menjabarkan AD/ART yang didalamnya mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pelaksanaannya, (k) koperasi mempunyai pedoman etik dan tingkahlaku secara tertulis tentang bagaimana seharusnya etika dan tingkahlaku personil dalam bekerja

Praktek koperasi menjalankan akuntabilitas adalah : (a) pengurus mengadakan rapat teratur dengan pengawas, dimana setiap rapat dibuatkan berita acara dan diagendakan, (b) jumlah dan kompetensi anggota pengurus, pengawas dan karyawan yang memadai, (c) adanya usaha untuk menghadapi benturan kepentingan antara koperasi dengan pengurus, pengawas dan karyawan, (d) mempunyai auditor intern dan ekstern yang jumlahnya cukup, serta auditor memberikan rekomendasi yang berkualitas kepada pengurus dan pengawas, (e) pengawas secara teratur memberikan masukan kepada pengurus, (f) koperasi mempunyai visi, misi, rencana strategi yang menjadi tanggungjawab pengurus untuk melakukannya, (g) membuat materi rapat anggota secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pengertian tentang akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang patut diberikan laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada badan usaha koperasi, pertanggungjawaban dilakukan dari pihak pengurus/manajemen kepada pihak anggota selaku pemilik koperasi, dimana pertanggungjawaban ini dilakukan dalam forum rapat anggota sebagai forum tertinggi pada badan usaha koperasi. Rapat anggota yang lazim digunakan sebagai media pertanggungjawaban keuangan adalah Rapat Anggota Tahunan. Dalam rapat anggota tersebut pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi, dimana pengelolaan sumber daya ekonomi tersebut diwujudkan dalam laporan keuangan Koperasi.

2.2. Karakteristik badan usaha koperasi

Mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, menyatakan karakteristik badan usaha koperasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". Selanjutnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 1, disebutkan bahwa :

"koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional"

Dengan pengertian dimaksud dapat disimpulkan bahwa, koperasi merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha koperasi memisahkan secara jelas antara kekayaan, hutang dan modal yang dimiliki perusahaan koperasi dengan kekayaan dan hutang yang dimiliki oleh para pemilik perusahaan. Koperasi sebagai badan usaha berdiri sendiri dan disahkan sebagai badan hukum. Sebagai badan usaha koperasi merupakan institusi yang berdiri sendiri dan oleh karena itu memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, sehingga apabila koperasi pailit atau dibubarkan dan atau dilikuidasi, maka anggota koperasi selaku pemilik

koperasi terbatas pada kekayaan yang telah diikutsertakan ke dalam koperasi yang menentukan kepemilikan anggota terhadap koperasi.

Selanjutnya dalam menjalankan organisasi dan usaha berpegang pada prinsip-prinsip koperasi, dimana prinsip tersebut merupakan landasan pokok operasional koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha gerakan ekonomi rakyat. Prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 5. Prinsip tersebut merupakan esensi dasar yang membedakan badan usaha koperasi dengan badan usaha yang lain.

Lebih lanjut, karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah, bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) paragraf 6 :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang tergabung atas sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menjunjung kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of member's welfare*).

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan usahanya. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha pada Koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada koperasi.

Koperasi terbagi dalam koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-seseorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 6 ayat 1 menyatakan "koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi sekunder sesuai pasal 6 ayat 2 dibentuk 3 (tiga) koperasi"

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan lainnya. Sebagaimana badan usaha

koperasi berusaha dalam ekonomi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 ayat 1, menyatakan "usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha kesejahteraan anggota" dan penjelasannya bahwa :

"usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahterannya, untuk itu maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, yang mana koperasi harus mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha"

Selanjutnya pada ayat 2, menyatakan bahwa :

"kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dan penjelasannya kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk anggotanya, dimana dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam memperbesar skala usahanya"

Sedangkan pada ayat 3 menyatakan "koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat"

Dengan demikian kegiatan usaha koperasi berhubungan dengan keterkaitan dan kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha sektor industri sebagaimana usaha industri pada umumnya, maka dalam hubungan ini terdapat hubungan bisnis antara koperasi dengan anggota koperasi dan hubungan bisnis koperasi dengan non anggotanya. Perlakuan akuntansi dalam

sektor tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap industri tersebut

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya serta usaha utama koperasi. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 16 Koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik pada koperasi primer maupun koperasi sekunder pada prinsipnya adalah sama, dengan demikian tidak terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam koperasi.

Sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, koperasi digolongkan empat jenis dalam paragraf 19, 20, 21 dan 22, yaitu :

- (1) Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
- (2) Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama,
- (3) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya, dan
- (4) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama”

2.3. Penyajian laporan keuangan koperasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam paragraf No. 7, bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen, antara lain : ”(a) neraca, (b) laporan laba-rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, dan (e) catatan atas laporan keuangan”

Sedangkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 74, bahwa laporan keuangan koperasi meliputi : ”(a) neraca, (b) perhitungan hasil usaha, (c) laporan arus kas, (d) laporan promosi ekonomi anggota, dan (e) catatan atas laporan keuangan”

Dengan demikian sesuai PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, bahwa terdapat perbedaan, yaitu sesuai dengan PSAK tersebut entitas koperasi diwajibkan membuat laporan promosi ekonomi anggota, sedangkan laporan perubahan ekuitas tidak diwajibkan. Lebih lanjut sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan, bahwa laporan perubahan ekuitas diwajibkan dalam entitas tanpa memandang entitas bisnis perusahaan non koperasi dan perusahaan koperasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam pedoman umum implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian yang diterbitkan oleh (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dan Tim Ahli IKOPIN; 2001; 78),

bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari dua kelompok, yaitu (1) kelompok laporan utama dan (2) kelompok laporan tambahan, yaitu :

- (1) Laporan keuangan utama terdiri dari : (a) neraca, (b) laporan perhitungan hasil usaha, (c) laporan arus kas (3) laporan promosi ekonomi anggota, dan (e) catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan tambahan, diantaranya adalah (a) laporan perubahan ekuitas, (b) laporan pembagian/distribusi sisa hasil usaha, (c) laporan-laporan lain yang penggunaan relatif spesifik untuk pihak tertentu mempunyai keterkaitan langsung dengan koperasi.

Mendasari hal diatas, maka laporan keuangan entitas koperasi yang lengkap seharusnya meliputi (a) neraca, (b) laporan perhitungan hasil usaha, untuk perusahaan non koperasi disebut laporan perhitungan laba-rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) laporan promosi ekonomi anggota dan (f) catatan atas laporan keuangan.

2.3.1. Neraca

Neraca menyajikan tiga elemen laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Ekuitas badan usaha koperasi, antara lain terdiri dari : modal anggota, yaitu simpanan pokok dan wajib, modal penyertaan, modal penyertaan, modal sumbangan/donasi, cadangan dan sisa hasil usaha.

2.3.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Laporan perhitungan hasil usaha atau dalam badan usaha non koperasi disebut laporan laba-rugi, dimana laporan ini merupakan laporan kinerja suatu

entitas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang terdiri dari pendapatan dan beban-beban, serta laba yang diperoleh.

Sebagaimana *Accounting Principle Boards (APB) Statement No 4* paragraf 12 menyatakan : (Dukat ; 1987; 8)

“laporan laba rugi suatu periode menunjukkan pendapatan, biaya, laba, rugi dan penghasilan netto (kerugian netto) yang diakui selama periode dan oleh karena memberikan suatu indikasi mengenai kesesuaian hasil aktivitas yang menjurus kearah perolehan laba suatu perusahaan selama periode dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima”

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 56 menyatakan :

“laporan laba-rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar”. Laporan laba rugi minimal mencakup (a) pendapatan, (b) laba rugi usaha (c) beban pinjaman, (d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas, (e) beban pajak, (f) laba rugi aktivitas normal perusahaan, (g) pos luar biasa, (h) hak minoritas dan (i) laba rugi bersih untuk periode berjalan. Selanjutnya PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian tidak mengatur secara jelas unsur kinerja keuangan yang harus disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha”

Dengan mempedomani PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, maka informasi kinerja keuangan yang disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha harus menggambarkan pendapatan dan beban yang berhubungan dengan anggota dan non anggota.

Pendapatan operasi dalam badan usaha terjadi dalam hal, yaitu pendapatan yang berhubungan dengan anggota dan non anggota, dimana sesuai

dengan paragraf 67 menyatakan "pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto". Partisipasi bruto sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 29 adalah "kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto"

Selanjutnya dalam paragraf 69 menyatakan "pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi"

Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Dalam perhitungan hasil usaha koperasi pendapatan dibedakan, pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota. Pendapatan dari anggota diakui sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan dari non anggota merupakan penjualan atas barang dan jasa yang dilakukan kepada anggota diakui sebagai penjualan.

Dengan demikian pendapatan operasi koperasi dibedakan menjadi dua, transaksi yang timbul dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto, yaitu harga pelayanan yang diberikan kepada anggota, sebelum dikurangi beban pokok pelayanan kepada anggota. Transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan/penjualan, kedua jenis transaksi harus dilaporkan secara terpisah.

Dalam badan usaha koperasi terdapat beban perkoperasian sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 32,

menyatakan adanya beban perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh koperasi untuk pendidikan anggota dan kegiatan-kegiatan perkoperasian lainnya, antara lain beban pendidikan anggota, beban pengembangan ekonomi anggota, beban acara-acara perkoperasian atau gerakan koperasi secara umum (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI; 2002; 25).

2.3.3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan-perubahan ekuitas dalam satu siklus normal operasi. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan laba atau rugi tahun berjalan, pengaruh kumulatif dari kebijakan akuntansi, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, dan saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI; 2003; 113). Selanjutnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian pada paragraf 74 bahwa koperasi tidak wajib menyusun dan menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan koperasi. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 66, menyatakan perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan

keuangan, sehingga koperasi seharusnya juga menyusun dan menyajikan laporan perubahan ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas sesuai dengan paragraf 66 tersebut diatas menunjukkan : (a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, (c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, (d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, (e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.

Dengan demikian laporan perubahan ekuitas badan usaha koperasi menyajikan informasi setiap pos ekuitas pada awal tahun, penambahan dan pengurangan modal anggota, penambahan dan pengurangan modal penyertaan, penambahan dan pengurangan modal donasi, penambahan dan pengurangan cadangan, penambahan dari sisa hasil usaha tahun berjalan, dan pembagian sisa hasil usaha serta pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi.

2.3.4. Laporan arus kas

Dalam PSK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, pada paragraf 74, menyebutkan secara jelas bahwa laporan keuangan koperasi meliputi antara lain laporan arus kas. Dalam PSAK tersebut tidak mengatur penyusunan dan penyajian laporan arus kas badan usaha koperasi. Dengan demikian karena penyusunan dan penyajian laporan arus kas tidak diatur secara khusus melalui

PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, maka penyusunan dan penyajian laporan arus kas mengacu pada PSAK No. 2 (1994) tentang Laporan arus kas.

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi sumber dan penggunaan kas selama satu siklus normal operasi atau satu periode pembukuan. Kas yang dimaksud disini tidak terbatas pada kas dalam artian umum, tetapi mencakup aktiva-aktiva yang setara dengan kas, yang segera dapat dicairkan menjadi kas, seperti surat-surat berharga jangka pendek dan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari tiga bulan atau tidak dijadikan jaminan kredit. Laporan arus kas berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas atau setara dengan kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Informasi arus kas juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja berbagai perusahaan karena meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi yang sama. Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung, yakni dari data penerimaan dan pengeluaran kas, dan dapat pula disusun secara tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, laporan arus kas disusun dengan menggunakan dua periode laporan keuangan yang berurutan ((Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI; 2003; 115)

Sebagaimana PSAK No. 2 (1994) tentang Laporan Arus Kas paragraf 9 bahwa laporan arus kas, sumber dan penggunaan kas dikelompokkan atas tiga

bagian. Pertama kas yang bersumber dari aktivitas operasi, kedua kas yang bersumber dari aktivitas investasi dan ketiga kas yang bersumber dari aktivitas pendanaan.

2.3.5. Laporan promosi ekonomi anggota

Sebagaimana sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 80 menyatakan bahwa "laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu"

Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu : (a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan bersama, (b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, (c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi dan (d) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Laporan promosi ekonomi anggota ini diwajibkan menurut PSAK tersebut, dimana hal ini sesuai dengan paragraf 74 yang menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi meliputi antara lain laporan promosi ekonomi anggota. Sedang untuk badan usaha non koperasi tidak diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7 tidak menyebutkan laporan dimaksud. Laporan promosi ekonomi anggota ini untuk mengetahui manfaat ekonomi yang dinikmati anggota dengan adanya mereka menjadi anggota koperasi. Dalam paragraf 34, menyatakan promosi ekonomi anggotanya adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggota dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.

Lebih lanjut dalam paragraf 81 menyatakan "manfaat ekonomi tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggotanya dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan". Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 16 menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya dan dalam penjelasannya menyatakan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Sedangkan sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian mengelompokkan jenis koperasi kedalam Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran. Paragraf 19 menyatakan Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Paragraf 20 menyatakan Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Paragraf 21 menyatakan Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan

dan peminjaman untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

2.3.5.1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.

Merupakan selisih lebih harga pasar diatas harga yang dibebankan kepada anggota oleh koperasi atas barang dan jasa yang diperoleh anggota melalui koperasi. Misalnya anggota koperasi memperoleh satu jenis barang dari koperasi dengan harga Rp. 1.000 per unit, sementara harga pasarnya adalah Rp. 1.050 per unit, maka selisih Rp. 50,- per unit tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui koperasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2002; 26)

2.3.5.2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.

Merupakan selisih lebih harga yang diterima anggota bilamana produknya dipasarkan melalui Koperasi dibanding kepada pihak lain. Misalnya bilamana produk anggota dijual ke pihak lain, dihargai sebesar Rp. 5.000,- per unit, sementara melalui Koperasi Rp. 5.100,- per unit, maka selisih sebesar Rp. 100 tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota dari pemasaran barang melalui koperasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 2002; 26)

2.3.5.3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.

Terjadi bila suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pinjaman bank. Sebaliknya jika anggota menyimpan dan menabung di Koperasi, manfaat ekonomi akan diperoleh jika tingkat suku bunga simpanan atau tabungan pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang sederajat dengan koperasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 2002; 27)

2.3.5.4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Koperasi mendasarkan kegiatan usahanya untuk melayani para anggotanya. Para anggota secara sukarela melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya dengan koperasi. Hasil usaha koperasi, nantinya akan menghasilkan yang namanya sisa hasil usaha (SHU). SHU dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai laba koperasi. Penggunaan SHU akan didistribusikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi. Dalam AD/ART tersebut, salah satu bagian dana SHU dibagikan kepada anggota. Pembagiannya di dasarkan pada 2 aspek yaitu jasa usaha dan jasa modal. Waktu pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2.3.6. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan atau penjelasan atas informasi yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Informasi ini akan menjadikan laporan

keuangan lebih informatif, sehingga dapat digunakan oleh para pemakai dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan didalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
2. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang jujur. Penyajian catatan atas laporan keuangan dapat data kuantitatif atau penjelasan dalam bentuk naratif dari akun-akun dineraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan ini mencakup pengungkapan yang diharuskan oleh PSAK atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh badan-badan tertentu, seperti pemerintah, yang merupakan pengungkapan wajib, dan pengungkapan sukarela oleh manajemen dalam rangka penyajian yang jujur dan transparan, sehingga menjadikan laporan keuangan lebih informatif.

Selanjutnya, sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, paragraf 83, menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan koperasi pengungkapan memuat :

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :
 - a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi lain, antara lain :
 - a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
 - b Aktiva koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan pencapaian lapangan usaha baru untuk anggota.
3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
4. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota
5. Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.

8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
10. Penyelenggaran rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Dengan memperhatikan karakteristik koperasi dan perlakuan akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat melakukan bisnis dari berbagai sektor, sehingga perlakuan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi pada dalam sektor industri yang bersangkutan. Karakteristik lain yang membedakan badan usaha koperasi dengan non koperasi, adalah koperasi wajib membuat laporan promosi ekonomi anggota, dimana laporan promosi ekonomi anggota ini menggambarkan hubungan antara koperasi dengan anggota. Hubungan transaksi antara koperasi dengan anggota merupakan hubungan pelayanan, sehingga akan terjadi kelebihan atau kekurangan pelayanan, sedangkan hubungan transaksi dengan non anggota, sehingga akan terjadi laba atau rugi kotor.

Dengan demikian laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus seharusnya, mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PASK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, meliputi : (a) neraca, (b) laporan perhitungan hasil usaha, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) laporan promosi ekonomi anggota dan (f) catatan atas laporan keuangan koperasi.

2.4. Tipe dan kondisi pendapat auditor independen

Akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dari laporan keuangan, juga untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus koperasi. Peran auditor independen sebagai pihak yang menyediakan jasa attestasi memberikan pendapat atas auditnya sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengurus koperasi bertanggungjawab atas kewajaran penyusunan laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan atas audit laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor. Jenis laporan auditor independen sebagaimana dikatakan oleh (Mulyadi; 2002; 21) antara lain : (a) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*), (b) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), (c) Laporan berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*), (d) Laporan berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*) dan (e) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclimer opinion report*). Sedangkan menurut (Jusuf, Amir Abadi, 2003; 41) pendapat auditor terdapat 4 tipe sesuai dengan tersebut diatas, yaitu kecuali laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*).

2.4.1. Pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa catatan (WTC), merupakan pendapat yang terbaik atas kewajaran dalam laporan keuangan, dimana dengan pendapat tersebut pengurus koperasi akan dinilai transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya kepada rapat anggota, sehingga pengguna laporan keuangan utamanya, anggota dan pihak lain termasuk auditor mempunyai persepsi bahwa pertanggungjawaban keuangan wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Kondisi auditor memberikan pendapat wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*), jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dan pengungkapan memadai dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002; 21).

Lebih lanjut menurut (Jusuf, 2003; 36) kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian terdapat 5 (lima) kondisi, yaitu : (a) Semua laporan, meliputi neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas tercakup didalam laporan keuangan, (b) Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan, yang meliputi : keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap dan mental, kemahiran profesional yang cermat dan seksama (SPAP, 2001), (c) Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi, yang meliputi : perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan bukti audit yang cukup dan kompeten (SPAP,

2001), (d) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan, (e) Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

Dalam standar pelaporan pertama Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa "laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia". Standar Audit (SA) Seksi 410 tentang Kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia paragraf 3, menyatakan bahwa prinsip akuntansi berlaku umum adalah padanan kata dari frasa "*generally accepted accounting principles*" dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktek akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain.

Dengan mendasari hal diatas, bahwa salah satu kondisi yang auditor menyatakan pendapatan wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*), bahwa laporan keuangan telah disajikan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, dimana mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam praktek akuntansi di wilayah Indonesia. Prinsip akuntansi, salah satunya diatur melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang memuat, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), sebagaimana dikatakan (Jusuf, Amir Abadi, 2003, 38) bahwa auditor diminta membuat pendapatnya mengenai laporan keseluruhan, termasuk kesimpulan mengenai apakah perusahaan mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum (seperti dimuat dalam Standar Akuntansi Keuangan-SAK).

Dengan demikian terkait dengan pendapat atas audit laporan keuangan koperasi, maka auditor dalam memberikan pendapat independen wajar tanpa catatan (*unqualified opinion*), manajemen koperasi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang mengatur tentang praktek pada entitas tersebut. Pada badan usaha koperasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan diatur melalui PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, dimana selain entitas koperasi menyajikan laporan keuangan sesuai dengan badan usaha non koperasi juga wajib menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, dimana laporan dimaksud hanya berlaku badan usaha koperasi.

2.4.2. Pendapat wajar tanpa catatan dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*)

Kondisi auditor memberikan pendapat wajar tanpa catatan dengan bahasa penjelasan, bilamana terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah

penjelasan, sebagai contoh perusahaan mengubah metode depresiasi, maka perlu diungkapkan dalam opini auditor pada paragraf penjelasan (Mulyadi, 2002, 20).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku paragraf 11, menyebutkan keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan bentuk baku. Keadaan tersebut meliputi : (a) pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain, (b) untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang oleh Ikatan Akuntan Indonesia, (c) Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai, (d) Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, (e) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif, (f) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-*review*, (g) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, maka paragraf penjelesan perlu ditambahkan, sebagai contoh tentang pergantian auditor, sehingga dalam laporan auditor pengganti wajib menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun lalu diaudit oleh auditor lain dengan pendapat sesuai dengan tahun lalu, dengan menyebutkan nomor dan tanggal.

2.4.3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan auditor dalam kondisi sebagaimana dinyatakan oleh (Mulyadi, 2002, 22) sebagai berikut : (a) lingkup audit dibatasi, (b) auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar klien maupun auditor, (c) laporan keuangan tidak disusun dengan prinsip akuntansi berterima umum, (d) prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Pendapat ini dikeluarkan bilamana auditor menjumpai kondisi satu atau 4 (empat) hal tersebut diatas dan jika kondisi laporan secara keseluruhan wajar, namun ada beberapa unsur yang dikecualikan.

Kondisi yang menyebabkan penyimpangan wajar tanpa pengecualian (Jusuf, 2003; 39) terdapat 2 dua kategori laporan audit yang bukan standar, yaitu (a) laporan menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, dan (b) laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata/kalimat. Tiga kondisi yang menyebabkan laporan wajar dengan pengecualian, yaitu : (a) pembatasan lingkup audit, dimana pembatasan ini

auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, maka dengan kondisi ini lingkup dibatasi. Pembatasan lingkup audit disebabkan oleh manajemen perusahaan (klien), sebagai contoh manajemen tidak memberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi piutang usaha kepada debitur, sehingga auditor tidak cukup bukti untuk meyakinkan dirinya atas bukti yang kompoten tersebut. Pembatasan yang disebabkan oleh diluar kekuasaan auditor maupun klien, dimana perjanjian kerja belum disepakati sampai tanggal tutup tahun buku, sehingga menyulitkan dalam melakukan prosedur pemeriksaan. (b) laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan (c) auditor tidak independen.

Laporan yang menyimpang dari bentuk standar sebagaimana dinyatakan oleh (Jusuf ; 2003; 39) terdapat tiga topik yang berhubungan, yaitu (a) yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat tanpa pengecualian (unqualified opinion), (b) jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian dan (c) materialitas. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat sebagaimana tersebut diatas adalah ; pembatasan lingkup audit, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan auditor tidak independen. Laporan audit jenis lain selain wajar tanpa pengecualian, yaitu pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclimer opinion*). Materialitas (*materiality*) sebagaimana dikatakan oleh (Jusuf ; 2003 ; 42) suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika pengetahuan atas salah

saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional.

Dengan demikian laporan audit pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) diberikan kepada manajemen (*auditee*) bilamana secara keseluruhan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, namun ada suatu yang perlu diungkapkan, misalnya auditor tidak memperoleh bukti kompeten atas piutang usaha melalui konfirmasi dengan debitur.

2.4.4 Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar terjadi apabila auditor mempunyai keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan manajemen (*auditee*) tidak berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien (Mulyadi, 2002, 22). Sedangkan sebagaimana dinyatakan oleh (Jusuf ; 2003; 42) pendapat tidak wajar hanya diberikan jika auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan oleh auditor apabila auditor mempunyai keyakinan yang memadai, bahwa manajemen tidak menyajikan secara memadai laporan keuangannya, berdasarkan audit mereka sesuai program/prosedur audit (*audit program*).

Dengan demikian, laporan audit *adverse opinion*, bilamana manajemen tidak menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Sebagai contoh perusahaan dalam menetapkan kebijakan akuntansi tidak konsisten sehingga mengurangi daya banding atas laporan keuangan tersebut, metode penilaian persediaan, penyusutan.

2.4.5. Pernyataan tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*).

Auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*), jika auditor tidak mempunyai keyakinan, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar, maka menimbulkan resiko audit yang tinggi. Sebagaimana dinyatakan oleh (Mulyadi, 2002, 22), menyebutkan laporan audit ini tanpa pendapat (*non opinion report*), dimana kondisi yang menyebabkan adalah : pembatasan yang luar biasa pada lingkup audit dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Lebih lanjut sebagaimana dikatakan oleh (Jusuf ; 2003 ; 40) auditor memberikan pendapat *disclaimer*, jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar, disebabkan adanya pembatasan lingkup audit dan auditor tidak independen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, auditor tidak menyatakan pendapat, jika auditor tidak yakin atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan auditor tidak independen. Idependensi (SPAP ; 2001; 20000.2) menyatakan, sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*)

2.4.6. Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor

Sebagaimana dijelaskan oleh (Jusuf ; 2003, 41) jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor sebagai berikut :

Daftar tabel : 2.1. Jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor

NO	JENIS LAPORAN	KESIMPULAN AUDITOR
1.	Wajar tanpa pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)	Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.
2.	Wajar dengan pengecualian (<i>qualified opinion</i>)	Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, kecuali untuk pos tertentu
3.	Tidak wajar (<i>adverse opinion</i>)	Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar
4.	Tidak memberikan pendapat (<i>disclaimer opinion</i>)	Auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar

Laporan audit untuk setiap kondisi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan audit standar tanpa pengecualian pada berbagai tigtatan kualitas

Daftar tabel: 2.2. Laporan audit pada kondisi yang mengakibatkan penyimpangan.

Kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa catatan	Tidak material	Material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan	Sangat material sehingga kewajaran keseluruhan patut dipertanyaa n
Ruang lingkup dibatasi oleh klien atau kondisi tertentu	Wajar tanpa pengecualian	Pengecualian ruang lingkup, paragraf tambahan, dan pendapat wajar dengan pengecualian (kecuali untuk)	Paragraf penjelasan
Laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum	Wajar tanpa pengecualian	Paragraf penjelasan	Paragraf penjelasan

Auditor tidak independen		Pernyataan tidak memberikan pendapatan (terlepas dari materialitas)	
Prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian paragraf, penjelasan	
Ketidakpastian mempengaruhi laporan keuangan	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian paragraf penjelasan	
Keraguan atas kelangsungan hidup	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian paragraf, penjelasan	
Penyimpangan yang diterima dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau prinsip akuntansi lain	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian paragraf, penjelasan	
Penekanan pada suatu hal	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian paragraf, penjelasan	
Penggunaan auditor lain	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian, modifikasi perkataan	

Sumber : (Jusuf ; 2003; 58)

2.5. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Chalimi (1998) dengan judul Evaluasi Sistem Akuntansi Koperasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Khusus untuk Koperasi (studi kasus pada KUD Tani Sleman, Yogyakarta). Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus yang bertujuan (a) mengetahui sistem akuntansi yang diterapkan pada KUD Tani Sleman, (b) mengevaluasi daya dukung sistem akuntansi yang diterapkan terhadap praktek berdasarkan penerapan standar khusus akuntansi koperasi. Penulis melakukan evaluasi implementasi akuntansi koperasi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi (1988) sebelum revisi. PSAK (27/1988) menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi sebagai suatu sistem pelaporan keuangan koperasi, lebih ditujukan kepada pihak luar (diluar pengurus) dan tidak dimaksudkan untuk

pengendalian usaha. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama (a) menilai pertanggungjawaban pengurus, (b) menilai prestasi pengurus, (c) menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya dan (d) sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumberdaya, kerja dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Laporan keuangan koperasi sesuai dengan PSAK 27/1988 (sebelum revisi) meliputi : neraca, perhitungan hasil usaha, posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan dan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan tambahan. Peneliti oleh Abid Chalimi (1998) melakukan evaluasi laporan keuangan koperasi mengacu PSAK sebelum revisi, dimana dalam PSAK (27/1988) koperasi tidak wajib menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengungkapkan implementasi PSAK pada koperasi KUD Tani Sleman, Yogyakarta. Kesimpulan penelitian, bahwa KUD Tani Sleman, Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 27/1988 tentang Akuntansi Koperasi, khususnya membedakan transaksi anggota dengan non anggota. Penyajian neraca mengacu pada PSAK (1994) yang menyajikan elemen laporan keuangan untuk neraca, yaitu aktiva, kewajiban dan modal. Perhitungan hasil usaha tidak memisahkan transaksi anggota dan non anggota, dimana diwajibkan dalam PSAK dimaksud. Laporan perubahan posisi keuangan, wajib bagi koperasi, yaitu laporan posisi keuangan sumber dan penggunaan dana dan laporan perubahan posisi keuangan kenaikan dan penurunan modal kerja. Kedua laporan tersebut dikategorikan dalam laporan perubahan

posisi keuangan pada PSAK 27 (Revisi 1998) tidak mewajibkan pengurus koperasi menyusun dan menyajikannya sebagai laporan keuangan tambahan.

Peneliti oleh Mude (2002) berjudul *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi pada Koperasi Unit Desa Karangploso-Malang*. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengungkapkan implementasi PSAK pada koperasi khususnya KUD Karangploso Malang. Penulis melakukan evaluasi penerapan PSAK No. 27 (Revisi 1998). Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi penerapan standar khusus akuntansi koperasi, khususnya pada KUD Karangploso, Malang. Kesimpulan penelitian, neraca telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan perhitungan hasil usaha belum menyajikan transaksi anggota dan non anggota serta perkiraan pajak penghasilan badan. Laporan arus kas telah disusun sesuai dengan PSAK No. 2. Laporan promosi ekonomi anggota tidak disajikan oleh pengurus. Atas dasar hasil penelitian tersebut, bahwa KUD Karangploso tidak mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota, sehingga koperasi belum memberikan informasi manfaat ekonomi yang diberikan kepada anggota dari pelayanan dan sisa hasil usaha yang diterima.

Peneliti oleh Faharani (2004) yang berjudul *Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi khususnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Lugas*. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) pada koperasi khususnya KPRI Lugas-Sidoarjo. Kesimpulan penelitian,

koperasi tidak mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota sebagai komponen laporan keuangan koperasi sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian pada paragraf 74, menyatakan laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

2.5.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Peneliti oleh Chalimi (1998) hanya mengungkapkan sistem akuntansi koperasi sesuai dengan PSAK No. 27/1988 tentang Akuntansi Koperasi, dimana pada PSAK tersebut tidak mewajibkan koperasi untuk menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. Perbedaannya, peneliti tidak melakukan indentifikasi hambatan implementasi PSAK dimaksud. Kelebihannya, hasil penelitian ini berusaha untuk memberikan masukan kepada Pengurus Koperasi untuk menerapkan PSAK tersebut.

Peneliti oleh Mude (2002) hanya mengungkapkan penerapan PSAK No. 27 (Revisi 1998), pengurus koperasi wajib menyajikan laporan promosi ekonomi anggota sebagai laporan keuangan pokok koperasi. Perbedaannya, peneliti tidak melakukan identifikasi hambatan implementasi PSAK dimaksud. Kelebihannya, penulis mengungkapkan Koperasi tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.

Peneliti oleh Faharani (2004) hanya mendeskripsikan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian. Perbedaannya, penulis mampu menyajikan laporan promosi

ekonomi anggota, namun belum jelas dasar/kebijakan pengukuran laporan ekonomi anggota. Kekurangannya, peneliti tidak melakukan identifikasi hambatan implementasi tersebut.

Ketiga peneliti oleh Chalimi (1998); Mude (2002); dan Faharani (2004), penelitian dengan metode kualitatif studi kasus tunggal dan unit analisis laporan keuangan koperasi.

2.5.2 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu oleh ketiga peneliti, yaitu Chalimi (1998); Mude, (2002); dan Faharani (2004), penelitian dengan metode kualitatif studi kasus tunggal dan unit analisis laporan keuangan koperasi yang bertujuan untuk mengungkapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian. Selanjutnya, untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis hambatan-hambatan implementasi PSAK dilihat tiga dimensi, yaitu : akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran.

Selanjutnya, metode penelitian menggunakan studi *kausal*. Unit analisis (obyek penelitian) adalah manajer akuntansi koperasi dalam kaitannya penyajian laporan keuangan koperasi untuk pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam forum rapat anggota.

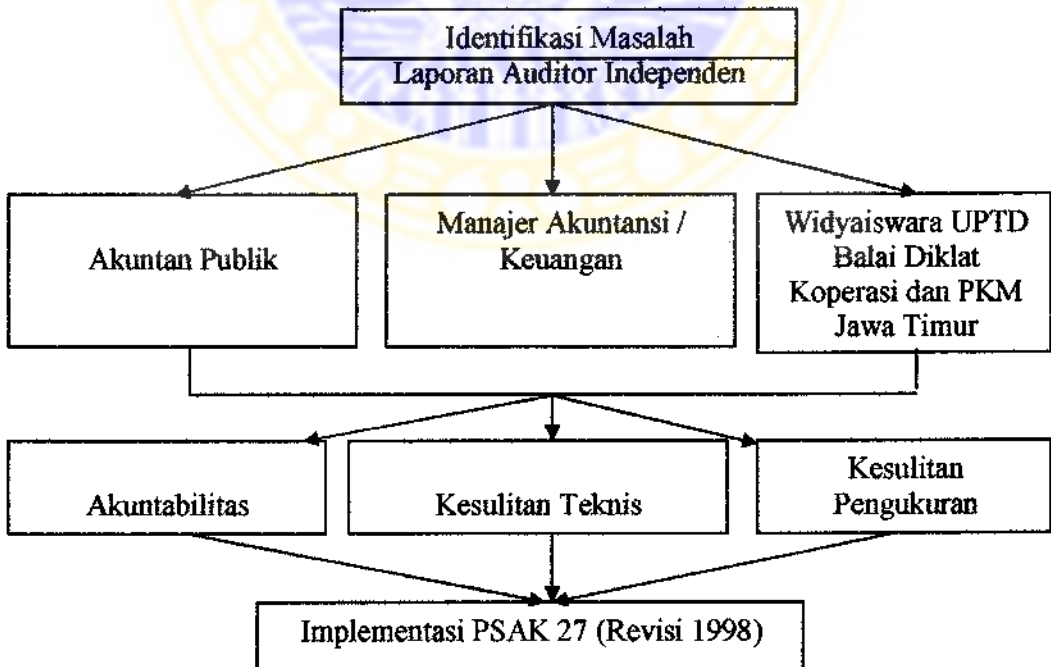
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Atas dasar survey pendahuluan penulis melalui diskusi dengan manajer akuntansi pada beberapa Koperasi yang akan menjadi subyek penelitian, diskusi dengan para pelatih/widyaiswara yang memberikan materi akuntansi perkoperasian di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur serta beberapa akuntan publik yang telah melakukan audit koperasi, maka hambatan-hambatan implementasi PSAK dimaksud, antara lain : (a) akuntabilitas, (b) kesulitan teknis dan (c) kesulitan pengukuran. Berikut ini kerangka konseptual untuk mengidentifikasi hambatan implementasi PSAK dimaksud :

3.1. Kerangka konseptual

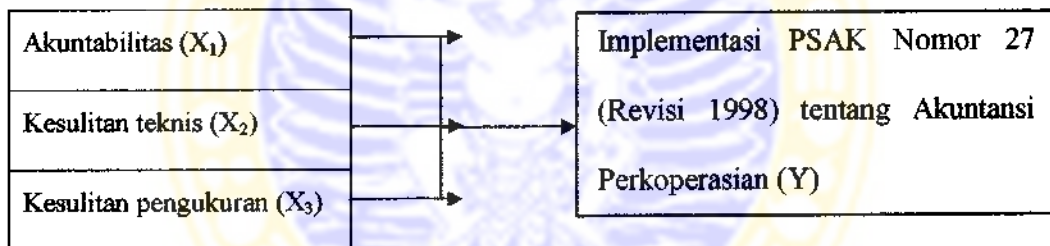
Gambar 3.1: Kerangka konseptual penelitian



Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah, maka disusun model penelitian yang hanya dapat dipahami melalui analisis yang berkaitan dengan akuntabilitas pengurus/manajemen koperasi dilihat dari laporan keuangan koperasi, kesulitan teknis pelaporan keuangan, dan kesulitan pengukuran dalam pelaporan keuangan untuk laporan promosi ekonomi anggota. Berdasarkan hal diatas, maka penjabaran selanjutnya adalah dengan menggunakan: *akuntabilitas*, *kesulitan teknis* dan *kesulitan pengukuran* dalam penelitian ini akan menjadi variabel-variabel independen.

3.2. Model penelitian

Gambar 3.2. : Model penelitian – Hubungan Variabel



Implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian dalam penelitian ini dijadikan variabel dependen. Sedangkan akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran yang dijadikan variabel bebas dan akan didefinisikan secara khusus dalam definisi operasional variabel. Akuntabilitas (X_1), kesulitan teknis (X_2), dan kesulitan pengukuran (X_3) besarnya diukur dengan skala yang menunjukkan posisi rendah yang berarti mempunyai berpengaruh yang lemah dan ukuran yang tinggi makin kuat pengaruh ketiga

variabel tersebut terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.

3.3. Hipotesis penelitian

Hipotesis alternatif :

Ha₁ : Terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan atas akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian

Ha₂ : Terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian

Ha₃ : Terdapat pengaruh signifikan kesulitan teknis terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian

Ha₄ : Terdapat pengaruh signifikan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasi

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Identifikasi variabel

Penelitian ini bersifat *kausal* untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel dependen yang akan diteliti. Dalam penelitian kausal, variabel bebas merupakan hal yang sudah terjadi dan tidak dapat dikendalikan (Kuncoro; 2003; 11). Dalam kaitan penelitian ini variabel bebas adalah (a) akuntabilitas, (b) kesulitan teknis dan (c) kesulitan pengukuran. Hambatan implementasi PASK tersebut tidak dapat dikendalikan dan merupakan suatu kondisi terjadi.

Sebagaimana kondisi ditunjukkan atas dasar laporan keuangan koperasi mengindikasikan (a) akuntabilitas pengurus/manajemen koperasi masih rendah, bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998), (b) kesulitan teknis pelaporan keuangan, dimana pengurus koperasi tidak menyajikan laporan perhitungan hasil usaha yang memisahkan transaksi yang terjadi dengan anggota dan bisnis dengan non anggota, (c) kesulitan pengukuran dalam pelaporan keuangan, bahwa pengurus koperasi tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, karena kesulitan untuk melaporkan perbandingan harga di koperasi dengan harga barang diluar koperasi.

Dalam penelitian ini, maka unit analisis (obyek penelitian) adalah manajer akuntansi koperasi dalam kaitannya dengan kewenangan penyusunan dan

penyajian laporan keuangan koperasi, dimana laporan tersebut sebagai pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada forum rapat anggota .

Dengan koperasi tidak menyajikan laporan keuangan koperasi sesuai dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, maka pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada rapat anggota belum mencerminkan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai perkoperasian yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4.2. Definisi operasional

Variabel yang dijadikan perhatian dalam penelitian ini didiskripsikan sebagai berikut :

1. Implementasi PSAK No.27 (Revisi 1998) - Akuntansi Perkoperasian (Y)

Implementasi adalah adanya penerapan atau pelaksanaan (Kamus lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tahun, 199) dari suatu aturan/pedoman yang diterbitkan oleh badan yang berwenang untuk digunakan sebagai praktek. Dalam kaitannya dengan implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) adalah adanya penerapan PSAK tersebut sebagai praktek akuntansi perkoperasian, dimana praktek akuntansi keuangan untuk tujuan umum. Selanjutnya, data variabel dependen (Y), yaitu implementasi PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian di dapatkan dengan mengajukan pertanyaan mengenai implementasi standard tersebut. Pertanyaan yang diajukan merupakan elemen dari variabel dependen (Y).

Elemen variabel dependen, sebagai berikut :

1. Menyajikan neraca, dengan ekuitas : simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyeteraan, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha.
2. Menyajikan laporan perhitungan hasil usaha yang memisahkan partisipasi anggota dan pendapatan non anggota serta adanya beban perkoperasian
3. Menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2 yang memisahkan kas yang bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan kas dari aktivitas pendanaan.
4. Menyajikan laporan promosi ekonomi anggota
5. Menyajikan laporan perubahan ekuitas, sebagai laporan keuangan tambahan bagi badan usaha koperasi
6. Menyajikan catatan atas laporan keuangan

2. Akuntabilitas (X₁)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Dengan mendasari teori agen, bahwa dalam teori tersebut terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengurus/ manajemen (*agent*), sehingga agen yang diberikan mandat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik atas mandat tersebut. Dalam kaitan akuntabilitas koperasi, dilihat dari pertanggungjawaban pengurus/manajemen kepada anggota koperasi sebagai pemilik. Pertanggungjawaban melalui laporan keuangan dinyatakan akuntabel bilamana laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan

PSAK yang mengaturnya, sehingga sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Elemen akuntabilitas sebagai variabel independen (X_1) adalah :

1. Penyelenggaraan rapat anggota
2. Pemberitahuan kepada anggota jadwal rapat anggota dalam waktu cukup.
3. Mendorong anggota menghadiri rapat anggota
4. Melibatkan anggota dalam mengambil keputusan strategis melalui rapat anggota luar biasa (RALB)
5. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau pedoman/standar
6. Pelaporan keuangan tepat waktu
7. Informasi non keuangan dapat diakses anggota
8. Pemberian kesempatan anggota untuk membaca laporan keuangan.
9. Anggota mempunyai kesempatan menyampaikan hak suaranya melalui rapat anggota.
10. Anggaran dasar memuat hak anggota
11. Koperasi memiliki anggaran rumah tangga (ART)
12. Koperasi memiliki peraturan khusus
13. Pedoman operasional baku (POB) dimiliki, sebagai penjabaran dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengatur mekanisme pelaksanaannya.
14. Pedoman etika dan tingkah laku anggota, pengurus, pengawas dan karyawan

15. Penyelenggaraan rapat pengurus, pengawas dan karyawan secara tertib serta dibuatkan berita acara.
16. Kompetensi pengurus, pengawas dan karyawan yang memadai.
17. Meminimalkan benturan kepentingan pengurus, pengawas dan karyawan.
18. Auditor intern kompeten dan memadai
19. Penilaian kinerja karyawan
20. Visi, misi dan rencana strategis

3 Kesulitan teknis (X_2)

Kesulitan atau hambatan adalah rintangan, halangan; sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengganggu kelancaran (Kamus lengkap Bahasa Indonesia; tanpa tahun; 276). Teknis adalah bersifat teknis, secara teknis (Kamus lengkap Bahasa Indonesia; tanpa tahun; 625). Dalam kaitan kesulitan teknis disini adalah adanya rintangan dalam penyajian laporan keuangan koperasi menghadapi kendala teknis tidak adanya rekaman/catatan khusus transaksi anggota yang harusnya transaksi penjualan kepada anggota dan non anggota wajib dipisahkan untuk memberikan informasi partisipasi bruto anggota dan untuk memberikan informasi manfaat ekonomi anggota.

Elemen kesulitan teknis sebagai variabel independen (X_2) adalah :

1. Bukti partisipasi anggota (faktur pembelian barang/jasa dari anggota)
2. Bukti partisipasi anggota (faktur penjualan barang/jasa ke anggota)
3. Bukti partisipasi anggota (bukti penerimaan kas)
4. Slip partisipasi anggota (pembayaran cicilan pinjaman)

4 Kesulitan pengukuran (X_3)

Pengukuran adalah proses, cara tindakan mengukur (Kamus lengkap Bahasa Indonesia; tanpa tahun; 661). Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu obyek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan (Suwarjono; 2005; 133). Dalam kaitannya dengan pengukuran, bahwa hambatan untuk menentukan jumlah rupiah harga suatu produk tertentu yang membanding harga koperasi dengan harga luar koperasi, yaitu (a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, yaitu merupakan selisih lebih harga pasar diatas harga dibebankan kepada anggota oleh koperasi atas barang dan jasa diperoleh anggota lewat koperasi, (b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, yaitu selisih lebih harga diterima anggota produknya dipasarkan lewat koperasi dibandingkan kepada pihak lain (c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, yaitu berupa selisih bunga lebih rendah dari bunga bank untuk pinjaman dan sebaliknya lebih tinggi untuk tabungan/simpanan, serta biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan.

Elemen kesulitan pengukuran sebagai variabel independen (X_3) adalah sebagai

1. Menentukan rata-rata harga barang dipasar setiap bulan (manfaat ekonomi pengadaan barang)
2. Menentukan rata-rata harga barang dipasar setiap bulan (manfaat ekonomi pemasaran barang)

3. Menentukan rata-rata harga jasa dipasar setiap bulan (manfaat jasa penyediaan jasa).
4. Menentukan rata-rata suku bunga di pihak lain (bank) (manfaat ekonomi simpan pinjam)
5. Buku pembantu promosi ekonomi anggota.

4.3. Instrumen penelitian dan pengumpulan data

4.3.1. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah keseluruhan proses menyusun serangkaian pertanyaan secara sistematis, menyeluruh dan utuh. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Riduwan; 2005; 24), dimana alat bantu dapat digunakan angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan; 2005; 26), Tujuan kuesioner adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban responden (Kuncoro ; 2003 ; 155). Daftar pertanyaan tersebut untuk menentukan bobot setiap variabel yang diteliti.

Selanjutnya, untuk variabel akan menggunakan *attitude scale*, yaitu suatu kumpulan alat pengukuran yang mengukur tanggapan individu terhadap suatu obyek atau fenomena (Kuncoro ; 2003; 157). Jenis skala sikap antara lain :

1. Skala likert (*likert scale*), dimana responden menyatakan setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pertanyaan mengenai perilaku, obyek, orang atau kejadian. Biasanya skala yang diajukan terdiri dari atas 5 atau 7 titik. Skala likert nantinya dijumlahkan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku (Kuncoro ; 2003; 157). Sedangkan (Riduwan ; 2005;12) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.
2. Skala *Differential Simantict*, atau skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutup). Karakteristik bipolar mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap obyek, yaitu: (a) Potensi, kekuatan atau atraksi suatu obyek, (b) Evaluasi, hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu obyek, (c) Aktivitas, tingkatan gerakan suatu obyek (Riduwan; 2005 ; 17).

Dalam penelitian menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel, dan kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Selanjutnya indikator-indikator yang terukur tersebut dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Dalam menentukan konsep indikator dan deskriptor menurut Riduwan, 2005; 36), yaitu :

”(a) sub variabel; indikator; prediktor; dan nomor butir, (b) variabel; dimensi; aspek; indikator; dan nomor item, (c) variabel; dimensi; indikator-indikator; dan nomor item pertanyaan-pertanyaan; (d) aspek yang diamati; indikator dan nomor item instrumen ; (e) masalah penelitian; hipotesis penelitian; variabel penelitian; indikator penelitian

dan nomor item; (f) variabel; indikator; data yang dibutuhkan; nomor item”

Penelitian ini dalam menurunkan indikator/elemen menggunakan model, yaitu: aspek yang diamati/variabel; indikator/elemen; nomor item dan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban.

Selanjutnya, elemen variabel dependen, yaitu implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian (Y) diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert dijabarkan dari elemen variabel dependen (Y). Elemen variabel independen yang meliputi : (a) Akuntabilitas (X_1) menggunakan skala *differential semantic*, (b) Kesulitan teknis (X_2) dan (c) Kesulitan pengukuran (X_3) menggunakan skala likert (*likert scale*).

Keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data perspektif, yang artinya anggota organisasi (manajer akuntansi) tentang adanya aspek-aspek organisasi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam instrumen penelitian variabel laten diwakili oleh beberapa variabel manifes yang dieksplorasi berdasarkan pandangan dan pendapat para ahli serta teori yang relevan. Instrumen penelitian dirumuskan serta dieksplorasi dari variabel-variabel yang mewakili indikator/elemen mempedomani PSAK, teori yang relevan dan kondisi lingkungan badan usaha koperasi.

Penggunaan skala dalam riset ini meskipun datanya ordinal, namun dengan instrumen menghasilkan skala nilai jenjang yang bilangan angka-angkanya dapat langsung digunakan dalam analisa statistik. Kerlinger (dalam Ardianto; 2004; 23). ”skala nilai jenjang angka-angkanya mungkin membentuk

interval-interval yang sama dalam pikiran pengamat, angka-angka tersebut mungkin akan mendekati pengukuran interval”

Sedangkan sebagaimana dinyatakan (Sugiyono; 2004; 16) bahwa ”dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan skala *Likert, Guttman, Semantik Differential, Thurstone*, data yang diperoleh adalah data interval”

Disamping penggunaan kedua skala tersebut, untuk memperoleh data tambahan, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Momen wawancara ini sangat dimungkinkan dilaksanakan karena paneliti akan langsung datang ke perusahaan responden pada saat penarikan kuesioner yang sebelumnya telah dikirim. Hasil wawancara ini merupakan catatan tersendiri yang akan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan.

4.3.2. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian

Pengujian validitas dibuat kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu dengan menurunkan variabel, indikator penelitian, dekriptor dan nomer item dengan mempedomani pandangan/pendapat para ahli, PSAK, dan teori yang relevan serta kondisi lingkungan badan usaha koperasi sebagaimana lampiran 3 (kisi-kisi penelitian). Pengujian validitas instrumen penelitian sebelum disebarkan kepada responden dilakukan pengujian lebih dahulu kepada para ahli yang kompeten dalam bidang perkoperasian. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang (Sugiyono; 2004; 270). Dalam penelitian ini menggunakan para ahli sebanyak 5 (lima) orang yang kompeten dalam bidang perkoperasian melalui widyaiswara/instruktur yang memberikan materi teknis perkoperasian dan

akuntansi koperasi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

Pengujian reliabilitas instrumen secara internal diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Pengujian reabilitas dengan *internal consistency* dilakukan dengan cara mencoba sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis, dimana hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reabilitas instrumen. Pengujian menggunakan *alfa cronbach*, dimana dilakukan untuk jenis data interval/essay (Sugiyono: 2004; 282).

4.3.3. Pengumpulan data

Obyek dalam penelitian (unit analisis) ini adalah manajer akuntansi di koperasi yang menjadi responden pada koperasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota, dimana koperasi tersebut telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2004 dan 2005, dimana masing-masing koperasi dengan jumlah responden sebanyak 3 orang pada organisasi dalam bidang akuntansi dan keuangan, yaitu; direktur administrasi dan keuangan, kepala bagian keuangan serta kepala bagian akuntansi. Selanjutnya, untuk validitas dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan prosedur, sebagai berikut :

1. Penetapan populasi :

Populasi dalam penelitian ini adalah manajer akuntansi sebanyak 31 koperasi lintas kabupaten/kota di Jawa Timur. Karakteristik koperasi yang akan digunakan dalam pengambilan sampel adalah manajer akuntansi, dengan

kriteria : (a) manajer akuntansi pada koperasi yang telah melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2004 dan 2005, (b) masa kerja manajer akuntansi sekurang-kurangnya dua tahun, dengan pertimbangan, bahwa yang bersangkutan dengan masa kerja dua tahun mereka telah memahami pekerjaannya, (c) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Alasan pemilihan sampel ini adalah dengan koperasi telah melakukan rapat anggota tahunan, berarti koperasi tersebut menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada anggota melalui rapat anggota, serta dengan telah diaudit oleh akuntan publik, maka semestinya laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan seharusnya mencerminkan pelaksanaan akuntabilitas, sehingga relevan dengan penelitian ini. Relevansi ini adalah merupakan komponen penting dalam penelitian.

2. Pengambilan sampel :

Sampel diambil dengan metode sampling jenuh sebanyak 31 koperasi lintas kabupaten/kota di Jawa Timur. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 responden. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono; 2004; 61). Namun demikian, meskipun seluruh manajer perusahaan koperasi yang menjadi populasi memungkinkan untuk dikirim kuesioner, namun hanya kuesioner yang kembali dan

memenuhi syarat yang diolah. Data populasi dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur tahun 2006 posisi per April 2006.

4.4. Analisis

4.4.1. Uji Klasik

Data yang akan diolah dapat dikatakan valid apabila karakteristik sampel yang digunakan telah merepresentasikan populasi yang ada. Sebelum dilakukan pengujian data, akan terlebih dahulu diuji validitas dan reabilitas dari data yang akan diolah. Hal ini dilakukan untuk menyakinkan bahwa penggunaan model regresi berganda ini akan memberikan alat prediksi yang baik dan tidak bias. Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Uji Normalitas data

Statistik parametris dapat dilakukan, berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal (Sugiyono; 2004; 73). Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk mengujinya dapat digunakan *normal probability plot*, yaitu apabila grafik menunjukkan penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Kolinearitas ganda (*multicollinearity*) adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier yang sempurna antara variabel penjelasan/independen (Awat; 1995; 368). Model regresi berganda harus terbebas dari multikolinearitas untuk setiap variabel independennya. Identifikasi keberadaan multikolinearitas ini dapat didasarkan pada *nilai tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* yaitu : (a). Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1, (b) Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1 (Santoso; 2000; 206). Identifikasi lain adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen harus lemah yaitu di bawah 0,5 (Santoso; 2000; 207). Batasan tidak terjadi multikolinieritas pada umumnya VIF kurang dari 10 (Gujarati,2003).

3. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi klasik dalam model regresi linier bahwa, tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ (Awat; 1995; 398). Pengujian dilakukan dengan metode *Durbin-Watson*. Hasil pengujian yang berada disekitar angka -2 sampai dengan + 2 secara umum dijadikan patokan untuk menyimpulkan terjadinya independensi residual atau dengan kata lain tidak terjadi otokorelasi (Santoso,2000; 219). Namun jika data bukan data *time series* maka uji ini tidak perlu dilakukan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi klasik dalam model regresi linier adalah bahwa variabel pengganggu e_i mempunyai varians yang sama dari satu pengamatan kepengamatan lainnya, yakni sebesar α^4 . Asumsi variabel pengganggu mempunyai varians yang sama sebesar α^2 disebut asumsi homoskedastisitas. Varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya disebut heteroskedastisitas, dimana ini sering timbul bila menggunakan data *cross section* (Awat; 1995; 379) Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada data yang menyimpang terlalu jauh (*outlayers*). Ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikan secara statistik (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$) terhadap nilai residual yang diperlukan sebagai variabel dependen, maka variabel independen tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan melihat hasil *scatterplot* (Santoso; 2000; 210). Hasil dari *scatterplot* yang menggambarkan tidak ada pola tertentu yang terbentuk dari data menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multi regresi dengan tahapan sebagai berikut :

4.4.2.1. Pengolahan data perspektif

Agar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen lebih mudah dibandingkan, maka data variabel manifes yang membentuk suatu variabel laten dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah variabel manifes tersebut

4.4.2.2. Penaksiran parameter regresi ganda

Proses ini ditujukan untuk mencari koefisien kemiringan regresi untuk setiap variabel independen. Fungsi regresi berganda menurut (Awat; 1995; 337) sebagaimana dibawah ini, dimana :

Variabel dependen : Implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, dengan model yang digunakan adalah :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998)-Akuntansi Perkoperasian
- b_0 = Konstanta
- b_1 = Koefisien kemiringan regresi ke i
- X_1 = Akuntabilitas
- X_2 = Kesulitan teknis
- X_3 = Kesulitan pengukuran
- e = Kesalahan (*error*)

4.4.2.3. Pengujian nilai koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro ; 2003; 220). Perhitungan nilai R^2 merupakan proses pengujian apakah Y sebagai variabel dependen berhubungan atau bergantung secara linier terhadap variabel independen. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel dependen dapat dijelaskan secara linier oleh variabel independen. Nilai R^2 mendekati 0 tidak harus diartikan bahwa variabel dependen

tidak dapat dijelaskan secara linier oleh variabel independen. Nilai R^2 yang kecil dapat terjadi karena bias dalam pengambilan sampel, seperti misalnya bias untuk cenderung beregresi harga rata-rata (*regression to tile mean*). Nilai R^2 perlu disesuaikan menjadi R^2 *ajusted* karena model persamaan biasanya tidak menggambarkan populasi sesungguhnya. R^2 *adjusted* dinilai lebih dapat mencerminkan kesesuaian model terhadap dunia nyata yang diwakilinya.

4.4.2.4. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro ; 2003; 219). Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan dilakukan untuk menguji hipotesis nol (H_0) agar dapat menyatakan bahwa, akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian. Pengujian ini menggunakan Uji F-Statistik. Keputusan akan diambil berdasarkan tingkat signifikan 5 %. Pengujian ini menggunakan aplikasi program *SPSS (Statistics Program For Social Science)*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5 %, dengan asumsi bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmu sosial yang secara umum kesalahan 5 % masih dapat diterima.

Secara formulasi hipotetis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Untuk menguji H_0 :

$H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya : tidak terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan atas akuntabilitas, kesulitan teknis, dan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27

$H_a \neq b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya : terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan atas akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27. Untuk menguji kedua hipotesis digunakan statistik F (Kuncoro; 2003 ; 219). Kriteria penolakan/tidak dapat menolak H_0 adalah :

Jika $F \leq 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya hipotesis dapat diterima

Jika $F > 0,05$, maka H_0 tidak ditolak, artinya hipotesis tidak dapat diterima

4.4.2.5. Uji Signifikasi Individual/Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro ; 2003; 218). Meskipun penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependennya, namun hasil program SPSS dapat pula diperoleh informasi mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial.

Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah suatu parameter (b_1) sama dengan nol, atau : $H_0 = b_1 = 0$, yang artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : $H_a = b_1 \neq 0$, yang artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini

digunakan statistik t (Kuncoro ; 2003; 219). Sehingga bila ingin dilihat pengaruh variabel independen secara parsial, maka dapat dilakukan uji t pada tingkat signifikan 5 %. Kriteria penerimaan dan penolakan berlaku sebagai berikut :

- Jika $\text{sig } t \leq 0,05$ maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa variabel X tidak mempengaruhi secara parsial/individual terhadap variabel Y.
- Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka hipotesis nol tidak ditolak, artinya bahwa variabel X akan mempengaruhi secara parsial/individual terhadap variabel Y.



BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Data Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana agar kuesioner dapat memperoleh informasi yang diharapkan, maka dilakukan dengan pengujian butir-butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan ini mendasari apa yang ada dalam PSAK tersebut dan pendapat para ahli dalam bidang perkoperasian.

Penelitian menggunakan data berasal dari responden para manajer akuntansi dan anggota organisasi bagian keuangan dan akuntansi pada koperasi lintas kabupaten/kota di Jawa Timur. Data koperasi diperoleh dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur terutama yang telah melakukan rapat anggota tahun buku 2004 dan 2005, serta laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Pengumpulan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden dilakukan dengan pengambilan langsung oleh peneliti kepada koperasi responden. Di bawah ini hasil penyebaran kuesioner pada koperasi skala lintas kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur, dimana manajer dan anggota organisasi dalam bidangnya menjadi responden dalam penelitian ini.

Tabel 5.1. Koperasi sebagai responden

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI
1.	Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati)	Jl. Balearjosari No. 38 Malang Telp. (0341) 491488, Fax. (0341) 481074, E-mail :puskowan@indo.net.id	KAP Soebandi & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof. Dr. Soebandi, SE, Ak

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI
2.	Koperasi Simpan Pinjam Mesra	Jl. Dukuh Kupang XXIV No. 2 Surabaya Telp. (031) 5678435	KAP Drs. Basri Harjosumarto. M.Si, Ak & Rekan <i>Qualified opinion</i> , Dikecualikan penerapan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Drs. Basri Harjosumarto. M.Si, Ak
3.	Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima (Kop. PPKL)	Jl. Thamrin No. 40 Madiun Telp. (0351) 451475	KAP Sugeng & Hamzens <i>Unqualified opinion</i> Drs. Sugeng Wirjaseputra, MBA, Ak, M.Hum
4.	Koperasi Pegawai PT. Sucofindo	Jl. Kalibutih 215 Surabaya Telp. (031) 5475578, 5469123, Fax. (031) 5469144	KAP Santoso & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Drs. Santoso, MM, Ak
5.	Pusat Koperasi Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kodikal)	Jl. Morokrengan Surabaya (Komplek Kodikal). Telp. (031) 3281101	KAP Santoso & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Drs. Maruto, Ak
6.	Koperasi Karyawan Sampoerna.	Jl. Rungkut Asri Timur XVIII No. 24 Surabaya Telp. (031) 8705845	KAP Drs. J. Tanzil & Rekan, <i>Qualified opinion</i> , Dra. Rita Susilowati L, Ak <i>Dikecualikan koperasi tidak mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota.</i>
7	Koperlis Jawa Timur	Komplek Perdagangan Manyar Indah Megah Plaza Blok A-31 Jl. Bratang Binangun Surabaya Telp. (031) 5042355, e-mail:koperlis@hotmil.com	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Qualified opinion</i> , dikecualikan piutang macet.
8.	Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (Kanugoro) Jawa Timur	Jl. Gayung Kebonsari No. 44-F Blok-03 (Komplek Graha Indah Wisesa) Surabaya Telp. (031) 8288597	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
9.	Koperasi Simpan Rasa Mandiri Jawa Timur	Jl, Kahuripan 11 E Malang Telp. (0341) 346452, 346675	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
10.	Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur	Jl. Kemayoran Baru No. 15 Surabaya, Telp. (031) 3523017, 3551394, 3553316, Fax. (031) 3526457	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Qualified opinion</i> , dikecualikan perlakuan akuntansi atas

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI
			hubungan afiliasi dengan PT. Trimitra Medika Sejahtera
11.	Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur	Jl. Raya Ngijo 688 Karangploso, Malang Telp. (0341) 465277, Fax. (0341) 465279	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
12.	Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung Jawa Timur	Jl. Raya Puntir Desa Martapura Kec. Purwosari Kab. Pasuruan Telp. (0343) 614949	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
13.	KUB Pergulaan Rosan Kencana Jawa Timur	Gayung Kebonsari VIII/2 Surabaya Telp/Fax. (031) 8290902	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
14.	Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat Jawa Timur	Jl. Darmo Permai XIV/7 Surabaya Telp/Fax. (031) 7344034	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Disclaimer</i> , karena hanya kompilasi laporan keuangan
15	Koperasi Sumber Insan Mandiri	Jl. Wisma Kedungasem Blok F No. 2 Surabaya Telp. (031) 8709624, 8708198, 8782346, Fax. (031) 8782347	KAP Drs. Widartoyo, MM. M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
16	Koperasi Bhakti Artha Swadana Jawa Timur	Jl. Ngangel Jaya Selatan Komplek RMI C-17 Surabaya Telp/Fax. (031) 5043248, 5045993	KAP Bambang, Sutjipto Ngumar, & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof. Sutjipto Ngumar, Ph.D, Ak Dikecualikan belum menerapkan PSAK 24 mengenai Imbalan Pasca Kerja
17	Puskud Mina Jawa Timur	Jl. A. Yani 256 Surabaya Telp. (031) 8290127, 8290223, Fax. (031) 8292401	KAP Santoso & Rekan <i>Qualified opinion</i> , Drs. Santoso, Ak Dikecualikan aktiva penyertaan berupa kapal dan pabrik es
18	Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita	Jl. Jemur Andayani 55 Surabaya Telp. (031) 834055 Fax. (031) 8439474	Soebandi & Rekan <i>Unqualified opinion</i> Prof. Dr. Soebandi, SE, Ak
19	Koperasi Wanita Kartika Candra	Jl. Raya Pandaan, Bangil Km 2 Kebonwaris Pandaan Pasuruan Telp. (0343) 639750, 639751, 639752,	Sugeng, Sjahriar & Rekan <i>Qualified opinion</i> Drs. P. Ridaryanto, M.Si, Ak Dikecualikan, belum menerapkan PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan;

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI
		Fax. 0343-635531	No. 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aktiva Kontijensi; No. 24 (Revisi) Akuntansi Imbalan Kerja; No. 27 (Revisi) Akuntansi Perkoperasian, tentang pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota.
20	GKP-RI Jawa Timur	Jl. Pasar Besar No. 38 Surabaya Telp. (031) 3533840, 3558439, Fax. (031) 3558441	Santoso & Rekan <i>Unqualified</i> Drs. Santoso, Ak
21	KSP Tunas Artha Mandiri	Jl. Dermojoyo No. 34 Ngajuk, Telp/Fax. (0358) 328914, 321957	Suprihadi & Rekan <i>Unqualified</i> Drs. Suprihadi, Ak
22	KSP Delta Surya Purnama	Jl. Yos Sudarso No. 9 Sidoarjo. Telp. (031) 8951469	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
23	KSP Lestari Mandiri	Jl. Dr.Cipto No. 24 Bedali Lawang, Malang Telp. (0343) 427790	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
24	Koperasi Karyawan Mekar	Jl. Mataram 180 Kediri, Telp. (0354) 690657, 692158, 672135	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
25	Koperasi Karyawan Makna Gotro	Jl. Letjen Sutoyo. 55 Waru Sidoarjo	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
26	Koperasi Karyawan Sekar Karnia	Jl. Terusan Batubara 27-29 Malang Telp. (0341) 491921	Suprihadi & Rekan <i>Qualified</i> Dikecualikan koperasi belum menerapkan PSAK. 46, Akuntansi Pajak. Drs. Suprihadi, Ak
27	Koperasi SAE	Jl. Abdul Manab Kecamatan Malang Telp. 0341-524069, 524204	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
28	KUD Dadi Jaya	Jl. Raya Purwodadi 19 Kec. Purwodadi, Pasuruan, Telp. (0343) 612335, (0341) 426882, Fax. (0343) 612335	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	KAP/ OPINI /TANDA TANGAN OPINI
29	KUD Dau	Jl. Sidomakmur 26 Desa Mulyoagung Kec Dau Telp. (0343) 462521, 460125, Fax. (0341) 4623343	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
30	KPTR Mitra Sejahtera	Kelurahan Pesantren, Kec. Pesantren Kota Kediri Telp/Fax. (0354) 680506	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>
31	Koperasi Muamalah Syari'ah "Istiqomah"	Jl. Dahlia 8 Karangrejo Tuluangagung Telp. 0355-491114	KAP Widartoyo, MM.M.Si, Ak <i>Unqualified opinion</i>

Sumber : Data Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur, 2006

Selanjutnya, secara ringkas data yang diperoleh dan diolah dari penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Perolehan data penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah kuesioner yang disebar	93 kuesiner
2	Jumlah kuesioner yang kembali	93 kuesioner
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
4	Jumlah kuesioner yang diolah	93 kuesioner

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

5.1.1. Deskripsi karakteristik responden

Karakteristik responden merupakan diskripsi dari keberadaan responden yang bekerja sebagai manajer akuntansi dan keuangan. Karakteristik tersebut dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, masa kerja, pekerjaan sampingan, dan hubungan keluarga dengan anggota, pengurus dan pengawas, yang akan dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 5.3. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	Pria	42	45,16
2	Wanita	51	54,84
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Pada tabel 5.3 tersebut dapat dilihat jumlah responden penelitian sebanyak 93 orang, sebagian besar atau 51 orang atau (54,84 %) berjenis kelamin wanita dan selebihnya pria 42 orang atau (45,61 %). Antara wanita dan pria lebih banyak wanita dalam bekerja dibidang akuntansi dan keuangan, karena wanita kecenderungan lebih teliti dan tekun dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan. Disamping itu tingkat kejujuran pada wanita lebih baik dari pada pria, mengingat dalam badan usaha koperasi menekankan kejujuran dan keterbukaan.

Tabel 5.4. Jumlah responden berdasarkan umur

NO	RENTANG UMUR (Tahun)	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	20 – 25	8	8,60
2	26 – 30	19	20,43
3	31 – 35	16	17,20
4	36 – 40	24	25,80
5	41 – 45	13	13,97
6	46 – 50	9	9,68
7	51 – 55	2	2,16
8	56 – 60	0	0
9	61 – 65	2	2,16
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Umur responden berkisar antara 20 sampai dengan 65 tahun, usia yang dominan 36 sampai dengan 40 tahun sejumlah 24 orang atau (25,80 %), dengan

kata lain manajer akuntansi dan keuangan berusia relatif muda. Keadaan menunjukkan bahwa, sifat dari pekerjaan yang menuntut karyawan untuk selalu membutuhkan pengetahuan, ketrampilan yang memadai dan juga menuntut kesehatan yang prima serta mengikuti perkembangan dan meningkatkan kemampuannya untuk selalu berkembang dan tantangan bagi manajer akuntansi dan keuangan.

Tabel 5.5. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13	13,98
2	Program Diploma (D3)	14	15,05
3	Sarjana (S1)	60	64,51
4	Pasca Sarjana (S2)	6	6,46
5	Pasca Sarjana (S3)	0	0
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Berdasarkan tabel 5.5, maka dapat dijelaskan bahwa karyawan bagian akuntansi dan keuangan pada koperasi sebagian besar berpendidikan Sarjana (S₁), sebanyak 60 orang atau (64,51 %) dan berpendidikan Magister (S₂) sejumlah 6 orang atau (6,46 %). Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas karyawan koperasi bagian akuntansi dan keuangan dilihat dari segi pendidikan formal pada pendidikan perguruan tinggi cukup baik.

Tabel 5.6. Jumlah responden berdasarkan jurusan pendidikan

NO	JURUSAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	Akuntansi	48	51,61
2	Keuangan	4	4,30
3	Manajemen	15	16,13
4	Lainnya	26	27,96
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Berdasarkan tabel 5.6, maka dapat dijelaskan, bahwa jumlah pendidikan jurusan akuntansi sebanyak 48 orang atau (51,61 %), jurusan keuangan sebanyak 4 orang atau (4,30 %), jurusan manajemen sebanyak 15 orang atau (16,13 %) dan jurusan lainnya sebanyak 26 orang atau (27,96 %). Sehingga karyawan bagian akuntansi dan keuangan didominasi oleh jurusan akuntansi

Tabel 5.7. Jumlah responden berdasarkan lama kerja di tempat

NO	MASA KERJA (Tahun)	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	2 – 5	40	43,02
2	6 – 10	23	24,74
3	11 – 15	12	12,90
4	16 – 20	11	11,82
5	21 – 25	6	6,45
6	26 – 30	1	1,07
7	31 – 35	0	0
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Berdasarkan tabel 5.7, maka dapat dijelaskan, bahwa masa kerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan didominasi 2 s/d 5 tahun sebanyak 40 orang atau (43,02.%), dimana ini sebagian besar penyusunan laporan keuangan dan bagian akuntansi dilakukan oleh bendahara koperasi dan stafnya.

Tabel 5.8. Jumlah responden berdasarkan pekerjaan lain

NO	PEKERJAAN LAIN	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	Ya	10	10,75
2	Tidak	83	89,25
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Berdasarkan tabel 5.8, maka dapat dijelaskan bahwa bagian akuntansi lebih banyak tidak melakukan pekerjaan lain di luar koperasi sebanyak 83 orang atau (89,25 %), sedangkan sisanya 10 orang atau (10,75 %) mempunyai pekerjaan

lain di luar koperasi. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh responden bervariasi. Variasi pekerjaan antara lain merangkap sebagai pengurus koperasi, bendahara di koperasi lain, karyawan pada perusahaan. Perangkapan ini dimungkinkan karena sebagian responden penelitian ini adalah Koperasi Karyawan.

Tabel 5.9. Jumlah responden berdasarkan hubungan keluarga dengan anggota, pengurus, dan pengawas

NO	HUBUNGAN KELUARGA	JUMLAH (Orang)	PROSENTASE (%)
1	Ya	10	10,75
2	Tidak	83	89,25
	JUMLAH	93	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Berdasarkan tabel 5.9, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus atau pengawas sebesar 89,25%, hanya sebagian kecil yang mempunyai hubungan yaitu sebesar 10,75%. Tidak adanya hubungan ini dapat meningkatkan independensi pekerjaan dari bagian akuntansi.

5.2. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian

Pengujian validitas dibuat kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu dengan menurunkan variabel, indikator penelitian, dekriptor dan nomer item dengan mempedomani pandangan/pendapat para ahli, PSAK, dan teori yang relevan serta kondisi lingkungan badan usaha koperasi sebagaimana lampiran 3 (kisi-kisi penelitian). Pengujian validitas instrumen penelitian sebelum disebarkan kepada responden dilakukan pengujian terlebih dahulu kepada para ahli yang kompeten

dalam bidang perkoperasian. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang (Sugiyono; 2004; 270).

Dalam penelitian ini menggunakan para ahli sebanyak 5 (lima) orang yang kompeten dalam bidang perkoperasian melalui widyaiswara/instruktur yang memberikan materi teknis perkoperasian dan akuntansi koperasi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Adapun orang yang kompeten tersebut adalah :

Tabel 5.10. Daftar Tenaga Ahli Mereview Kuesioner Penelitian

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGALAMAN	KOMPETENSI
1.	Drs. Surachmad. Dm	Widyaiswara Madya Pembina Tk. I (IV/b)	Widyaiswara	Teknis Perkoperasian Akuntansi Koperasi Audit koperasi
2.	Drs. Kusen Asjari	Widyaiswara Madya Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Balai Diklat Koperasi dan PKM, Widyaiswara,	Teknis Perkoperasian Akuntansi Koperasi
3.	Drs. Suhartoyo	Widyaiswara Madya Pembina Tk. I (IV/b)	Widyaiswara,	Teknis Perkoperasian Akuntansi Koperasi Perpajakan
4.	Wijono. SE	Widyaiswara Madya Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Balai Diklat Koperasi, Widyaiswara	Teknis Perkoperasian Akuntansi Koperasi Perpajakan
5.	Drs. Sumito	Widyaiswara Muda Penata Tk. I (III/d)	Auditor KJA Soca Baskara Jatim, Widyaiswara	Akuntansi Koperasi Audit koperasi

Setelah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner direview oleh para ahli yang kompeten tersebut diatas, selanjutnya dilakukan uji coba kepada manajer akuntansi koperasi. Jumlah uji instrumen yang disarankan sekitar 30 orang (Sugiyono; 2004; 272). Dalam kaitan ini penulis melakukan percobaan instrumen

penelitian kepada peserta pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi manajer akuntansi/pengelola administrasi keuangan koperasi sebanyak 49 orang pada pendidikan dan pelatihan akuntansi yang diselenggarakan tanggal 10 s/d 13 Juli 2006 di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 49, kuesioner tidak kembali 1, kuesioner yang kembali sebanyak 48, kuesioner tidak memenuhi syarat/terisi sebanyak 12. kuesioner memenuhi syarat/terisi sebanyak 36. Kuesioner yang diproses adalah yang memenuhi syarat/terisi oleh responden sebanyak 36 kuesioner.

Pengujian validitas dilakukan dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor butir instrumen dengan skor total (Sugiyono; 2004; 272). Adapun hasil uji coba pengujian validitas terdapat pada (lampiran 5 a). Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang tidak memenuhi syarat validitas. Apabila nilai item total correlation kurang dari t tabel untuk (36;5%) sebesar 1,609 (Santoso,2000:277) maka item pertanyaan tersebut tidak diikutkan dalam penelitian sebenarnya. Sehingga jumlah pertanyaan yang masuk dalam kuesioner penelitian selanjutnya adalah sebesar jumlah pertanyaan (akhir) (tabel 5.11). Hasil detil uji validitas dapat dilihat di lampiran 5a.

Tabel 5.11. Validitas Instrumen

Variabel	Jumlah Pertanyaan (awal)	Jumlah Pertanyaan (akhir)	Nilai item total correlation (akhir)
Y	32	13	Signifikan
X1	20	13	Signifikan
X2	4	4	Signifikan
X3	5	5	Signifikan

Sumber: data diolah (2006)

Pengujian reliabilitas instrumen secara internal diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Pengujian reabilitas dengan *internal consistency* dilakukan dengan cara mencoba sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis, dimana hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reabilitas instrumen. Pengujian menggunakan *alfa cronbach*, dimana dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono; 2004; 282). Pada program *SPSS (Statistics Program For Social Science)*, pengujian validitas dan reliabilitas menjadi satu menu (Sugiyono dan Wibowo Eri; 2004; 220). Batasan *alfa cronbach* untuk menentukan reabilitas instrumen adalah harus di atas nilai *r* tabel. Dalam tahap pengujian instrumen awal ini dengan banyaknya responden sebanyak 36 dan tingkat kesalahan sebesar 5% maka *r* tabel adalah sebesar 0,339

Pengujian realibilitas instrumen penelitian, melakukan pengujian model *alfa cronbach*, dimana untuk variabel Y dilakukan pengujian dengan dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan item pertanyaan sejumlah 32 item dan responden 36 orang menghasilkan *alfa cronbach* 0,7355. Tahap kedua menggunakan item pertanyaan 13 dan responden 36 orang menghasilkan *alfa cronbach* 0,8638. Selanjutnya untuk variabel X, juga dilakukan pengujian *alfa cronbach* dengan dua tahap. Tahap pertama menggunakan item pertanyaan

sejumlah 20 item dan 36 responden menghasilkan *alfa cronbach* 0,7852. Tahap kedua menggunakan item pertanyaan sejumlah 13 item dan responden 36 orang menghasilkan *alfa cronbach* 0,8102. Sedangkan untuk variable X_2 dan X_3 dilakukan pengujian dengan model *alfa cronbach* satu tahap karena memenuhi persyaratan (lampiran 5 b)

Adapun ringkasan hasil pengujian realibilitas data untuk keempat variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12. Tabel hasil pengujian reliabilitas

NO	NAMA VARIABEL	CRONBACH ALPHA
1	Implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian (Y)	0,8709
2	Akuntabilitas (X_1)	0,8186
3	Kesulitan Teknis (X_2)	0,8693
4	Kesulitan Pengukuran (X_3)	0,8612
	JUMLAH	

Sumber : Data primer diolah tahun 2006

Didapatkan r tabel (36;5%) adalah sebesar 0,329 bila dibandingkan dengan hasil perhitungan *Cronbach Alpha* seperti seperti tabel diatas terlihat bahwa seluruh variabel adalah diatas r tabel berarti variabel tersebut sudah reliabel untuk dijadikan instrumen.

5.3. Analisa data dan hasil penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda yang menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediksi. Regresi berganda dapat menyajikan hubungan kausalitas dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen

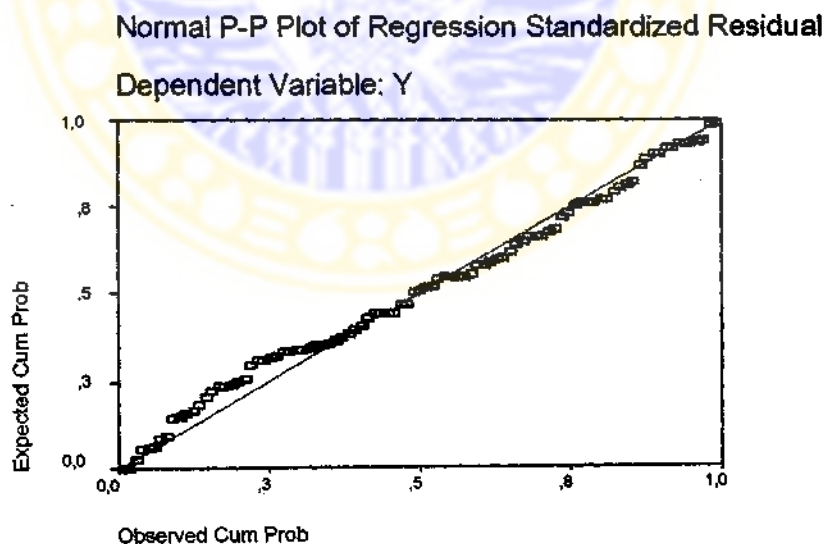
(Sugiyono, 2004:243). Sebelum dilakukan analisis regresi berganda terhadap kedua hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu akan diuji apakah data yang ada telah memenuhi uji asumsi klasik.

5.3.1. Hasil pengujian asumsi klasik

5.3.1.1. Pengujian Normalitas data

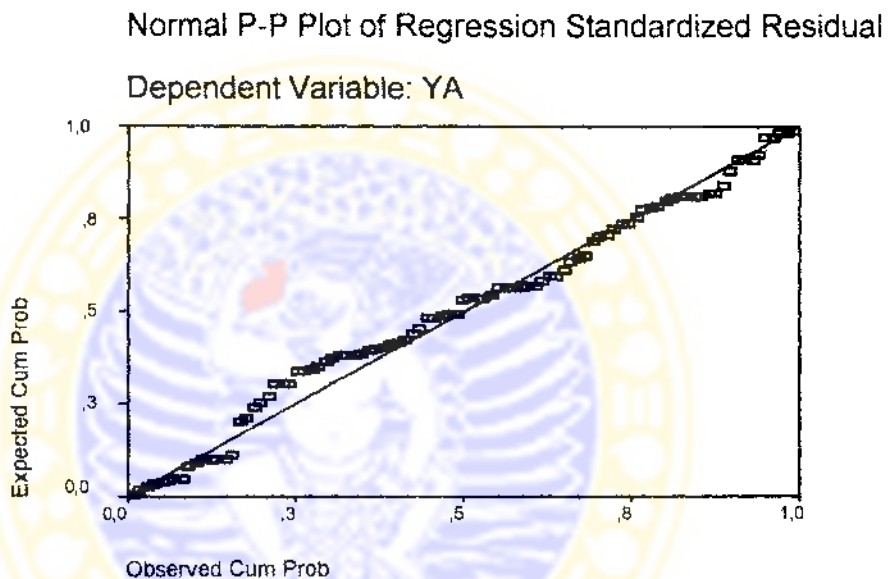
Dalam uji regresi disyaratkan agar data yang digunakan adalah normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat nilai residual pada model regresi yang akan diuji. Jika residusial berdistribusi normal, maka nilai sebaran datanya akan terletak disekitar garis lurus. Berikut ini disajikan yang menunjukkan hasil pengujian normalitas sebaran data yang merupakan output dari program SPSS 10.0.

Gambar 5.1. Hasil pengujian normalitas data persamaan regresi tahap 1



Hasil pengujian normalitas data dilakukan dua tahap: tahap 1 melibatkan 3 variabel yaitu: X_1 , X_2 dan X_3 , dimana dapat dilihat pada *scatterplot*, yang menunjukkan bahwa data variabel berada disekitar garis lurus dan tidak menyimpang terlalu jauh (gambar 5.1).

Gambar 5.2. Hasil pengujian normalitas data persamaan regresi tahap 2



Tahap 2 melibatkan 2 variabel yaitu variabel X_1 , X_2 , hasil yang ditunjukkan dalam *scatterplot* menunjukkan bahwa data berada pada sekitar garis diagonal, artinya data tersebut normal (gambar 5.2).

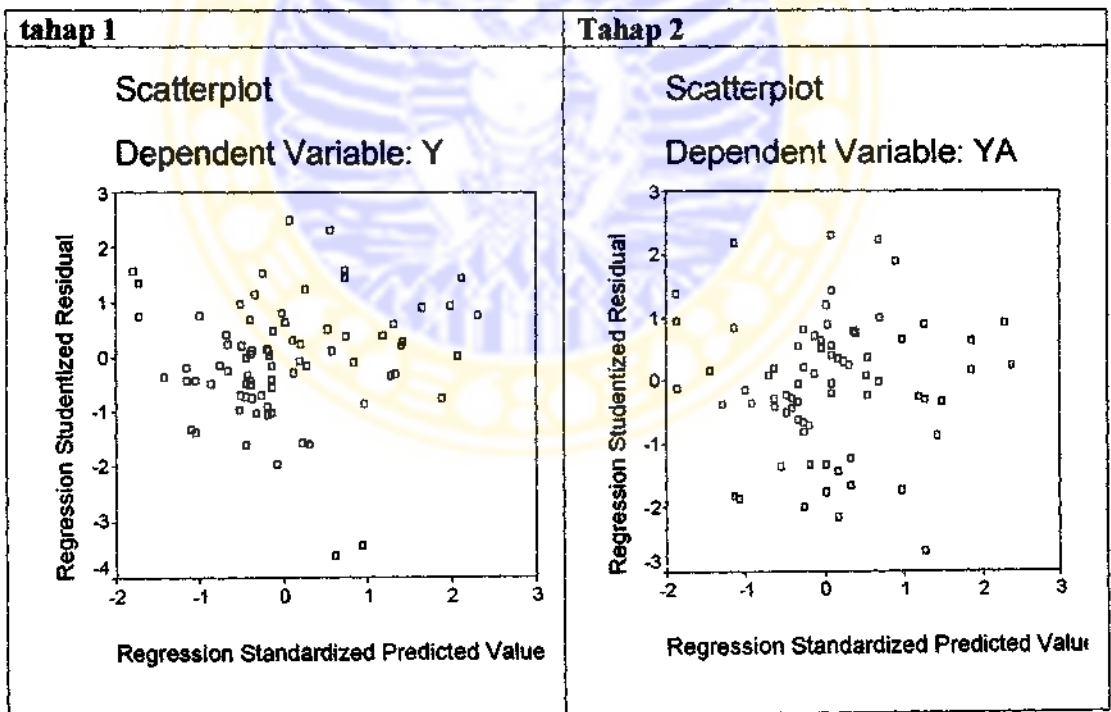
5.3.1.2 Pengujian Autokorelasi

Data penelitian tidak menggunakan data time series, sehingga uji autokorelasi tidak diperlukan. Penelitian ini menggunakan data cross section yang didapatkan dari penyebaran kuesioner.

5.3.1.3 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat dari hasil *scatterplot* yang menggambarkan adanya data yang menyebar. Hasil uji dari model tahap 1 dan tahap 2 menunjukkan bahwa hasil *scatterplot* menunjukkan data menyebar diantara angka 0 pada sumbu Y artinya tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso; 2000; 210)

Gambar 5.3. Hasil pengujian heteroskedastisitas data persamaan regresi tahap 1 dan 2



5.3.1.4 Pengujian Gejala Multikolinieritas.

Mendeteksi Multicollinearity dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain uji R^2 , korelasi Pair-wise, uji korelasi parsial, regresi Auxiliary, Condition Index dan Variance Inflation Factor (Gujarati, 1995). Penelitian ini menggunakan uji Tolerance dan Variance Inflation Factor. $TOL = (1/VIF)$; VIF dapat diperoleh dengan menggunakan program komputer SPSS, yang nantinya digunakan untuk menghitung TOL. TOL mendekati nol (0) maka terdapat multikol. Bila VIF melebihi 10 maka terdapat multikol (Gujarati, 2003). Cara kedua untuk memastikan tidak terjadi multikolinieritas adalah melihat korelasi antar variabel (uji korelasi parsial) harus dibawah 0,5 (korelasi lemah) (Santoso; 2000; 207). Hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13. Tabel hasil pengujian multikolinieritas tahap 1

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,939	1,065
	X2	,504	1,983
	X3	,501	1,995

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X3	X1	X2
1	Correlations	X3	1,000	-,112	-,685
		X1	-,112	1,000	-,083
		X2	-,685	-,083	1,000
	Covariances	X3	,004	-,001	-,002
		X1	-,001	,006	,000
		X2	-,002	,000	,003

a Dependent Variable: Y

Hasil tahap 1 menunjukkan bahwa nilai tolerance dan VIF jauh dari nilai 10, artinya tidak ada gejala multikol. Akan tetapi bila dilihat dari uji korelasi parsial

memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara variabel X_2 dan X_3 (di atas $0,685 > 0,5$). Sehingga dapat disimpulkan dari hasil ini terjadi multikolinieritas. Untuk menghilangkan adanya multikolinieritas, maka menurut Santoso (2000; 207) menyarankan untuk mengeluarkan salah satu variabel.

Tabel 5.14. Tabel hasil pengujian multikolinieritas tahap 2

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,966	1,035
	X2	,966	1,035

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X2	X1
1	Correlations	X2	1,000	-,184
		X1	-,184	1,000
	Covariances	X2	,002	-,001
		X1	-,001	,009

a Dependent Variable: Y

Hasil dari pengujian tahap 2 menunjukkan tolerance dan VIF masih dibawah 10 dan nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa antara X_1 dan X_2 kecil yaitu sebesar $-0,184$ masih dibawah $0,5$. Artinya pada tahap kedua ini tidak terjadi multikolinieritas. Variabel X_3 dibuang dari pengujian ini karena dari nilai signifikansi regresi, X_3 tidak signifikan.

5.3.2. Hasil pengujian Hipotesis

Alat statistik yang digunakan yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda, yaitu *Multiple Regression Analysis (MRA)*. Analisis terhadap hipotesis akan disajikan sebagai berikut :

5.3.2.1. Pengujian simultan variabel X_1 , X_2 , dan X_3 menggunakan Statistik Uji F

Hasil analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik uji F dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.15. Hasil pengujian regresi tahap 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,593(a)	,352	,330	,50163

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,161	3	4,054	16,109	,000(a)
	Residual	22,395	89	,252		
	Total	34,556	92			

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

Tabel 5.16. Hasil pengujian regresi tahap 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,571(a)	,326	,311	,50863

a Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,273	2	5,524	21,786	,000(a)
	Residual	23,283	90	,241		
	Total	34,556	92			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Tujuan hipotesis dengan menggunakan uji statistik F untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan atas akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.

Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan koefisien determinasi (R^2) yang berguna untuk mengukur ketepatan dari analisis regresi berganda. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya variasi sumbangan dari seluruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel tidak bebas Y. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.15 nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 33,0% yang berarti bahwa variabel-variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas(X_1), kesulitan teknis (X_2) dan kesulitan pengukuran (X_3) mempunyai sumbangan 33,7% terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, sedangkan sisanya 67,0% berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Sehubungan dengan variabel kesulitan pengukuran (X_3) yang tidak dimasukkan dalam analisis ini karena terjadi multikolinieritas. Hasil regresi pada bagian kedua (tabel 5.16) nilai koefisien determinasi(R^2) adalah sebesar 31,1% yang berarti bahwa variabel-variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas dan kesulitan teknis mempunyai sumbangan 31,1% terhadap implementasi PSAK No.

27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, sedangkan sisanya 68,9% berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model

Hasil analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.16 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 21,786 dengan signifikansi $\alpha = 0,00$ karena kriteria hipotesis yang tidak dapat ditolak jika nilai sig $F \leq 0,05$ dan ternyata hasil perhitungan menunjukkan signifikansi sebesar 5%, maka H_0 ditolak yang berarti *terdapat pengaruh simultan yang signifikan atas akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian.*

5.3.2.2. Pengujian parsial/individual variabel X_1 , X_2 , X_3 menggunakan Uji Statistik Uji t

Untuk mengetahui sejauhmana masing-masing variabel X [akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran] mempengaruhi secara parsial terhadap variabel Y [implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No, 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian], maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.17. Tabel Signifikasi nilai t tahap 1

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,155	,306		3,775	,000
	X1	,329	,084	,345	3,919	,000
	X2	,123	,066	,222	1,884	,063
	X3	,139	,074	,221	1,879	,064

a Dependent Variable: Y

Hasil regresi memperlihatkan bahwa variabel X_2 dan X_3 tidak signifikan karena lebih dari $\alpha=0,05$. Selain itu, karena dari hasil uji asumsi, antara X_3 terjadi multikolinieritas, maka X_3 dipilih untuk tidak dimasukkan dalam analisis regresi.

Tabel 5.18. Tabel Signifikasi nilai t tahap 2

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,193	,309		3,853	,000
	X1	,344	,085	,360	4,058	,000
	X2	,206	,049	,371	4,176	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi memperlihatkan bahwa X_1 dan X_2 adalah signifikan. Hasil uji t memperlihatkan bahwa *secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan atas masing-masing variabel akuntabilitas dan kesulitan teknis terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian*.

Berdasarkan Tabel 5.17 dan 5.18, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (X_1) mempunyai nilai sig t tahap 1 sebesar 0,00% dan tahap 2 0,00%, sedangkan signifikasi yang dapat diterima harus dibawah $\alpha=5\%$ berarti *secara parsial variabel akuntabilitas mempengaruhi secara signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998)*.
2. Kesulitan teknis (X_2) mempunyai nilai sig t tahap 1 sebesar 0,63.% dan tahap 2 sebesar 0,00% sedangkan signifikasi yang dapat diterima dibawah $\alpha=5\%$

berarti secara *parsial variabel kesulitan teknis mempengaruhi secara signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998)*.

3. Kesulitan Pengukuran (X_3) mempunyai nilai sig t sebesar 0,64 %, sedangkan signifikansi yang dapat diterima dibawah $\alpha=5$ % berarti *secara parsial kesulitan pengukuran mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998)*.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Pengujian hipotesis secara simultan variabel X_1 , X_2 berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27

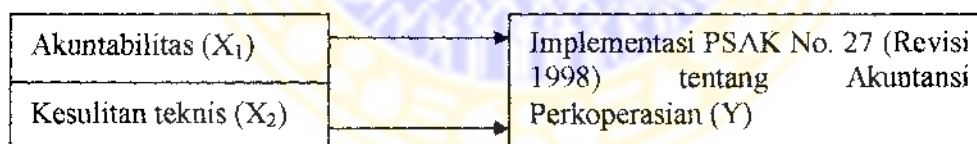
Model regresi ini menunjukkan angka R sebesar 0,571, artinya korelasi/hubungan antara X_1 , X_2 dengan implementasi PSAK 27, cukup moderat. Demikian juga dengan besar adjusted R square 31,1% berarti besarnya kemampuan model untuk menjelaskan pengaruh hanyalah sebesar 31,1%.

Secara simultan model dapat dipergunakan adalah :

$$Y = 0,360 X_1 + 0,371 X_2$$

Koefisien dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa antara X_1 dan X_2 mempunyai pengaruh yang sama terhadap Y (implementasi PSAK 27). Model ini secara gambar adalah sebagai berikut:

Gambar 6.1. Model penelitian – Hubungan Variabel (final)



6.1.1 Laporan Promosi Ekonomi Anggota tidak dibuat

Pada umumnya responden tidak membuat laporan promosi ekonomi anggota. Tidak dibuatnya laporan ini dipengaruhi oleh kesulitan teknis dalam operasi koperasi. Sebagai gambaran ada koperasi yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang bahkan sampai mencapai 15.000, sebagai contoh : (a) Koperasi

Karyawan Mekar dengan anggota sejumlah 26.879 orang, (b) Koperasi Karyawan Sampoerna sejumlah 23.102 orang dan (c) Koperasi Wanita Kartika Candra sejumlah 10.587 orang. Apabila anggota ini melakukan transaksi di koperasi sangat sulit untuk mencatatnya karena banyaknya anggota. Selain itu manajemen koperasi tidak terlalu memandang perlu adanya peningkatan dalam sistem informasi yang berbasis komputer. Walaupun secara laporan keuangan. Mereka berpikir yang penting melayani anggota tetapi pencatatan transaksi khusus untuk anggota tidak pernah dilakukan, namun menjadi satu/campur dengan transaksi dengan non anggota atau bukti transaksi tidak dipisahkan (tidak dibuat khusus).

Tidak dibuatnya laporan promosi anggota ini memang mengherankan, karena sebagian besar responden dari bagian akuntansi adalah mempunyai pendidikan mengenai akuntansi (51,61%) (tabel 5.6). Selain itu responden yang berpendidikan sarjana sebesar 64,51%. Kondisi tidak dibuatnya laporan bila dilihat dari lamanya responden bekerja adalah lebih dari 2 tahun di bagian tersebut. Arah dari penyebaran kuesioner adalah responden yang mengisi kuesioner adalah mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun sudah berpendidikan tinggi namun dalam menyiapkan laporan keuangan tidak terlalu memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku bagi Koperasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa bagian akuntansi koperasi bekerja sebagaimana lazimnya telah dipraktekkan (*as usual*).

6.1.2 Laporan Promosi Ekonomi Anggota: Akuntabilitas VS Kesulitan Teknis

Walaupun koperasi telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No, 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang meliputi neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan perubahan ekuitas (lampiran 1 dan 2). Namun laporan perhitungan hasil usaha belum disajikan secara terpisah antara pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota sebagaimana contoh hasil opini audit pada Koperasi Wanita Candra, Pasuruan yang diaudit oleh KAP Sugeng, Sjahriar & Rekan. Tidak disajikannya laporan perhitungan hasil usaha secara terpisah antara pendapatan dan beban atas partisipasi anggota non anggota menyebabkan akuntabilitas pengelolaan koperasi masih belum mencerminkan tata kelola yang baik pada badan usaha koperasi.

6.2. Pengujian hipotesis akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27

X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap implementasi PSAK 27. Pertanggungjawaban pengurus dari laporan keuangan yang dibuat atau disajikan sebagai bahan rapat anggota tahunan hanya memuat komponen laporan keuangan yaitu: neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, tanpa menyajikan laporan promosi anggota sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 27. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 paragraf 74,

bahwa "laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan". Namun pengurus/manajemen koperasi hanya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 6 menyatakan bahwa "manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan" dan pada paragraf 7 menyatakan "laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan".

Atas dasar hal tersebut diatas, maka pengurus/manajemen koperasi belum menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik pada badan usaha koperasi, sehingga akuntabilitas pengelolaan koperasi masih belum sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip perkoperasian, yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, berbunyi "tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

Sedangkan pasal 5 prinsip-prinsip koperasi :

"(a) keanggotaan sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pemberian balas jasa terbatas pada modal, (e) kemandirian, (f) pendidikan perkoperasian dan (g) kerjasama antar koperasi"

Disamping itu juga dalam PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 02 menyatakan "prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat". Disamping itu juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 menyatakan :

"pada kenyataannya meskipun sebagian besar koperasi telah menyelenggarakan akuntansi, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip koperasi yang berlaku, hal ini antara lain disebabkan belum dapat dipahaminya penerapan prinsip koperasi dalam akuntansi yang sesuai dengan karakteristik koperasi"

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang wajib disajikan oleh pengurus koperasi dan akuntan publik pada laporan auditan, dimana laporan tersebut berguna untuk mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Manfaat ekonomi tersebut berguna untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan terutama anggotanya tentang kontribusi koperasi kepada anggota dalam memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, dimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang menyatakan bahwa secara umum tujuan koperasi adalah menciptakan kesejahteraan kepada anggotanya. Kesejahteraan yang diperoleh anggota koperasi atas lembaga koperasinya tidak hanya diperoleh/diukur dari sisa hasil usahanya saja, namun juga manfaat dari pelayanan yang diberikan atas usaha yang diciptakan koperasi, misalnya pada usaha waserda koperasi memberikan harga suatu barang ternyata harganya lebih rendah dari harga toko disekitarnya, sehingga koperasi memberikan manfaat ekonomi atas selisih harga tersebut.

Laporan promosi ekonomi anggota bilamana dapat disajikan akan dapat memberikan informasi peran dan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dimana ini sesuai dengan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkoperasian.

6.3. Pengujian hipotesis kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27

X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y artinya kesulitan teknis berpengaruh terhadap implementasi PSAK 27. Kesulitan teknis dalam memisahkan transaksi antara anggota dan non anggota berpengaruh terhadap implementasi pada PSAK ini. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 dalam paragraf 33 menyatakan "sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan usaha koperasi", serta paragraf dalam paragraf 76 yang berbunyi "perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota"

Dengan koperasi tidak memisahkan antara transaksi anggota dan non anggota maka secara teknis akan sulit untuk menyajikan laporan promosi anggota sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK.

6.4. Pengujian hipotesis kesulitan pengukuran berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 27

X_3 tidak berpengaruh terhadap Y artinya Kesulitan pengukuran tidak berpengaruh terhadap implementasi PSAK27. Variabel X_3 ini tidak memenuhi uji asumsi klasik untuk uji multikolinieritas. sehingga variabel X_3 tidak dimasukkan dalam uji secara simultan maupun secara parsial akhir.

6.5. Hasil wawancara masalah laporan promosi ekonomi anggota

6.5.1. Hasil wawancara dengan Edi Darmawan, Manajer Akuntansi Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Surabaya dan mantan auditor Koperasi Jasa Audit Soca Baskara Jawa Timur bahwa :

- a. Menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota membutuhkan biaya, tenaga yang cukup besar karena harus membuat transaksi antar masing-masing anggota, dimana anggota banyak mencapai ± 15.000 orang.
- b. Informasi laporan promosi ekonomi anggota yang menyangkut : manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha berguna untuk pihak lain misalnya untuk pemerintah guna memperoleh informasi manfaat ekonomi dengan adanya koperasi, dimana ini sesuai dengan tujuan koperasi sesuai dengan PSAK 27 pada paragraf 03 huruf d bahwa "tujuan pokok badan usaha koperasi menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota

(promotion of the member's welfare)” dan dinyatakan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 3, menyatakan bahwa tujuan koperasi ”memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

- c. Akuntan dalam memberikan opini atas laporan hasil auditnya telah mempertimbangkan bahwa, informasi laporan promosi ekonomi anggota dipandang tidak material, sehingga auditor tidak mengungkapkan dalam opininya tentang penyajian laporan promosi ekonomi anggota. Walaupun ada beberapa auditor menganggap bahwa tidak adanya laporan tersebut adalah material, sehingga dalam opininya memberi pengecualian atas tidak diungkapkan laporan tersebut.
- d. Untuk menyusun laporan promosi ekonomi anggota diawali dengan transaksi yang harus mencatatkan harga barang tertentu untuk usaha perdagangan/pertokoan dan bunga tertentu untuk usaha simpan pinjam/jasa keuangan dan harga/bunga ini selalu berubah-ubah, sehingga harga mana yang harus dipakai.

6.5.2. Hasil wawancara dengan Markaban auditor Kantor Akuntan Publik

Widartoyo, MM,M.Si, Ak, bahwa :

- a. Untuk menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota dalam bukti transaksi (faktur pembelian/penjualan kepada anggota) tidak

- mencantumkan harga diluar koperasi, sehingga tidak membandingkan dengan harga diluar koperasi,
- b. Auditor dalam memberikan pendapat atas laporannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang tidak mewajibkan entitas untuk menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, sehingga laporan promosi ekonomi anggota dipandang tidak material dan tidak dijadikan dasar serta tidak diungkapkan dalam laporan audit.
 - c. Anggota selaku pemilik koperasi tidak memerlukan informasi laporan promosi ekonomi anggota, namun lebih banyak memerlukan informasi tentang sisa hasil usaha koperasi, dimana sisa hasil usaha ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi akan dibagikan kepada anggota.

Hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa aktivitas pelaporan khususnya laporan promosi ekonomi anggota (LPEA) dirasakan kurang bermanfaat. Beberapa akuntan melihat bahwa tidak adanya LPEA bukan merupakan laporan yang material sehingga dalam opininya tidak memberikan catatan atas tidak adanya laporan LPEA. Sebagian akuntan yang lain memberikan pengecualian karena tidak dibuatkan LPEA. Hal ini menunjukkan bahwa di antara akuntan sendiri tidak mempunyai kesamaan pandang. Padahal dalam PSAK No. 27 telah ditegaskan bahwa koperasi harus membuat LPEA.

Beberapa komentar tentang kegunaan LPEA pernah ditanyakan oleh akuntan yaitu untuk siapa LPEA dibuat. Sebenarnya komentar seperti tidak perlu

ada karena jiwa koperasi ingin menyejahterakan para anggotanya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, maka LPEA semestinya dibuat. Harapannya dengan adanya LPEA, koperasi dapat melihat sejauhmana koperasi bermanfaat bagi para anggota.

Komentar lain yang sangat pelik untuk dijawab adalah seberapa besar manfaat informasi LPEA terhadap pengambilan keputusan. LPEA sebagaimana dijelaskan di atas hanya menyajikan seberapa besar manfaat koperasi kepada para anggota koperasi. Laporan tersebut mengisyaratkan deskripsi dari fungsi pelayanan koperasi. Tetapi bila ditanyakan lebih lanjut, LPEA digunakan untuk mengambil keputusan apa?. Maka inilah yang menjadi masalah. Ketidakjelasan fungsi informasi LPEA ini, maka beberapa akuntan tidak menganggap material adanya laporan tersebut walaupun telah diamanatkan dalam PSAK No. 27..

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK no. 27(Revisi 1998). Variabel kesulitan pengukuran pengaruhnya tidak signifikan. Model dari penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 31,1% terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) artinya 68,9% masih dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
2. Akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap implementasi PSAK 27, dimana ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha koperasi belum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku bagi badan usaha koperasi yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam paragraf 02 PSAK No. 27 telah diamanatkan tentang prinsip koperasi yang harus menjadi landasan koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. LPEA merupakan bentuk laporan yang dibuat untuk mengakomodasi tujuan dan prinsip-prinsip koperasi ini.

Laporan promosi ekonomi anggota harus dapat menampilkan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*), dimana tujuan kualitatif yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan dalam ukuran-ukuran kuantitatif dan dapat nilai

dengan satuan uang (Kementerian Koperasi dan UKM RI:2003;5). Tujuan dapat diwujudkan, misalnya dalam usaha simpan pinjam, melalui bentuk selisih bunga, biaya administrasi dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

3. Kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Tidak dipisahkannya pendapatan dan beban atas dasar partisipasi anggota dan non anggota, akan menyulitkan dalam menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, sehingga hambatan teknis menjadi penyebab implementasi PSAK No. 27 dimaksud. Atas dasar laporan audit dari 31 koperasi yang mengungkapkan bahwa pengurus tidak menyusun dan menyajikan dalam perhitungan hasil usaha memisahkan pendapatan dan beban atas dasar partisipasi anggota dan non anggota sebanyak 1 koperasi dan 30 koperasi tidak diungkapkan hal dimaksud dalam laporan auditnya. Dengan demikian pengurus/manajemen koperasi tidak merespon penyusunan dan penyajian laporan perhitungan hasil usaha bersumber dari pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota, sehingga menunjukkan akuntabilitas pengelolaan usaha koperasi belum optimal sesuai dengan karakteristik badan usaha koperasi
4. Dalam melakukan implementasi PSAK No. 27 terdapat persepsi yang berbeda baik diantara manajer koperasi dan akuntan publik, dimana ini dapat ditunjukkan dari ragam opini audit, ada yang memadamang bahwa informasi laporan promosi ekonomi anggota cukup material, sehingga auditor perlu mengungkapkan dalam opini auditnya, yaitu pendapat wajar

dengan pengecualian (*qualified*). Disamping itu juga ada akuntan publik yang memadamkan bahwa informasi laporan promosi ekonomi anggota tidak cukup material, sehingga laporan auditnya memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*). Dari laporan audit sebanyak 31 koperasi, yang mengungkapkan laporan promosi ekonomi anggota tidak disusun dan disajikan oleh pengurus/manajemen sebanyak 1 (satu) koperasi dalam laporan auditnya dan yang tidak mengungkapkan dalam laporan auditnya sebanyak 30 koperasi. Dengan demikian bahwa akuntan publik dan pengurus/manajemen koperasi tidak merespon secara positif kehadiran PSAK 27.

7.2. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terbuka untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel yang lain. Beberapa penelitian berikutnya seperti:

1. Seberapa besar manfaat laporan promosi ekonomi anggota. Karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tidak membuat laporan tersebut, padahal PSAK No. 27 telah mengamanatkan koperasi untuk membuatnya.
2. Seharusnya dibuat interpretasi terhadap PSAK No. 27 ini, khususnya secara detil membahas LPEA. Anggapan LPEA yang dianggap tidak material bertolak dari tidak dipahaminya prinsip-prinsip koperasi. Sehingga beberapa akuntan menganggap tidak penting.

3. Untuk benar-benar menerapkan PSAK No. 27 dengan baik, maka sosialisasi maupun pelatihan baik terhadap koperasi maupun akuntan yang memeriksa koperasi perlu dilakukan. Hal ini akan menunjang terbentuknya manajemen koperasi yang lebih baik.
4. Kesulitan teknis dalam menerapkan LPEA sangat terkait dengan sistem informasi dalam manajemen koperasi. Tidak adanya dukungan teknologi informasi mengakibatkan penciptaan database transaksi per anggota dirasakan sangat sulit. Karena sangat tidak mungkin untuk melakukan pencatatan transaksi yang besar dengan cara-cara manual.

7.3. Saran untuk penelitian berikutnya

1. Penelitian ini tidak mencakup informasi mengenai kegunaan LPEA. Seberapa besar manfaat LPEA dalam penelitian ini telah menimbulkan persepsi yang berbeda di antara para auditor yang memeriksa laporan keuangan koperasi. Dari hal ini, penelitian berikutnya dapat membahas masalah ini lebih mendalam, sehingga benar-benar dapat diketahui kegunaan informasi dari LPEA dari setiap pengguna laporan keuangan koperasi.
2. Responden dari penelitian ini hanya ditujukan untuk bagian akuntansi koperasi. Akan lebih luas pembahasannya bila melibatkan akuntan publik yang melakukan audit di koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih melihat interaksi akuntan sebagai pihak independen, menilai laporan keuangan koperasi. Hal ini dilandasi hasil temuan dari penelitian ini yang

menunjukkan bahwa akuntan publik yang memeriksa koperasi mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menilai keberadaan laporan keuangan sesuai PSAK No. 27.



DAFTAR PUSTAKA

- _____ 2004, *Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi.*
- _____, 2000, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 19/KEP/M/II/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- _____, 2000, Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- _____, 2001, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- _____, 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- _____, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001, Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2002, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi.
- _____, 2003, *Pedoman Akuntansi Koperasi simpan pinjam*
- _____, 2004, *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Koperasi.*
- _____, 2007, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
- _____, 2003, *Pedoman Akuntabilitas Sesuai Karakteristik Koperasi.*
- _____, 2003, *Pedoman Klasifikasi Koperasi.*
- Adianto, 2004, *Pengaruh Motivasi, Kekuasaan, dan Orientasi Resiko terhadap Keterbukaan dan Fleksibilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemurunan Nilai Aktiva*, Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya, *Unpublication*
- Awat, Napa J, 1995, *Metode Statistik dan Ekonometri*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.

- Chalimi, Abid, 1998. *Riset Terapan Akuntansi : Evaluasi Sistem Akuntansi Koperasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Khusus Akuntansi Untuk Koperasi (Studi Kasus pada KUD Tani Stemen-Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Unpublication.
- Dukat, Erwan, 1987. *Konsep Dasar dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan Perusahaan Bisnis-APB No. 4*.
- Faharani, Raihan, 2004. *Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Lugas" Sidoarjo*, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, Unpublication.
- FASB (Financial Accounting Standard Board); 1998 Statement of Financial No. 2
- Gujarati, Damodar N., 2003, *Basic Econometrics*, 4th International edition, McGraw-Hill International.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1994. *Teori Akuntansi : Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004*, Salemba Empat, Jakarta
- Jusuf, Abadi Abadi. 2003, *Auditing : Pendekatan Terpadu Arcns & Loebbecke*, Edisi Indonesia, Salemba Empat Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd, Prentice-Hall, Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2001, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Koperasi Jasa Audit (KJA) Soca Baskara Jawa Timur, 2002. *Pelatihan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Koperasi Karyawan Sampoerna, 2006, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pemeriksaan Pengawas Tahun Buku 2005*, Unpublication.
- Kuncoro, Mudrajad.; 2003; *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana meneliti & menulis tesis ?*; Erlangga, Jakarta
- M. Echols, John; Shadily, Hasan; 1975; *Kamus Inggris Indonesia*; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mude, Jusman, 2002, *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Unit Desa Karangploso Malang*, Skripsi, Universitas Islam Malang.
- Riduwan; 2005; *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*; Alfabeta, Bandung
- Sahid, 2002, *Akuntansi Lingkungan Info Jakstra; Good Governance*.
- Santoso, Singgih; 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Scott, Willian R, *Financial Accounting Theory*, 3 edition, 2003, Toronto, Prentice Hall.
- Sugiyono; 2004; *Statistika Untuk Penelitian*; Alfabeta, Bandung
- Sugiyono; Wibowo Eri; 2004; *Statistik untuk Penelitian dan aplikasinya dengan SPSS 10.0 for windows*; Alfabeta, Bandung.
- Suwarjono, 2005, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi III, BPFE Yogyakarta
- Tim Prima Pena; tanpa tahun; *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*; Gramedia Press, Jakarta.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja, Tunggal; 2002, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo
- Widartoyo, 2003, *Akuntabilitas anggota koperasi melalui laporan keuangan*,
- Widodo, Joko, 2002, *Good Governance dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya

Lampiran 1 : Daftar kisi – kisi penelitian

VARIABEL		INDIKATOR PENELITIAN	DESKRIPTOR	NO. ITEM
1		2	3	4
Akuntabilitas (X ₁)	1	Penyelenggaraan Rapat Anggota	Rapat anggota dilaksanakan sesuai peraturan/pedoman	1
	2	Pemberitahuan kepada anggota jadwal rapat	Jadwal rapat anggota diberitahukan dalam waktu yang cukup	2
	3	Mendorong anggota menghadiri rapat anggota	Semua unsur pengurus dan pengawas mendorong untuk mengikuti Rapat anggota	3
	4	Pelibatan anggota dalam untuk keputusan strategis	Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dalam mengambil keputusan strategis, misal perubahan anggaran dasar, melakukan investasi yang cukup material.	4
	5	Penyajian laporan keuangan sesuai pedoman	Manajer akuntansi dan keuangan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berpedoman PSAK No. 27	5
	6	Pelaporan keuangan tepat waktu	Pengurus/manajemen koperasi melaporkan keuangan kepada anggota melalui rapat anggota	6
	7	Informasi non keuangan dapat diakses anggota	Tersedia informasi secara berkala	7
	8	Pemberian kesempatan anggota untuk membaca laporan keuangan	Laporan keuangan dikirim kepada anggota untuk bahan RAT dalam waktu relatif cukup	8
	9	Anggota mempunyai kesempatan menyampaikan hak suaranya melalui rapat anggota	Pengurus koperasi tidak membatasi hak suaranya kepada anggota	9
	10	Anggaran dasar memuat hak anggota	Hak-hak anggota termuat dalam anggaran dasar koperasi	10
	11	Koperasi memiliki anggaran rumah tangga	Koperasi menjabarkan anggaran dasar dalam anggaran rumah tangga	11
	12	Koperasi memiliki peraturan khusus	Untuk mengatur tatalaksana dan organisasi koperasi menyusun peraturan khusus koperasi	12
	13	Pedoman Operasional Baku (POB) dimiliki, sebagai penjabaran anggaran dasar dan	Koperasi menyusun pedoman operasional baku, untuk mengatur	13

	anggaran rumah tangga mengatur mekanisme pelaksanaannya.	mekanisme pelaksanaan		
14	Pedoman etika dan tingkah laku anggota, pengurus, pengawas dan karyawan	Tersedia pedoman etika tingkah laku anggota, pengurus, pengawas dan karyawan	14	
15	Penyelenggaraan rapat pengurus, pengawas dan karyawan secara tertib serta dibuat berita acara	Rapat pengurus, pengawas dan karyawan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali dan ada berita acara	15	
16	Kompetensi pengurus, pengawas dan karyawan memadai	Tersedia SDM yang mempunyai kompetensi	16	
17	Meminimalkan benturan kepentingan pengurus, pengawas dan karyawan	Melakukan rapat antara pengurus, pengawas dan karyawan	17	
18	Auditor interen kompeten dan memadai	Koperasi mempunyai bagian satuan pengendalian intern	18	
19	Penilaian kinerja karyawan	Pengurus melakukan penilaian kinerja karyawan secara periodik	19	
20	Koperasi mempunyai visi, misi dan rencana strategi	Visi, misi dan rencana strategi disusun dan disyahkan rapat anggota	20	
Kesulitan teknis (X₂)	1	Bukti partisipasi anggota (faktur pembelian barang/ jasa dari anggota)	Tersedia faktur pembelian barang/ jasa dari anggota dibuat secara khusus	1
	2	Bukti partisipasi anggota (faktur penjualan barang/ jasa kepada anggota)	Tersedia faktur penjualan barang/ jasa kepada anggota dibuat secara khusus.	2
	3	Bukti partisipasi anggota	Tersedia bukti penerimaan kas dibuat secara khusus untuk anggota terpisah dengan non anggota.	3
	4	Slip partisipasi anggota (pembayaran cicilan pinjaman)	Tersedia slip pembayaran cicilan pinjaman anggota yang terpisah dengan non anggota	4
Kesulitan pengukuran (X₃)	1	Menentukan rata-rata harga barang dipasar setiap bulan (manfaat ekonomi pengadaan barang)	Menetapkan rata-rata harga jual per item produk yang dijual perusahaan diluar koperasi	5
	2	Menentukan rata-rata harga barang dipasar setiap bulan (manfaat ekonomi pemasaran barang)	Menetapkan rata-rata harga jual per item produk yang dilakukan oleh perusahaan diluar koperasi	6

3	Menentukan rata-rata harga jasa dipasar setiap bulan (manfaat penyediaan jasa)	Menetapkan rata-rata harga jasa tertentu perusahaan diluar koperasi dalam pelayanan jasa kepada anggota	7
4	Menentukan rata-rata suku bunga di pihak lain/bank (manfaat ekonomi dari simpan pinjam)	Menetapkan rata-rata suku bunga bank/pihak lain setiap bulan	8
5	Buku pembantu promosi ekonomi anggota	Tersedia buku bantu promosi ekonomi anggota yang mencatat harga jual per item produk/jasa/bunga rata-rata perusahaan diluar koperasi	9



Lampiran 2 : Daftar kuesioner**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL****PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA****KUESIONER PENELITIAN****PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS DAN
KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR. 27 (REVISI 1998)
TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN****Oleh :****SUTARTO-090410703L****(Mahasiswa Program S2 dan Kepala Seksi Program & Pengajaran
UPTD Balai Diklat Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur)**

Yang terhormat :
Bapak/Ibu Saudara responden
Di –

TEMPAT

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan kuesioner rangkap 3, dimohon masing-masing dapat diisi oleh para manajer/kepala bagian akuntansi atau keuangan.

Terima kasih kesediaan Bapak/Ibu/Saudara atas pengorbanan baik waktu dan pikiran yang digunakan mengisi daftar pertanyaan ini demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan Perkoperasian di Jawa Timur dan bahkan secara nasional.

Kami mohon jawaban menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara sesuai dengan keadaan nyata koperasi tempat bekerja. Jawaban mohon agar diisi semua dan tanpa perlu mencatumkan nama pribadi atau nama koperasi tempat bekerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk thesis S2 dalam rangka pengembangan ilmu pada dunia akademis. Disamping itu juga untuk memahami praktek akuntansi koperasi di lapangan.

Dalam penyusunan thesis ini dengan pembimbing

Dra. Isnalita, M.Si, Ak

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, mohon pertanyaan dijawab secara keseluruhan. Apabila diperlukan informasi tambahan dapat menghubungi kami :

Sutarto, HP. 0815.5332.5731
K. 0341-496776, R. 031-8471631
Siwalankerto Timur III/6 Surabaya.

Apabila telah diisi kami mohon dapat menghubungi kami via sms/telp tersebut diatas, ***kami akan mengambil kuesioner tersebut sekaligus kami akan memberikan kenang-kenangan *souvernir**** sebagai tanda ucapan terima kasih.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara atas bantuannya untuk mengisi kuesioner ini diucapkan terima kasih.

Surabaya, Juli 2006

Hormat kami,

Sutarto
Mahasiswa Magister Akuntansi
Universitas Airlangga Surabaya

Gambaran penelitian :

Penelitian ini didasari sebuah teori agen dan akuntabilitas, bahwa dalam teori *agent* manajemen (*agent*) diberikan mandat untuk mengelola perusahaan atas kepercayaan pemilik (*principal*). Pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pengurus/manajemen (*agent*), sehingga dalam kondisi ini terdapat keterpisahan antara pemilik (*principal*) dan pengurus/manajemen. Dalam kondisi ini pengurus/manajemen wajib melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan usaha tersebut kepada pemilik/anggota, dimana badan usaha koperasi dilakukan melalui forum rapat anggota. Laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi mencakup laporan organisasi dan usaha. Laporan usaha berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai suatu sistem laporan pertanggungjawaban pengurus wajib disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

Dalam perlakuan akuntansi pada badan usaha koperasi telah diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, dimana akuntansi koperasi merupakan hal spesifik. Dalam paragraf 11 PSAK tersebut menyatakan bahwa PSAK ini : *mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggotanya, yaitu meliputi ;(a) transaksi setoran anggota koperasi; dan (b) transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, dan; (c) transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi, diantaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, beban-beban perkoperasian; serta (d) penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.*

Dalam hal koperasi melakukan transaksi yang timbul dengan non anggota, dimana transaksi tersebut diperlakukan sama dengan transaksi pada badan usaha lainnya (paragraf 12).

Lebih lanjut dalam paragraf 74 PSAK No. 27 (Revisi 1998) menyebutkan laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara dalam PSAK No. 1(Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 07, bahwa laporan keuangan yang

lengkap terdiri dari komponen; Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan koperasi lengkap seharusnya meliputi : (a) Neraca, (b) Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan (f) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu (paragraf 80). Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu : (a) manfaat ekonomi dari pembelian barang bersama atau pengadaan jasa bersama, (b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, (c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, (d) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Atas dasar pemantauan kami bahwa Koperasi belum atau bahkan tidak ada yang menyajikan **Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan menyajikan laporan Perhitungan Hasil Usaha yang membedakan transaksi anggota dengan bisnis dengan non anggota**. Selanjutnya atas dasar diskusi kami dengan beberapa Kepala Bagian Keuangan/Akuntansi/Manajer pada koperasi sebagai responden mengalami hambatan/kesulitan dalam implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998), yaitu : (a) kesulitan teknis, yaitu dalam memisahkan transaksi usaha dengan anggota dan non anggota, (b) kesulitan pengukuran, untuk menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, yaitu untuk menentukan harga patokan yang menjadi dasar mengukur perbandingan harga koperasi dengan harga di luar koperasi/pihak lain, dan (c) akuntabilitas sebagaimana tersebut diatas. Sehingga dalam penelitian ini mengambil variabel independen, yaitu: (a) Akuntabilitas sebagai (X_1), Kesulitan teknis sebagai (X_2) dan Kesulitan pengukuran sebagai (X_3), dimana ketiga variabel independen ini akan berpengaruh terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998) tentang akuntansi Perkoperasian-variabel (Y) sebagai variabel dependen.

Untuk itu guna mengetahui dan memahami dan mengakaji hambatan tersebut dilakukan penelitian, sehingga diharapkan dengan penelitian ini akan

bermanfaat bagi praktisi akuntansi (koperasi dan akuntan publik), Dewan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pemerintah untuk mengembangkan langkah-langkah kebijakan pemberdayaan koperasi dalam bidang organisasi dan manajemen koperasi.



DAFTAR PERTANYAAN

BAGIAN I DATA RESPONDEN

Harap diisi dengan mengisi dan atau memilih alternatif jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (√) kecuali pertanyaan no. 1 dan 5 dituliskan dengan sebenarnya.

1. Umur Respondentahun
2. Jenis kelamin (.....) Laki-laki (.....) Perempuan
3. Pendidikan terakhir : (.....) SLTA; (.....) D3; (.....) S1; (.....) S2 ; (.....) S3
4. Jurusan pendidikan (.....) akuntansi, (.....) keuangan, (.....) manajemen, (.....) lainnya
5. Lama bekerja di koperasi yang sekarang dijalani :tahun
6. Selain bekerja di koperasi ini juga bekerja di perusahaan/koperasi lain ? (.....) ya (.....) tidak
7. Apakah anda memiliki hubungan keluarga dengan salah satu diantara anggota koperasi, pengurus dan pengawas koperasi ? (.....) ya, (.....) tidak

BAGIAN II**DAFTAR : PERTANYAAN TERKAIT DENGAN VARIABEL PENELITIAN:
(Y)****Petunjuk pengisian :**

Mohon dijawab dengan memberikan tanda (X) pada skor angka dikolom yang Bapak/Ibu/Saudara setuju dan mohon dijawab semua sesuai dengan keadaan nyata pada koperasi.

Pilihan jawaban : 5 = Sangat Setuju (SS); 4 = Setuju (S); 3 = Cukup Setuju (C); 2 = Tidak Setuju (TS); 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

NO	PERTANYAAN	SS	S	C	TS	STS
1 Y	Saya menyusun dan menyajikan neraca	5	4	3	2	1
2	Saya mencatat modal anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib) dalam kelompok ekuitas di neraca.	5	4	3	2	1
3	Saya mencatat kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan dalam ekuitas koperasi.	5	4	3	2	1
4	Saya mencatat modal penyertaan dalam ekuitas koperasi	5	4	3	2	1
5	Saya mencatat cadangan yang diperoleh dari alokasi pembagian sisa hasil usaha dalam ekuitas koperasi	5	4	3	2	1
6	Saya mencatat sisa hasil usaha tahun berjalan sebelum dialokasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga dalam ekuitas koperasi	5	4	3	2	1
7	Saya menyusun dan menyajikan perhitungan hasil usaha yang memisahkan antara pendapatan berasal dari anggota dan bukan anggota.	5	4	3	2	1
8	Untuk dapat menyusun dan menyajikan perhitungan hasil usaha (No. 7), saya melakukan pencatatan penjualan (pelayanan) kepada anggota koperasi pada akun partisipasi bruto anggota	5	4	3	2	1
9	Saya mencatat harga pokok penjualan kepada anggota sebagai akun beban pokok pelayanan.	5	4	3	2	1
10	Saya mencatat harga pokok penjualan kepada bukan anggota pada akun harga pokok	5	4	3	2	1
11	Saya menyusun dan menyajikan selisih antara partisipasi bruto anggota dengan beban pokok pelayanan dalam akun partisipasi neto anggota	5	4	3	2	1

12	Saya menyusun dan menyajikan selisih antara pendapatan bukan anggota dengan harga pokok, pada akun laba (rugi) kotor dengan bukan anggota.	5	4	3	2	1
13	Dalam rangka meningkatkan SDM anggota koperasi, melakukan pendidikan anggota, biayanya dicatat pada akun beban perkoperasian dan dibebankan dalam periode berjalan	5	4	3	2	1
14	Dalam rangka promosi ekonomi anggota, koperasi melakukan pengembangan usaha ekonomi anggota, biayanya dicatat pada akun beban perkoperasian dan dibebankan dalam periode berjalan	5	4	3	2	1
15	Dalam rangka peringatan hari besar koperasi, melakukan acara-acara perkoperasian, biayanya dicatat pada akun beban perkoperasian dan dibebankan dalam periode berjalan	5	4	3	2	1
16	Dalam rangka mendukung eksistensi wadah tunggal koperasi (dekopin), melakukan uran, biayanya dicatat pada akun beban perkoperasian dan dibebankan dalam periode berjalan	5	4	3	2	1
17	Saya menyusun dan menyajikan laporan arus kas	5	4	3	2	1
18	Saya menyusun dan menyajikan arus kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan	5	4	3	2	1
19	Untuk mengetahui manfaat ekonomi kepada anggotanya, koperasi menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota	5	4	3	2	1
20	Untuk mengetahui manfaat ekonomi kepada anggotanya, koperasi menyusun dan menyajikan manfaat ekonomi dari pemasaran produk anggota dalam laporan promosi ekonomi anggota	5	4	3	2	1
21	Untuk mengetahui manfaat ekonomi kepada anggota, saya menyusun dan menyajikan dalam laporan promosi ekonomi anggota tentang pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	5	4	3	2	1
22	Untuk mengetahui manfaat ekonomi kepada anggota, saya menyusun dan menyajikan dalam laporan promosi ekonomi anggota tentang pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	5	4	3	2	1
23	Untuk mengetahui manfaat ekonomi kepada anggota, saya menyusun dan menyajikan manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota dalam laporan promosi ekonomi anggota	5	4	3	2	1

24	Untuk mengetahui manfaat ekonomi anggota, saya menyusun dan menyajikan dalam laporan promosi ekonomi anggota tentang pengadaan barang atas dasar harga pasar	5	4	3	2	1
25	Untuk mengetahui manfaat ekonomi anggota, saya menyusun dan menyajikan dalam laporan promosi ekonomi anggota tentang pengadaan barang atas dasar harga koperasi	5	4	3	2	1
26	Untuk mengetahui manfaat ekonomi anggota, saya menyusun dan menyajikan manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi	5	4	3	2	1
27	Untuk mengetahui manfaat ekonomi anggota, saya menyusun dan menyajikan penghematan beban pinjaman anggota dalam laporan promosi ekonomi anggota	5	4	3	2	1
28	Saya menyusun dan menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan sempurna	5	4	3	2	1
29	Saya mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan	5	4	3	2	1
30	Untuk menentukan manfaat ekonomi anggota, saya menetapkan kebijakan akuntansi harga pelayanan kepada anggota dibandingkan dengan harga diluar koperasi	5	4	3	2	1
31	Saya mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam memberikan harga pelayanan kepada anggota yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan dengan harga suatu barang/jasa diluar koperasi (bukan koperasi)	5	4	3	2	1
32	Saya menetapkan harga tertentu dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi	5	4	3	2	1

BAGIAN III**DAFTAR : PERTANYAAN TERKAIT DENGAN VARIABEL PENELITIAN X₁****Petunjuk pengisian :**

Mohon dijawab dengan memberikan tanda (√) pada kolom skala yang cocok yang Bapak/Ibu/Saudara setuju dan mohon dijawab semua sesuai dengan keadaan nyata pada koperasi.

1.	Penyelenggaraan rapat anggota						
	Tepat waktu	5	4	3	2	1	Terlambat
	Kriteria : sesuai dengan jenis koperasi tempat bekerja (primer atau sekunder) 1. Bagi Koperasi Primer a. ≤ Maret = skor 5 b. April = skor 4 c. Mei = skor 3 d. Juni = skor 2 e. Juli = skor 1 2. Bagi Koperasi Sekunder a. ≤ Juni = skor 5 b. Juli = skor 4 c. Agustus = skor 3 d. September = skor 2 e. Oktober = skor 1						
2.	Pemberitahuan kepada anggota jadwal rapat anggota dalam waktu yang cukup						
	Waktu cukup	5	4	3	2	1	Waktu terbatas
	Kriteria : menurut ART Koperasi pasal 15 buku laporan pertanggungjawab pengurus disampaikan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 hari sebelum RAT. a. 7 - 8 hari sebelum RAT = skor 5 b. 5 - 6 hari sebelum RAT = skor 4 c. 3 - 4 hari sebelum RAT = skor 3 d. 1 - 2 hari sebelum RAT = skor 2 e. Pada saat pelaksanaan RAT = skor 1						
3.	Mendorong anggota menghadiri rapat anggota						
	Dilakukan	5	4	3	2	1	Tidak dilakukan
	Kriteria : a. Semua unsur pengurus dan pengawas mendorong anggota mengikuti RAT = skor 5 b. Semua unsur pengurus mendorong anggota mengikuti RAT = skor 4 c. Sebagian besar pengurus (jumlah pengurus - dikurangi 1) mendorong anggota mengikuti = skor 3 d. Sebagian besar pengurus (jumlah pengurus - dikurang 2) mendorong anggota mengikuti RAT = skor 2 e. Tidak ada dorongan = skor 1						
4.	Melibatkan anggota dalam mengambil keputusan strategis melalui rapat anggota luar biasa (RALB)						
	Anggota terlibat	5	4	3	2	1	Tidak diberitahu
	Kriteria : a. Melebihi quorum = skor 5 b. Memenuhi quorum = skor 4 c. Memenuhi quorum setelah ada penundaan = skor 3 d. Tidak memenuhi quorum = skor 2 e. Tidak menyelenggarakan RALB = skor 1						

5	Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) atau pedoman/standar							
	Sesuai standar	5	4	3	2	1	Menyimpang	
	Kriteria : a. Menyajikan: Neraca, PHU, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Catatan atas laporan keuangan = skor 5 b. Menyajikan : Neraca, PHU, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi ekonomi anggota, Catatan atas laporan keuangan, skor 4 c. Menyajikan : Neraca, PHU, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan = skor, 3 d. Menyajikan : Neraca, PHU, Catatan atas laporan keuangan = skor 2 e. Menyajikan : Neraca, PHU = skor 1							
6.	Pelaporan keuangan tepat waktu							
	Tepat waktu	5	4	3	2	1	Terlambat	
	Kriteria : sesuai dengan jenis koperasi tempat bekerja (primer atau sekunder) 1. Bagi Koperasi Primer a. ≤ Maret = skor 5 b. April = skor 4 c. Mei = skor 3 d. Juni = skor 2 e. Juli = skor 1 2. Bagi Koperasi Sekunder a. ≤ Juni = skor 5 b. Juli = skor 4 c. Agustus = skor 3 d. September = skor 2 e. Oktober = skor 1							
7	Informasi non keuangan dapat diakses anggota							
	Mudah diakses	5	4	3	2	1	Sulit diakses	
	Kriteria : a. Tersedia web site = skor 5 b. Tersedia bulletin memuat laporan organisasi terbit setiap bulan = skor 4 c. Tersedia brosur memuat informasi organisasi, terbit setiap bulan, skor = 3 d. Tersedia brosur memuat informasi organisasi, terbit 2 dua bulanan = skor 2 e. Tidak tersedia brosur memuat informasi organisasi = skor 1							
8	Pemberian kesempatan anggota untuk membaca laporan keuangan.							
	Diberikan kesempatan	5	4	3	2	1	Tidak	
	Kriteria : menurut ART Koperasi pasal 15 buku laporan pertanggungjawab pengurus disampaikan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 hari sebelum RAT. a. 7 - 8 hari sebelum RAT = skor 5 b. 5 - 6 hari sebelum RAT = skor 4 c. 3 - 4 hari sebelum RAT = skor 3 d. 1 - 2 hari sebelum RAT = skor 2 e. Pada saat pelaksanaan RAT = skor 1							
9	Anggota mempunyai kesempatan menyampaikan hak suaranya melalui rapat anggota.							
	Diberikan kesempatan	5	4	3	2	1	Kesempatan dibatasi	
	Kriteria : a. Jumlah orang yang menyampaikan pendapat/usul/saran pada RAT 18 - 21 orang = skor 5 b. Jumlah orang yang menyampaikan pendapat/usul/saran pada RAT 14 - 17 orang = skor 4 c. Jumlah orang yang menyampaikan pendapat/usul/saran pada RAT							

	<p>9-13 orang orang = skor 3</p> <p>d. Jumlah orang yang menyampaikan pendapat/usul/saran pada RAT 5 - 8 orang = skor 2</p> <p>e. Jumlah orang yang menyampaikan pendapat/usul/saran pada RAT 1 - 4 orang = skor 1</p>						
10	Anggaran Dasar Koperasi memuat hak anggota						
	Memuat	5	4	3	2	1	Tidak memuat
	<p>Kriteria :</p> <p>Hak anggota, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pelayanan 2. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota 3. Memiliki hak yang sama 4. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas 5. Mengajukan pendapat, saran dan usul kebaikan dan kemajuan koperasi 6. Memperoleh sisa hasil usaha. <p>a. 6 hak anggota tercantum dalam anggaran dasar = skor 5</p> <p>b. 5 hak anggota tercantum dalam anggaran dasar = skor 4</p> <p>c. 4 hak anggota tercantum dalam anggaran dasar = skor 3</p> <p>d. 3 hak anggota tercantum dalam anggaran dasar = skor 2</p> <p>e. 2 hak anggota tercantum dalam anggaran dasar = skor 1</p>						
11	Koperasi memiliki anggaran rumah tangga						
	Memiliki	5	4	3	2	1	Tidak membuat
	<p>Kriteria :</p> <p>Anggaran rumah tangga memuat tentang ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan 2. Rapat anggota 3. Pengurus 4. Pengelola 5. Pengawas 6. Usaha dan permodalan 7. Tanggungan anggota 8. Sanksi <p>a. Memuat ketentuan 1 s/d 8 = skor 5</p> <p>b. Memuat 7 ketentuan = skor 4</p> <p>c. Memuat 5 ketentuan = skor 3</p> <p>d. Memuat 3 ketentuan = skor 2</p> <p>e. Tidak membuat anggaran rumah tangga = skor 1</p>						
12	Koperasi memiliki peraturan khusus						
	Memiliki	5	4	3	2	1	Tidak membuat
	<p>Kriteria :</p> <p>Peraturan khusus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan kelembagaan 2. Manajemen usaha 3. Permodalan 4. Pelaporan 5. Pengangkatan pengelola <p>a. Memuat ketentuan 1 s/d 5 = skor 5</p> <p>b. Memuat 4 ketentuan = skor 4</p> <p>c. Memuat 3 ketentuan = skor 3</p> <p>d. Memuat 2 ketentuan = skor 2</p> <p>e. Tidak membuat peraturan khusus = skor 1</p>						

13	Pedoman operasional baku (POB) dimiliki, sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengatur mekanisme pelaksanaannya.						
	Tersedia POB	5	4	3	2	1	POB belum dibuat
	Kriteria : Petunjuk operasional baku (POB) memuat : 1. Uraian tugas pengurus 2. Uraian tugas pengawas 3. Uraian tugas direksi/manajer 4. Uraian tugas karyawan 5. Adanya pedoman pengendalian intern 6. Adanya ketentuan kompensasi manajemen/karyawan/bonus 7. Adanya sistem akuntansi (buku administrasi keuangan, kode/nomor rekening) a. Memuat 1 s/ 7 = skor 5 b. Memuat 6 macam = skor 4 c. Memuat 5 macam = skor 3 d. Memuat 4 macam = skor 2 e. Tidak membuat POB = skor 1						
14	Pedoman etika dan tingkah laku anggota, pengurus, pengawas dan karyawan						
	Pedoman tersedia	5	4	3	2	1	Pedoman belum dibuat
	Kriteria : 1. Hak dan kewajiban anggota disusun 2. Tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus disusun 3. Tugas, wewenang dan tanggungjawab pengawas disusun 4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi/manajer disusun 5. Tugas dan tanggungjawab karyawan disusun a. Memuat 1 s/d 5 = skor 5 b. Memuat 4 macam = skor 4 c. Memuat 3 macam = skor 3 d. Memuat 2 macam = skor 2 e. Tidak membuat pedoman = skor 1						
15	Penyelenggaraan rapat pengurus, pengawas dan karyawan secara tertib serta dibuatkan berita acara.						
	Tertib	5	4	3	2	1	Tidak dilaksanakan
	Kriteria : a. Setiap 2 minggu sekali, ada berita acara = skor 5 b. Setiap 3 minggu sekali, ada berita acaranya = skor 4 c. Setiap 1 bulan sekali, ada berita acaranya = skor 3 d. Setiap 1,5 bulan sekali, ada berita acaranya = skor 2 e. Setiap 2 bulan sekali, ada berita acaranya = skor 1						
16	Kompetensi pengurus, pengawas dan karyawan yang memadai.						
	Memadai	5	4	3	2	1	Tidak memadai
	Kriteria : a. 81 % - 100 %, sarjana = skor 5 b. 61 % - 81 %, sarjana = skor 4 c. 41 % - 60 %, sarjana = skor 3 d. 21 % - 40 %, sarjana = skor 2 e. ≤ 20 %, sarjana = skor 1						
17	Meminimalkan benturan kepentingan pengurus, pengawas dan karyawan.						
	Dilakukan	5	4	3	2	1	Tidak diupayakan
	Kriteria ; menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dilakukan pertemuan/diskusi pengurus, pengawas dan direksi/karyawan a. Setiap bulan 1 sekali, ada berita acara = skor 5 b. Setiap dua bulan sekali, ada berita acaranya = skor 4 c. Setiap tiga bulan sekali, ada berita acaranya = skor 3						

	d. Setiap empat bulan sekali, ada berita acaranya = skor 2 e. Setiap 6 bulan sekali, ada berita acaranya = skor 1						
18	Auditor intern kompeten dan memadai						
	Memadai	5	4	3	2	1	Tidak memadai
	Kriteria : ada tidaknya satuan pengendalian intern, bukan pengawas a. Terdapat satuan pengendalian intern, dengan SDM 5 orang = skor 5 b. Terdapat satuan pengendalian intern, dengan SDM 4 orang = skor 4 c. Terdapat satuan pengendalian intern, dengan SDM 3 orang = skor 3 d. Terdapat satuan pengendalian intern, dengan SDM 2 orang = skor 2 e. Tidak terdapat satuan pengendalian intern = skor 1						
19	Penilaian kinerja karyawan						
	Dilakukan	5	4	3	2	1	Tidak dilakukan
	Kriteria : a. Dilakukan setiap 6 bulan sekali = skor 5 b. Dilakukan setiap 9 bulan sekali = skor 4 c. Dilakukan setiap 1 tahun sekali = skor 3 d. Dilakukan setiap 1,5 tahun sekali = skor 2 e. Dilakukan setiap 2 tahun sekali = skor 1						
20	Koperasi mempunyai visi, misi dan rencana strategis						
	Telah dimiliki	5	4	3	2	1	Tidak disusun
	Kriteria : a. Visi, misi sudah tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan dijabarkan dalam rencana strategi koperasi = skor 5 b. Visi, misi sudah tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun belum dijabarkan dalam rencana strategi koperasi = skor 4 c. Visi, misi sudah tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun belum dipahami sepenuhnya oleh pengelola koperasi = skor 3 d. Visi, misi sudah ada belum tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (masih berupa notulen rapat) = skor 2 e. Tidak mempunyai visi, misi dan strategi = skor 1						

**DAFTAR : PERTANYAAN TERKAIT DENGAN VARIABEL
PENELITIAN : X_2 DAN X_3**

Petunjuk pengisian :

Mohon dijawab dengan memberikan tanda (X) pada skor angka dikolom yang Bapak/Ibu/Saudara setuju dan mohon dijawab semua sesuai dengan keadaan nyata pada koperasi.

**Pilihan jawaban : 1 = Sangat sulit (SS); 2 = Sulit (S); 3 = Cukup sulit (C);
4 = Mudah (M); 5 = Sangat mudah (SM)**

NO	PERTANYAAN	SS	S	C	M	SM
1 X_2	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya mencatat partisipasi dari anggota pada faktur pembelian barang/jasa dari anggota	1	2	3	4	5
2	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya mencatat partisipasi dari anggota pada faktur penjualan barang/jasa kepada anggota	1	2	3	4	5
3	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya mencatat partisipasi dari anggota dalam bukti penerimaan kas	1	2	3	4	5
4	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya mencatat partisipasi anggota dalam slip pembayaran cicilan pinjaman	1	2	3	4	5
5 X_3	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya menentukan/menetapkan rata-rata harga jual per item produk yang dijual oleh perusahaan diluar koperasi	1	2	3	4	5
6	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya menentukan/menetapkan rata-rata harga beli per item produk yang dibeli oleh perusahaan diluar koperasi	1	2	3	4	5
7	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya menentukan/menetapkan rata-rata harga jasa tertentu perusahaan diluar koperasi untuk pelayanan jasa yang sama kepada anggota	1	2	3	4	5
8	Dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonomi anggota, saya menentukan/menetapkan rata-rata suku bunga bank/pihak lain selain koperasi pada setiap bulannya	1	2	3	4	5
9	Saya mencatat harga jual rata-rata per item produk/jasa/bunga dari perusahaan pihak lain dalam buku bantu promosi ekonomi anggota	1	2	3	4	5

mpiran 3a : Hasil uji validitas awal

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
	96.5278	84.2563	0.1904	0.7322	1.1309	1.6909	
	96.6944	86.1611	-0.0128	0.7387	-0.0746	1.6909	
	97.8333	79.5143	0.2839	0.7266	1.72644	1.6909	0.00
	97.1667	89.5143	-0.2344	0.7567	-1.4059	1.6909	
	96.6667	87.3143	-0.1242	0.744	-0.7299	1.6909	
	96.9722	91.8563	-0.3681	0.7635	-2.3085	1.6909	
	98.3056	83.9897	0.0886	0.7382	0.51866	1.6909	
	98.5	80.9429	0.2761	0.7272	1.67504	1.6909	
	98.4722	81.6849	0.2305	0.7299	1.38123	1.6909	
0	97.8889	81.4159	0.2458	0.729	1.47861	1.6909	
1	98.6389	80.5802	0.3932	0.7221	2.49358	1.6909	0.00
2	98.5556	79.854	0.4771	0.7186	3.16544	1.6909	0.00
3	96.7778	80.8635	0.3437	0.7241	2.13411	1.6909	0.00
4	97.3056	78.7897	0.3304	0.7232	2.04118	1.6909	0.00
5	97.3333	80.8571	0.2793	0.727	1.69608	1.6909	0.00
6	97.9722	78.1421	0.3914	0.7192	2.48009	1.6909	0.00
7	96.7778	85.5492	0.0313	0.7382	0.1826	1.6909	
8	97.5	83	0.0921	0.7412	0.53932	1.6909	
9	98.5278	75.6849	0.5335	0.7091	3.67795	1.6909	0.00
0	98.5833	77.2786	0.4909	0.7134	3.28554	1.6909	0.00
1	98.3333	76.8	0.4234	0.7162	2.72514	1.6909	0.00
2	98.8611	76.523	0.5536	0.7098	3.87618	1.6909	0.00
3	98.4722	76.4278	0.5947	0.7083	4.3133	1.6909	0.00
4	98.8056	77.3611	0.5304	0.7122	3.64818	1.6909	0.00
5	98.25	79.6214	0.354	0.7224	2.20708	1.6909	0.00
6	97.7778	84.9206	0.0157	0.7444	0.09156	1.6909	0.00
7	98.1389	77.2659	0.3893	0.7187	2.4644	1.6909	0.00
8	97.4167	81.1643	0.3526	0.7242	2.1971	1.6909	0.00
9	97.4722	78.1421	0.4057	0.7184	2.58818	1.6909	0.00
0	98.6111	85.5587	0.0188	0.7395	0.10964	1.6909	
1	98.9167	86.5357	-0.0577	0.7386	-0.337	1.6909	
2	98.6667	85.7143	0.0028	0.7407	0.01633	1.6909	

Empiran 3a : Hasil uji validitas awal

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
1	68.0833	117.05	-0.1324	0.7919	-0.7789	1.6909	
2	68.3333	108.4571	0.4531	0.7742	2.96368	1.6909	0.00
3	68.1944	109.3611	0.5171	0.7745	3.52272	1.6909	0.00
4	69.6944	102.3897	0.3564	0.7766	2.22421	1.6909	0.00
5	69.6389	99.3802	0.7361	0.7545	6.34117	1.6909	0.00
6	68.3333	114.1714	0.0357	0.7925	0.2083	1.6909	
7	70.6944	97.9897	0.5611	0.7604	3.95259	1.6909	0.00
8	68.6944	107.0754	0.3292	0.7775	2.03286	1.6909	0.00
9	69.5833	106.9357	0.2248	0.7862	1.34523	1.6909	
10	68.5	109.6286	0.2456	0.782	1.47733	1.6909	
11	68.4722	108.0278	0.3758	0.7758	2.36459	1.6909	0.00
12	69.5278	95.9706	0.4893	0.7657	3.27145	1.6909	0.00
13	69.1111	108.3873	0.2522	0.7822	1.51969	1.6909	
14	68.6667	111.4857	0.0912	0.7941	0.53401	1.6909	
15	70.1389	103.0373	0.5883	0.764	4.24211	1.6909	0.00
16	69.75	100.4786	0.5217	0.7643	3.56571	1.6909	0.00
17	69.3333	104.4571	0.3314	0.7778	2.04812	1.6909	0.00
18	70.8611	107.2087	0.2907	0.7799	1.77156	1.6909	0.00
19	69.6111	102.6444	0.4129	0.7719	2.64346	1.6909	0.00
20	69.6667	102.0571	0.3853	0.7741	2.43464	1.6909	0.00

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
1	8.5	7.1143	0.7869	0.8056	7.43562	1.6909	0.00
2	8.4444	8.0254	0.7089	0.8381	5.86064	1.6909	0.00
3	8.3333	8.2857	0.6541	0.8589	5.04229	1.6909	0.00
4	8.1389	7.723	0.7405	0.8253	6.42479	1.6909	0.00

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
1	8.0278	9.5706	0.6858	0.8306	5.49453	1.6909	0.00
2	8.0833	9.45	0.7826	0.8076	7.33031	1.6909	0.00
3	8.0833	10.4214	0.5767	0.8566	4.11615	1.6909	0.00
4	7.9167	9.5643	0.6094	0.8524	4.48171	1.6909	0.00
5	8	9.1429	0.7594	0.8111	6.80581	1.6909	0.00

Lampiran 3a ; Hasil uji validitas akhir

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
2	37.75	62.3643	0.3037	0.8642	1.85865	1.6909	0.00
4	36.5	59.7429	0.3169	0.8669	1.94824	1.6909	0.00
5	37.1667	58.2571	0.4402	0.8593	2.85865	1.6909	0.00
9	37.7222	53.9778	0.7389	0.8416	6.39417	1.6909	0.00
0	37.7778	55.7206	0.6827	0.8459	5.44792	1.6909	0.00
1	37.5278	53.5135	0.7039	0.8432	5.77842	1.6909	0.00
2	38.0556	55.7111	0.7014	0.8451	5.73795	1.6909	0.00
3	37.6667	54.6286	0.8357	0.8387	8.87299	1.6909	0.00
4	38	56.2286	0.7017	0.8457	5.74279	1.6909	0.00
5	37.4444	57.5683	0.557	0.8528	3.91065	1.6909	0.00
7	37.3333	55.8857	0.534	0.8542	3.68277	1.6909	0.00
8	36.6111	62.3016	0.295	0.8647	1.80025	1.6909	0.00
9	36.6667	60.8571	0.2793	0.8678	1.69608	1.6909	0.00

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
2	50.9722	96.3706	0.4974	0.7992	3.34322	1.6909	0.00
3	50.8333	97.9714	0.5064	0.8014	3.42433	1.6909	0.00
4	52.3333	90.7429	0.3719	0.8042	2.33609	1.6909	0.00
5	52.2778	87.9778	0.7599	0.7802	6.81641	1.6909	0.00
7	53.3333	86.9143	0.567	0.7882	4.01369	1.6909	0.00
11	51.1111	96.9587	0.3532	0.804	2.20138	1.6909	0.00
12	52.1667	84.0286	0.5259	0.7918	3.60533	1.6909	0.00
15	52.7778	92.2921	0.5641	0.7925	3.98355	1.6909	0.00
16	52.3889	90.2444	0.4859	0.7948	3.24166	1.6909	0.00
17	51.9722	92.4849	0.3569	0.8043	2.22778	1.6909	0.00
18	53.5	95.2286	0.3142	0.8063	1.92982	1.6909	0.00
19	52.25	90.3643	0.4569	0.7968	2.99506	1.6909	0.00
20	52.3056	89.6468	0.4311	0.7991	2.78589	1.6909	0.00

Lampiran 3a ; Hasil uji validitas akhir

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
1	8.5	7.1143	0.7869	0.8056	7.43562	1.6909	0.00
2	8.4444	8.0254	0.7089	0.8381	5.86064	1.6909	0.00
3	8.3333	8.2857	0.6541	0.8589	5.04229	1.6909	0.00
4	8.1389	7.723	0.7405	0.8253	6.42479	1.6909	0.00

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted	t value	t table	sig
1	8.0278	9.5706	0.6858	0.8306	5.49453	1.6909	0.00
2	8.0833	9.45	0.7826	0.8076	7.33031	1.6909	0.00
3	8.0833	10.4214	0.5767	0.8566	4.11615	1.6909	0.00
4	7.9167	9.5643	0.6094	0.8524	4.48171	1.6909	0.00
5	8	9.1429	0.7594	0.8111	6.80581	1.6909	0.00

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	Y12	2,5000	,6969	36,0
2.	Y14	3,7500	1,0790	36,0
3.	Y16	3,0833	1,0247	36,0
4.	Y19	2,5278	1,0278	36,0
5.	Y20	2,4722	,9407	36,0
6.	Y21	2,7222	1,1113	36,0
7.	Y22	2,1944	,9202	36,0
8.	Y23	2,5833	,8742	36,0
9.	Y24	2,2500	,8742	36,0
10.	Y25	2,8056	,9202	36,0
11.	Y27	2,9167	1,1307	36,0
12.	Y28	3,6389	,7232	36,0
13.	Y29	3,5833	,9964	36,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	37,0278	60,6563	7,7882	13

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Y12	34,5278	57,2278	,2791	,8735
Y14	33,2778	54,1492	,3364	,8748
Y16	33,9444	52,7968	,4573	,8669
Y19	34,5000	49,2857	,7147	,8510
Y20	34,5556	50,7683	,6716	,8544
Y21	34,3056	48,3325	,7177	,8503
Y22	34,8333	50,5429	,7082	,8525
Y23	34,4444	49,4540	,8489	,8454
Y24	34,7778	50,9206	,7190	,8525
Y25	34,2222	52,0063	,5879	,8592
Y27	34,1111	50,3873	,5601	,8611
Y28	33,3889	56,8730	,2989	,8728
Y29	33,4444	56,3683	,2202	,8800

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 36,0

N of Items = 13

Alpha = ,8709

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X1.2	4,5556	,7346	36,0
2.	X1.3	4,6944	,5767	36,0
3.	X1.4	3,1944	1,5459	36,0
4.	X1.5	3,2500	1,0522	36,0
5.	X1.7	2,1944	1,4307	36,0
6.	X1.11	4,4167	,9063	36,0
7.	X1.12	3,3611	1,7591	36,0
8.	X1.15	2,7500	,9964	36,0
9.	X1.16	3,1389	1,3126	36,0
10.	X1.17	3,5556	1,4029	36,0
11.	X1.18	2,0278	1,2068	36,0
12.	X1.19	3,2778	1,3651	36,0
13.	X1.20	3,2222	1,4950	36,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
SCALE	43,6389	84,1802	9,1750	Variables 13

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1.2	39,0833	77,4500	,4788	,8088
X1.3	38,9444	78,9683	,4761	,8113
X1.4	40,4444	69,1111	,4933	,8039
X1.5	40,3889	69,9016	,7486	,7872
X1.7	41,4444	68,3683	,5818	,7953
X1.11	39,2222	79,0349	,2683	,8183
X1.12	40,2778	66,9492	,4911	,8061
X1.15	40,8889	74,1016	,5296	,8027
X1.16	40,5000	72,4857	,4461	,8073
X1.17	40,0833	74,6500	,3119	,8191
X1.18	41,6111	75,1587	,3615	,8135
X1.19	40,3611	70,1802	,5306	,8001
X1.20	40,4167	70,1929	,4692	,8059

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 36,0

N of Items = 13

Alpha = ,8186

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X2.1	2,6389	1,1502	36,0
2.	X2.2	2,6944	1,0370	36,0
3.	X2.3	2,8056	1,0370	36,0
4.	X2.4	3,0000	1,0690	36,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	11,1389	13,2659	3,6422	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X2.1	8,5000	7,1143	,7869	,8056
X2.2	8,4444	8,0254	,7089	,8381
X2.3	8,3333	8,2857	,6541	,8589
X2.4	8,1389	7,7230	,7405	,8253

Reliability Coefficients

N of Cases = 36,0 N of Items = 4

Alpha = ,8693

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X3.1	2,0000	,9562	36,0
2.	X3.2	1,9444	,8927	36,0
3.	X3.3	1,9444	,8927	36,0
4.	X3.4	2,1111	1,0359	36,0
5.	X3.5	2,0278	,9706	36,0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
SCALE	10,0278	14,5421	3,8134	Variables 5

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X3.1	8,0278	9,5706	,6858	,8306
X3.2	8,0833	9,4500	,7826	,8076
X3.3	8,0833	10,4214	,5767	,8566
X3.4	7,9167	9,5643	,6094	,8524
X3.5	8,0000	9,1429	,7594	,8111

Reliability Coefficients

N of Cases = 36,0 N of Items = 5

Alpha = ,8612

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,593(a)	,352	,330	,50163	,352	16,109	3	89	,000

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,161	3	4,054	16,109	,000(a)
	Residual	22,395	89	,252		
	Total	34,556	92			

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,155	,306		3,775	,000
	X1	,329	,084	,345	3,919	,000
	X2	,123	,066	,222	1,884	,063
	X3	,139	,074	,221	1,879	,064

a Dependent Variable: Y

Regression assumption- Normality

Notes

Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x1 x2 x3 /RESIDUALS NORM(ZRESID) .
--------	---

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,605(a)	,366	,345	,396102

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,078	3	2,693	17,163	,000(a)
	Residual	13,964	89	,157		
	Total	22,042	92			

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,707	,310		5,501	,000
	X1	,275	,080	,300	3,448	,001
	X2	,143	,052	,324	2,729	,008
	X3	,084	,060	,168	1,409	,162

a Dependent Variable: Y

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	Y
13	-3,386	2,063
27	-3,237	2,219

a. Dependent Variable: Y

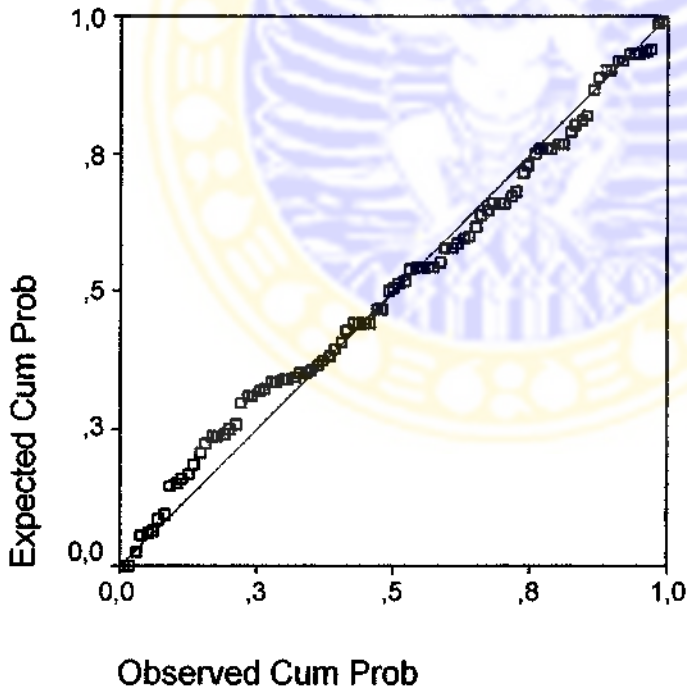
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,69154	3,90785	3,22513	,296323	93
Residual	-1,34101	,97114	,00000	,389590	93
Std. Predicted Value	-1,801	2,304	,000	1,000	93
Std. Residual	-3,386	2,452	,000	,984	93

a. Dependent Variable: Y

Charts

Normal P-P Plot of Regression
Dependent Variable: Y



Regression Assumption – Heteroskedasticity

152

Syntax

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN /DEPENDENT y
/METHOD=ENTER x1 x2 x3
/SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED
).
```

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,605(a)	,366	,345	,396102

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,078	3	2,693	17,163	,000(a)
	Residual	13,964	89	,157		
	Total	22,042	92			

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,707	,310		5,501	,000
	X1	,275	,080	,300	3,448	,001
	X2	,143	,052	,324	2,729	,008
	X3	,084	,060	,168	1,409	,162

a Dependent Variable: Y

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	Y
13	-3,386	2,063
27	-3,237	2,219

a Dependent Variable: Y

Residuals Statistics(a)

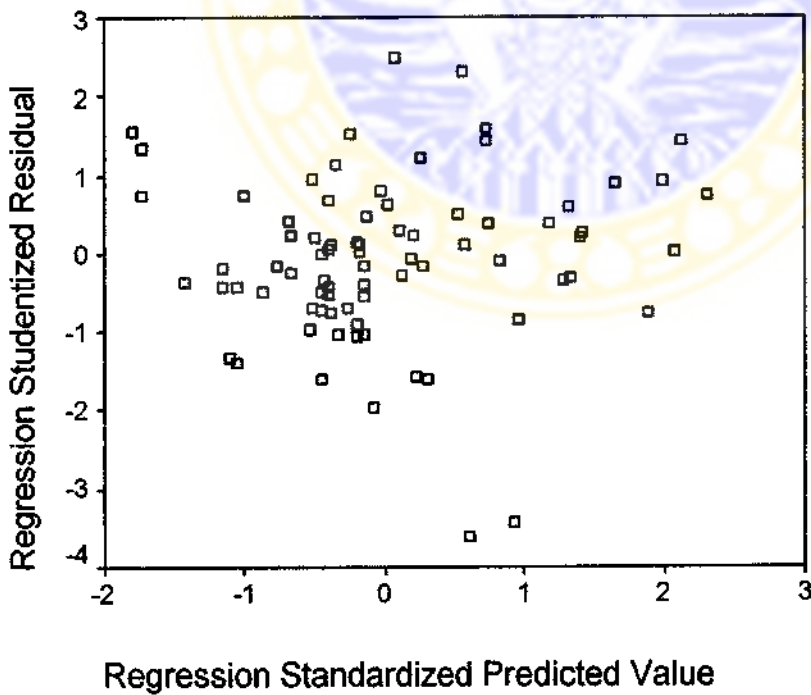
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,69154	3,90785	3,22513	,296323	93
Std. Predicted Value	-1,801	2,304	,000	1,000	93
Standard Error of Predicted Value	,045369	,164048	,077850	,026365	93
Adjusted Predicted Value	2,64785	3,86635	3,22380	,300359	93
Residual	-1,34101	,97114	,00000	,389590	93
Std. Residual	-3,386	2,452	,000	,984	93
Stud. Residual	-3,602	2,474	,002	1,015	93
Deleted Residual	-1,51786	,98918	,00133	,415587	93
Stud. Deleted Residual	-3,875	2,550	-,002	1,041	93
Mahal. Distance	,218	14,791	2,968	2,894	93
Cook's Distance	,000	,428	,017	,060	93
Centered Leverage Value	,002	,161	,032	,031	93

a. Dependent Variable: Y

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Notes

Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS BCOV COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x1 x2 x3 .
--------	---

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,939	1,065
	X2	,504	1,983
	X3	,501	1,995

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X3	X1	X2
1	Correlations	X3	1,000	-,112	-,685
		X1	-,112	1,000	-,083
		X2	-,685	-,083	1,000
	Covariances	X3	,004	-,001	-,002
		X1	-,001	,006	,000
		X2	-,002	,000	,003

a Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3,712	1,000	,00	,00	,01	,01
	2	,208	4,224	,02	,02	,18	,11
	3	,071	7,240	,00	,00	,81	,87
	4	,009	20,692	,98	,98	,00	,00

a Dependent Variable: Y

Lampiran 5 : Regresi tahap 2

155

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,571(a)	,326	,311	,50863	,326	21,786	2	90	,000

a Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,273	2	5,636	21,786	,000(a)
	Residual	23,283	90	,259		
	Total	34,556	92			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,193	,309		3,853	,000
	X1	,344	,085	,360	4,058	,000
	X2	,206	,049	,371	4,176	,000

a Dependent Variable: Y

Regression assumption- Normality**Notes**

Syntax

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE
/STATISTICS BCOV COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN /DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/RESIDUALS NORM(ZRESID) .
```

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary(a)

a Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,966	1,035
	X2	,966	1,035

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X2	X1
1	Correlations	X2	1,000	-,184
		X1	-,184	1,000
	Covariances	X2	,002	-,001
		X1	-,001	,009

a Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2,818	1,000	,00	,00	,03
	2	,172	4,049	,02	,02	,97
	3	,010	16,584	,98	,98	,00

a Dependent Variable: Y

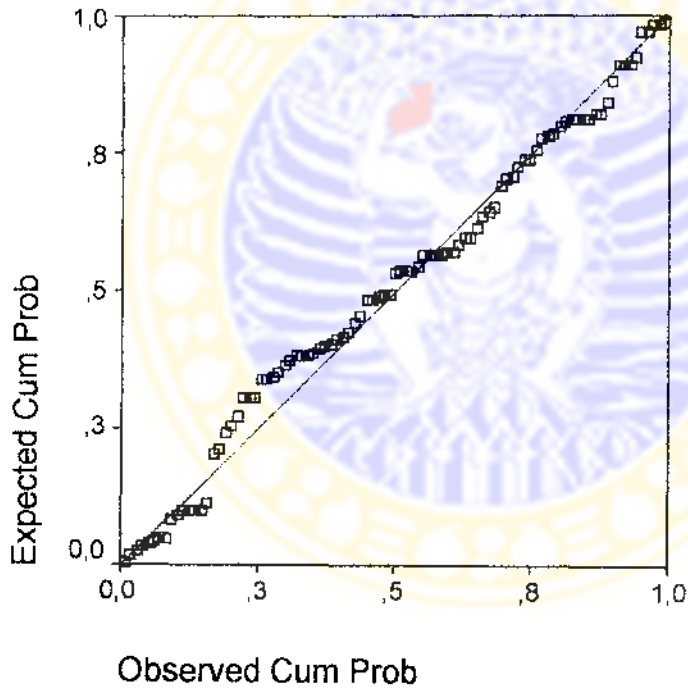
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,1969909 6679688	3,6681833 2672119	2,8463901 6897082	,34653779256 6124	93
Residual	1,2833964 8246765	1,1211276 0543823	,00000000 000000	,48562166252 4447	93
Std. Predicted Value	-1,874	2,371	,000	1,000	93
Std. Residual	-2,614	2,283	,000	,989	93

a. Dependent Variable: Y

Charts

Normal P-P Plot of Regression
Dependent Variable: YA



Regression Assumption – Heteroskedasticity**Notes**

Syntax

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE
/STATISTICS BCOV COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN /DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED
).
```

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,966	1,035
	X2	,966	1,035

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X2	X1
1	Correlations	X2	1,000	-,184
		X1	-,184	1,000
	Covariances	X2	,002	-,001
		X1	-,001	,009

a Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2,818	1,000	,00	,00	,03
	2	,172	4,049	,02	,02	,97
	3	,010	16,584	,98	,98	,00

a Dependent Variable: Y

Residuals Statistics(a)

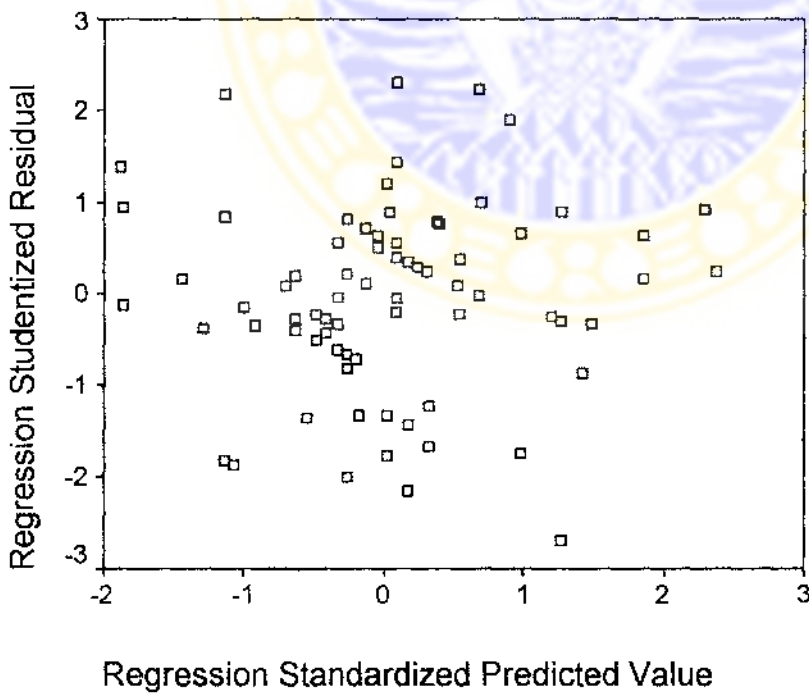
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,1969909 6679688	3,6681833 2672119	2,8463901 6897082	,34653779256612 4	93
Std. Predicted Value	-1,874	2,371	,000	1,000	93
Standard Error of Predicted Value	,05151892 0809031	,15372493 8631058	,08503717 4569998	,02347390598931 0	93
Adjusted Predicted Value	2,1552600 8605957	3,6554100 5134583	2,8443364 1311152	,34794770994056 1	93
Residual	1,2833964 8246765	1,1211276 0543823	,0000000 000000	,48562166252444 7	93
Std. Residual	-2,614	2,283	,000	,989	93
Stud. Residual	-2,680	2,302	,002	1,005	93
Deleted Residual	1,3486438 9896393	1,1390948 2955933	,00205375 585929	,50155062992662 2	93
Stud. Deleted Residual	-2,778	2,359	,001	1,017	93
Mahal. Distance	,024	8,029	1,978	1,719	93
Cook's Distance	,000	,122	,011	,016	93
Centered Leverage Value	,000	,087	,022	,019	93

a. Dependent Variable: Y

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: YA



Regression assumption-Multikolienerity**Notes**

Syntax

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE
/STATISTICS BCOV COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN /DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 .
```

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,966	1,035
	X2	,966	1,035

a Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations(a)

Model			X2	X1
1	Correlations	X2	1,000	-,184
		X1	-,184	1,000
	Covariances	X2	,002	-,001
		X1	-,001	,009

a Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2,818	1,000	,00	,00	,03
	2	,172	4,049	,02	,02	,97
	3	,010	16,584	,98	,98	,00

a Dependent Variable: Y



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
 PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

Sekretariat: Gedung Pascasarjana, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Telp/faks: (031)70985235, 5016090

Berita Acara Ujian Topikal / Tesis

Nama : Sutarto.....
 NIM : 090410703 I.....
 Tanggal Ujian : 2 Maret 2007 (14.00).....

No.	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tanggal Persetujuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Autokoreksi tdk dilakukan (bata ben hnc senas) - Itai 101 T/E - Variabel Y skalanya - Hal. 97 Multi kolinearitas → cari referensi - Lampiran yang relevan saja - Itai 61 kata serparhat (ditik) - Itai 63 + skala pengukuran - Itai 57 +/- penelitian Hrdahulu (b ditik) - Halaman 116-117 (ditik) 	<ul style="list-style-type: none"> P Basuki B Widi P Basuki P Hendar 	<ul style="list-style-type: none"> 13/2/07 13/2/07 13/2/07

Sekretaris
 Dosen Pembimbing,

(Signature)
 (..... Isngalita)

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal 13/2/07.

Dosen Pembimbing,
 Tesis

(Signature)

Pengaruh Akuntabilitas, Kesulitan Teknis ...

Sutarto